



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS DISPARITAS PENDAPATAN DAN
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

TESIS

BUDI BASA SIREGAR

NPM 1006791480

FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

JAKARTA

JANUARI 2012



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS DISPARITAS PENDAPATAN DAN
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi

BUDI BASA SIREGAR

NPM 1006791480

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
EKONOMI PERENCANAAN KOTA DAN DAERAH
JAKARTA
JANUARI 2012**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika dikemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggungjawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Jakarta, Januari 2012



Budi Basa Siregar

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Budi Basa Siregar

NPM : 1006791480

Tanda Tangan :



Tanggal : Januari 2012

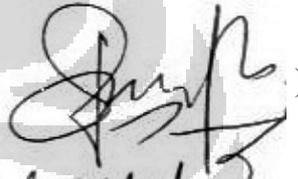
HALAMAN PENGESAHAN

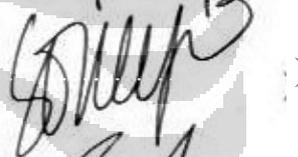
Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Budi Basa Siregar
NPM : 1006791480
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul Tesis : ANALISIS DISPARITAS PENDAPATAN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Titissari, SE, MT., M.Sc. ()

Penguji : Dr. Sonny Harry B. Harmadi ()

Penguji : Paksi Walandaouw, SE., MA ()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Januari 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmad-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ekonomi Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Titissari, S.E, M.T, M.Sc, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
2. Dr. Sonny Harry B. Harmadi, selaku dosen penguji dalam sidang tesis dan komprehensif yang telah memberikan saran dan kritik membangun untuk terus belajar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan;
3. Paksi C. Walandaouw, SE, MA, selaku dosen penguji dalam sidang tesis dan komprehensif yang telah memberikan saran dan kritik yang membuat penulis termotivasi untuk menjadi yang lebih baik;
4. Bapak Arindra A. Zainal, Ph.D, selaku Ketua Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia beserta kru bagian akademik yang selalu memotivasi dan memberikan pendampingan;
5. Isteriku Babar Susilawati, SE. S.PdI, dan kedua putriku Syifa Azqiyah Basa Siregar dan Zahra Aulia Basa Siregar yang selalu memberikan perhatian dan dorongan agar dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Keluarga Besar dari Bapak Alm. P. Siregar dan ibu Siti Amanah Daulay beserta Fastimah Siregar, Lagutma Siregar, Ahmad Buhari Siregar dan Lanna Raya Siregar yang terus memberikan semangat, doa dan restu selama ini.
7. Keluarga Bapak Rasmadi dan Ibu Jualiana Simanullang beserta Kak Enni dan Bang Limbong, Putra dan Dewi atas dukungan, semangat dan doa dalam kesbersamaan.

8. Kepala Pusbindiklatren sebagai pemberi beasiswa dan Bupati Tapanuli Tengah serta Kepala Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai pimpinan yang memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di MPKP;
9. Keluarga Besar MPKP XXIII Bappenas, Cem C (Prop Anu), Maulanan (Prop Mola), Aak Zulfı, Master Arga, dan Mbak Master (Arti dan Yanti), Ito Mei Hasibuan, Ustad Danial, Bang Badar, Uncle Ben Hidayat, Frenđ Laode, Udo Deky dan teman–teman lainnya atas kebersamaan dan keceriaan selama menempuh pendidikan yang tidak bisa disebutkan satu per satu;
10. Semua pihak yang turut serta membantu penelitian ini yang tidak tersebut.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, Januari 2012

Budi Basa Siregar

**HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Budi Basa Siregar

NPM : 1006791480

Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik

Departemen : Ilmu Ekonomi

Fakultas : Ekonomi

Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty*) atas karya ilmiah saya yang berjudul “ANALISIS DISPARITAS PENDAPATAN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DI PROVINSI SUMATERA UTARA” beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : Januari 2012

Yang menyatakan



Budi Basa Siregar

ABSTRAK

Nama : Budi Basa Siregar
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul Tesis : ANALISIS DISPARITAS PENDAPATAN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mengukur disparitas di Provinsi Sumatera Utara dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat disparitas di Provinsi Sumatera Utara. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan runtun waktu (time series) periode 1987 - 2008. Untuk perhitungan disparitas digunakan Indeks Williamson. Sedangkan untuk mengetahui hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat disparitas di Provinsi Sumatera Utara digunakan model persamaan regresi berganda dengan bantuan software Eviews 4.00. Model regresi yang digunakan adalah model linear dengan variabel bebas yaitu Inflasi (digunakan pendekatan dengan tingkat inflasi), peranan perdagangan diukur melalui rasio net ekspor terhadap PDRB, kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap PDRB dan tingkat pertumbuhan tenaga kerja non pertanian.

Dari hasil perhitungan tingkat kesenjangan antar daerah didapatkan hasil bahwa perkembangan disparitas pendapatan yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara berfluktuatif, pada tahun 1988 Indeks Williamson Provinsi Sumatera Utara sebesar 0,567 dan turun menjadi 0,426 pada tahun 1998 pada krisis ekonomi global. Pada tahun berikutnya tahun 2005 akibat adanya shock dari luar yaitu kebijakan pemerintah pusat untuk menaikkan harga BBM membuat Indeks Williamson meningkat menjadi 0,436. Selanjutnya Indeks Williamson semakin meningkat pada tahun berikutnya sampai pada angka 0,485 pada tahun 2008.

Sedangkan untuk mengetahui dampak kesenjangan dan variabel lain terhadap indeks Williamson digunakan model regresi berganda sebagai berikut:

$$CVW_t = \beta_0 + \beta_1 INF + \beta_2 TRA + \beta_3 EXP + \beta_4 URB + \varepsilon$$

Hasil estimasi didapatkan bahwa variabel berdasarkan hasil analisis regresi berganda, diperkirakan dipengaruhi oleh perdagangan yang diwakili oleh net ekspor terhadap PDRB. Sedangkan tingkat inflasi, kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap PDRB dan tingkat pertumbuhan tenaga kerja non pertanian tidak mempengaruhi tingkat disparitas pendapatan di Provinsi Sumatera Utara.

Hasil penelitian tersebut memiliki implikasi kebijakan yang diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi antara lain kebijakan peningkatan net ekspor di sektor pertanian dan industri

Kata kunci: *indeks Williamson, net ekspor, pengeluaran pemerintah.*

ABSTRACT

Name : Budi Basa Siregar
Program Study : Master of Planning and Public Policy
Thesis Title : Analysis of Income Disparity and Factors Affecting the North Sumatra Province

This study aimed to determine and measure the disparities in the province of North Sumatra and know the factors that influence the level of disparity in the province of North Sumatra. The data used are secondary to the time series data in the period 1987 to 2008. Index used for calculation of disparity Williamson. Meanwhile, to determine the relationship between the factors that influence the level of disparity in the province of North Sumatra used model of multiple regression equations with the help of software *Eviews 4.00*. Regression model used is a linear model with independent variables of inflation (the approach used for inflation), the role of trade is measured by the ratio of net exports to GDP, the contribution of government expenditure to GDP and the growth rate of nonfarm employment.

From the calculation of the level of regional disparities showed that growth of income disparity that occurred in North Sumatra province fluctuated, in 1988, North Sumatra Williamson Index of 0.567 and decreased to 0.426 in 1998 on the global economic crisis. In the following year in 2005 due to the shock from the outside of the central government policy to increase fuel prices make Williamson's index increased to 0.436. Furthermore, Williamson index increased in the following year until the number 0.485 in 2008.

Meanwhile, to determine the impact of inequality and other variables on the index Williamson used multiple regression model as follows:

$$CVwt = \beta_0 + \beta_1 INF + \beta_2 TRA + \beta_3 EXP + \beta_4 URB + \varepsilon$$

The estimation results obtained that the variables based on multiple and share government expenditure to GDP. While the rate of inflation, and the growth rate of non-agricultural labor force does not affect the level of income disparity in the province of North Sumatra.

The results of these studies have implications for policies aimed at increasing economic growth include an increase in net exports of agriculture and industry sectors.

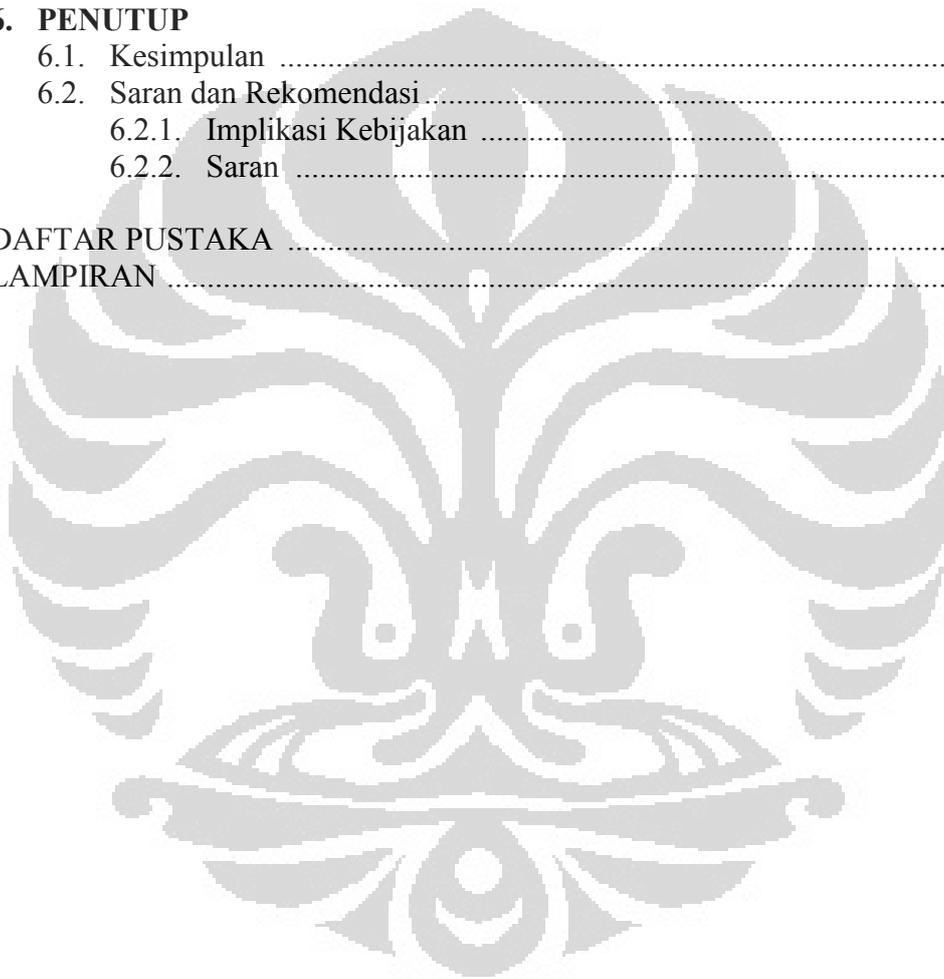
Keywords: index Williamson, inflation, net exports, government spending.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Perumusan Hipotesis	9
1.6. Kerangka Pemikiran	10
2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi	13
2.2. Teori Pertumbuhan	15
2.2.1. Teori Pertumbuhan Rostow	16
2.2.2. Teori Pertumbuhan Kuznet	16
2.2.3. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar	17
2.3. Teori Lokasi	17
2.4. Pusat Pertumbuhan	20
2.5. Disparitas Pendapatan Antar Daerah	21
2.6. Pengukuran Disparitas	25
2.6.1. Kurva Lorenz	25
2.6.2. Koefisien Gini	26
2.6.3. Indeks Williamson	27
2.6.4. Indeks Theils	29
2.7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Disparitas di provinsi Sumatera Utara	30
2.7.1. Inflasi	30
2.7.2. Pengeluaran Pemerintah	33
2.7.3. Perdagangan	35
2.7.4. Tenaga Kerja	37
2.8. Penelitian Terdahulu	38

3. METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Desain Penelitian	40
3.2. Jenis Data Penelitian	40
3.3. Pendekatan Penelitian	40
3.3.1. Pertumbuhan Ekonomi	41
3.3.2. Indeks Williamson atau Weighted Coefficient Variation (CVw).....	41
3.3.3. Regresi Linier Berganda	42
3.3.4. Pengujian Model	44
3.3.4.1. Uji Normalitas	44
3.3.4.2. Uji Multikolinieritas	44
3.3.4.3. Uji Heteroskedastisitas	45
3.3.4.4. Uji Autokorelasi	45
3.3.5. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Disparitas di Provinsi Sumatera Utara	46
4. KONDISI UMUM DAN PEREKONOMIAN DAERAH	
4.1. Kondisi Umum	49
4.2. Wilayah Pembangunan di Provinsi Sumatera Utara	53
4.2.1. Wilayah Pembangunan Agropolitan	57
4.2.2. Wilayah Pembangunan Agromarinepolitan	59
4.3. Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) sebagai Indikator Pertumbuhan Ekonomi.....	61
4.4. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Wilayah	64
4.5. Laju Pertumbuhan PDRB Sektoral Provinsi Sumatera Utara	66
4.6. Laju Pertumbuhan PDRB Sektoral Menurut Wilayah	68
4.6.1. Wilayah Agropolitan	68
4.6.2. Wilayah Agromarinepolitan Pantai Barat	70
4.6.3. Wilayah Agromarinepolitan Pantai Timur	72
4.7. Peranan PDRB Sektoral Menurut Wilayah Terhadap PDRB Total..	74
4.8. Peranan PDRB Wilayah Terhadap Pembentukan PDRB Total	76
4.9. Pertumbuhan Pendapatan/Kapita dan Jumlah Penduduk di Provinsi Sumatera Utara	78
4.10. Distriusi Jumlah Penduduk Menurut Wilayah di Provinsi Sumatera Utara (1987-2008)	80
4.11. Distribusi Pendapatan Perkapita Menurut Wilayah	83
5. HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1. Disparitas Regional	85
5.1.1. Provinsi Sumatera Utara	86
5.1.2. Wilayah Pembangunan	88
5.1.3. Sektoral	93
5.2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Disparitas di Provinsi Sumatera Utara	104
5.2.1. Uji Asumsi Klasik	104
5.2.1.1. Uji Normalitas	104
5.2.1.2. Uji Multikolinieritas	105
5.2.1.3. Uji Autokorelasi	105

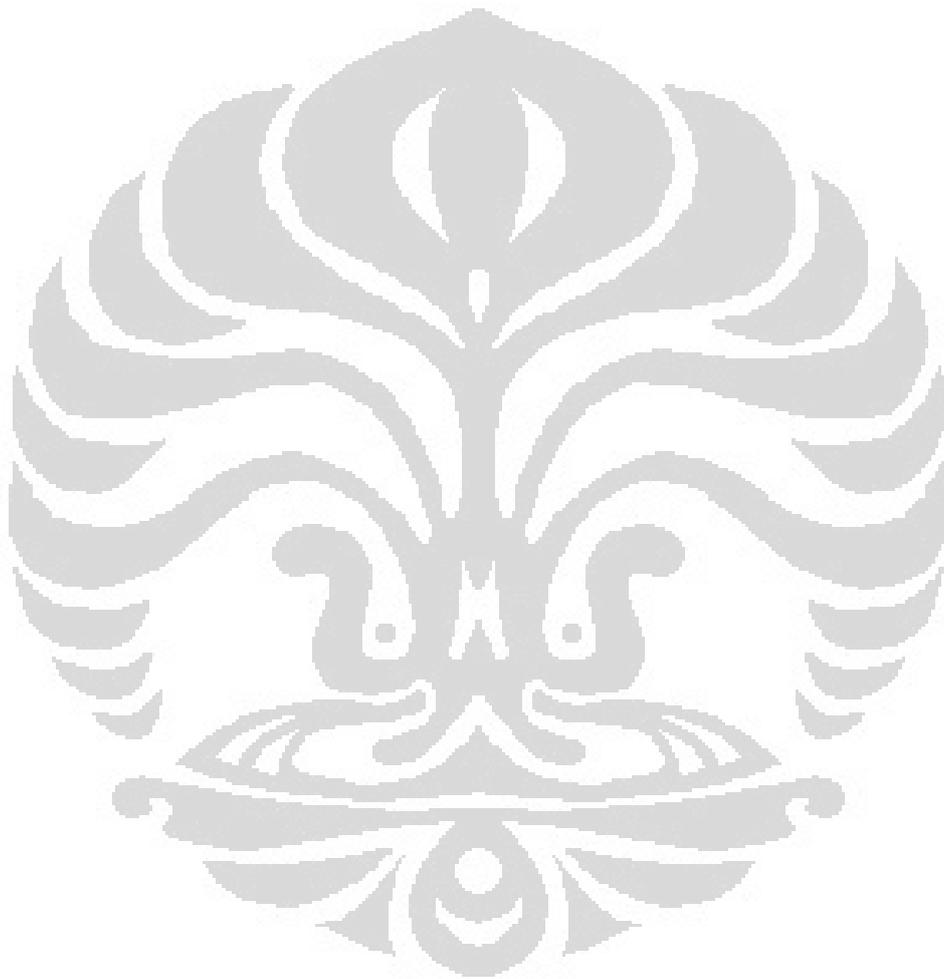
5.2.1.4. Uji Heterokedstisitas.....	106
5.2.2. Hubungan Inflasi terhadap Disparitas Pendapatan di Provinsi Sumatera Utara	108
5.2.3. Hubungan Perdagangan terhadap Disparitas Pendapatan dan Perkembangannya di Provinsi Sumatera Utara.....	111
5.2.4. Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Disparitas Pendapatan di Provinsi Sumatera Utara.....	114
5.2.5. Hubungan Tingkat Pertumbuhan Tenaga Kerja Non Pertanian dengan Disparitas Pendapatan di Provinsi Sumatera Utara.....	116
6. PENUTUP	
6.1. Kesimpulan	119
6.2. Saran dan Rekomendasi	120
6.2.1. Implikasi Kebijakan	120
6.2.2. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN	127



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1. Luas Menurut Wilayah Pengembangan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008	54
Tabel 4.2. Komoditas Unggulan di Lokalita Percontohan se-Kawasan Agropolitan.....	58
Tabel 4.3. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Tahun 2000 dengan dan tanpa minyak bumi di Provinsi Sumatera Utara	62
Tabel 4.4. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Tahun 2000 menurut Region	65
Tabel 4.5. Laju Pertumbuhan PDRB Sektoral ADHK Tahun 2000 di Provinsi Sumatera Utara	67
Tabel 4.6. Laju Pertumbuhan PDRB Sektoral ADHK Tahun 2000 di Wilayah Agropolitan Provinsi Sumatera Utara.....	69
Tabel 4.7. Laju Pertumbuhan PDRB Sektoral ADHK Tahun 2000 di Wilayah Agromarinepolitan Pantai Barat Provinsi Sumatera Utara	71
Tabel 4.8. Laju Pertumbuhan PDRB Sektoral ADHK Tahun 2000 di Wilayah Agromarinepolitan Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara	73
Tabel 4.9. Peranan PDRB Sektoral (%) ADHK Tahun 2000 Menurut Wilayah Terhadap Total PDRB (1983-2008).....	75
Tabel 4.10. Peranan PDRB Wilayah Terhadap Pembentukan PDRB Total Provinsi Sumatera Utara.....	77
Tabel 4.11. Pertumbuhan Pendapatan/Kapita ADHK Tahun 2000 dan Jumlah Penduduk di Provinsi Sumatera Utara (1983-2008).....	79
Tabel 4.12. Distriusi Jumlah Penduduk Menurut Wilayah di Provinsi Sumatera Utara (1983-2008)	81
Tabel 4.13. Distribusi Pendapatan Perkapita Menurut Wilayah (1983-2008)	83
Tabel 5.1. Indeks Williamson (CVw) di Provinsi Sumatera Utara	86
Tabel 5.2. Disparitas Distribusi Pendapatan (CVw) Menurut Wilayah	89
Tabel 5.3. Disparitas Distribusi Pendapatan (CVw) Menurut Sektoral	94
Tabel 5.4. Laju Inflasi di Empat Kota di provinsi Sumatera Utara Tahun 1998-2008.....	110
Tabel 5.5. Location Quotient Sektor Pertanian, Penggalan/Pertambangan dan Industri menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara (2004-2008)	112
Tabel 5.6. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Menurut Jenis Pengeluaran tahun 2007-2009 (dalam juta rupiah)	115
Tabel 5.7. Persentase Tenaga Kerja dan Tingkat Pertumbuhan Tenaga Kerja Pertanian dan non Pertanian tahun 1987-2008 (dalam persen)	117

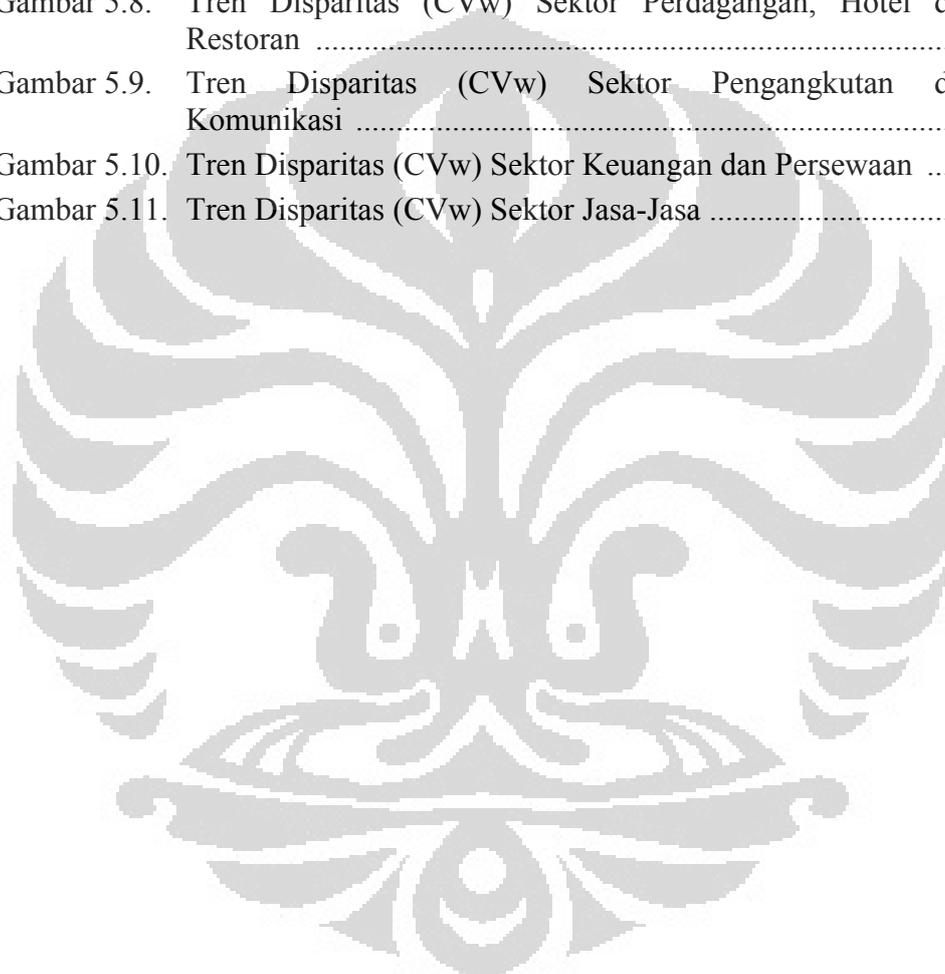
Tabel 5.8. Persentase Tenaga Kerja dan Tingkat Pertumbuhan Tenaga Kerja Pertanian dan non Pertanian tahun 1987-2008 (dalam persen) 118



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Pendapatan Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	6
Gambar 1.2. Persentase Rata-Rata Penduduk yang bekerja menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004-2008	7
Gambar 1.3. Persentase Rata-Rata Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004-2008.....	7
Gambar 1.4. Kerangka Pemikiran	11
Gambar 1.5. Peta Batas Administratif di Provinsi Sumatera Utara	12
Gambar 2.1. Kurve “U “ Terbalik (Hipotesis Kuznets)	17
Gambar 2.2. Segitiga Lokasi Produksi Weber	19
Gambar 2.3. Kurva Lorenz	26
Gambar 2.4. Kurva Koefisien Gini	27
Gambar 4.1. Pembagian Wilayah Pembangunan Pra Pemekaran di Provinsi Sumatera Utara	55
Gambar 4.2. Pembagian Wilayah Pembangunan Pasca Pemekaran Provinsi Sumatera Utara	56
Gambar 4.3. Tren Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Tahun 2000 dengan dan tanpa Minyak Bumi di Provinsi Sumatera Utara	64
Gambar 4.4. Tren Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Tahun 2000 menurut Region	66
Gambar 4.5. Tren Laju Pertumbuhan PDRB Sektoral Provinsi Sumatera Utara	68
Gambar 4.6. Tren Laju Pertumbuhan PDRB Sektoral Wilayah Agropolitan Provinsi Sumatera Utara	70
Gambar 4.7. Tren Laju Pertumbuhan PDRB Sektoral Wilayah Agromarine politan Pantai Barat Provinsi Sumatera Utara	72
Gambar 4.8. Tren Laju Pertumbuhan PDRB Sektoral Wilayah Agromarine politan Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara	74
Gambar 4.9. Peranan PDRB Sektoral (%) ADHK Tahun 2000 Menurut Wilayah Terhadap Total PDRB (1983-2008)	76
Gambar 4.10. Peranan PDRB Wilayah Terhadap Pembentukan PDRB Total Provinsi Sumatera Utara (1983-2008)	78
Gambar 4.11. Tren Pertumbuhan Pendapatan/Kapita ADHK Tahun 2000 dan Jumlah Penduduk di Provinsi Sumatera Utara (1983-2008)	80
Gambar 4.12. Distribusi Jumlah Penduduk Menurut Wilayah di Provinsi Sumatera Utara (1983-2008)	82
Gambar 4.13. Tren Distribusi Pendapatan Perkapita Menurut Wilayah (1983-2008)	84

Gambar 5.1.	Tren Perkembangan Disparitas Regional (CVw) di Provinsi Sumatera Utara	88
Gambar 5.2.	Tren Perkembangan Disparitas Wilayah Pengembangan Kawasan	91
Gambar 5.3.	Tren Disparitas (CVw) Sektor Pertanian	95
Gambar 5.4.	Tren Disparitas (CVw) Sektor Penggalian dan Pertambangan..	96
Gambar 5.5.	Tren Disparitas (CVw) Sektor Industri dan Pengolahan	97
Gambar 5.6.	Tren Disparitas (CVw) Sektor Listrik, Air dan Gas	98
Gambar 5.7.	Tren Disparitas (CVw) Sektor Bangunan	99
Gambar 5.8.	Tren Disparitas (CVw) Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran	100
Gambar 5.9.	Tren Disparitas (CVw) Sektor Pengangkutan dan Komunikasi	101
Gambar 5.10.	Tren Disparitas (CVw) Sektor Keuangan dan Persewaan	102
Gambar 5.11.	Tren Disparitas (CVw) Sektor Jasa-Jasa	103



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Data Variabel Penelitian.....	127
Lampiran 2. Hasil Analisis Regresi	128
Lampiran 3. Uji Normalitas (Jargue-Bera) Model Regresi.....	128
Lampiran 4. Uji Multikoliniearitas	129
Lampiran 5. Uji Autokorelasi Breush-Godfrey Serial Correlation LM Test.	129
Lampiran 6. Uji Heterokerdastisitas	130



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses multidimensial yang meliputi perubahan struktur sosial, perubahan dalam sikap hidup masyarakat dan perubahan dalam kelembagaan (institusi) nasional. Pembangunan juga meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan dan pemberantasan kemiskinan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan, maka pembangunan suatu negara dapat diarahkan pada tiga hal pokok yaitu : meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan standar hidup masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial dalam kehidupannya. (Todaro, 2006)

Suatu ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan yang berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi daripada apa yang dicapai pada masa sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Disini, proses mendapat penekanan karena mengandung unsur dinamis. Para teoretikus ilmu ekonomi pembangunan masa kini masih terus menyempurnakan makna, hakikat dan konsep pertumbuhan ekonomi. Para teoretikus menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan penambahan Produk Domestik Bruto dan Produk Domestik Regional Bruto saja, akan tetapi juga diberi bobot yang bersifat immaterial seperti kenikmatan, kepuasan dan kebahagiaan dengan rasa aman dan tentram yang dirasakan oleh masyarakat luas (Arsyad, 2010).

Pada masa sekarang ini pemerintah berupaya melakukan pembangunan dengan program dan kegiatan yang berada dalam lingkup pengembangan ekonomi lokal, telah, sedang, dan akan dilaksanakan dan pada umumnya melakukan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Program dengan pengembangan ekonomi lokal berbasis pemberdayaan masyarakat antara lain adalah Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan

Perkotaan (P2KP), Program Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D), Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), Program Kredit Usaha Bersama (KUBE) dan Agropolitan.

Pengembangan ekonomi lokal tidak cukup terfokus pada pemberdayaan masyarakat, namun diharapkan inisiatif telah berada pada pemerintah daerah dalam mengidentifikasi program dan kegiatan tersebut dapat berkelanjutan.

Pengembangan ekonomi lokal bertujuan untuk mengembangkan ekonomi suatu wilayah yang berkelanjutan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal guna pertumbuhan ekonomi wilayah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kesenjangan antar kelompok masyarakat, antar sektor dan antar wilayah. (Bappenas, 2010)

Pada dasarnya pengembangan ekonomi lokal merupakan proses dimana pemerintah daerah dan kelompok-kelompok masyarakat setempat mengelola sumberdaya mereka dan memasuki hubungan kemitraan yang baru dengan pihak swasta untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi pada zona yang lebih tertata. Konsep pokok dari pengembangan ekonomi lokal adalah pembangunan yang bertumpu kepada kekuatan endogen dengan memanfaatkan sumberdaya manusia lokal, kelembagaan dan sumberdaya fisik lokal. (Dedi, 2010)

Pembangunan di setiap sektor mempunyai lingkup kepentingan dan mencakup kawasan yang luas sering melintasi batas daerah/wilayah administrasi, dan sering dihadapkan pada berbagai masalah yang tidak saja sulit diatasi sendiri, tapi juga mengharuskan dilakukan kerjasama dengan daerah lain/sekitarnya.

Pembangunan Provinsi Sumatera Utara merupakan bagian dari pembangunan nasional sebagai upaya peningkatan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang tersedia merupakan salah satu modal dalam meningkatkan perekonomian daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2009-2013 menyebutkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui strategi peningkatan pendapatan per kapita yang sekaligus menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sehingga masyarakat punya masa depan.

Adapun beberapa strategi dan arah kebijakan yang dimuat dalam RPJMD Provinsi Sumatera (2009-2013) yang dijabarkan melalui program pembangunan di bidang ekonomi, sebagai berikut :

- meningkatkan kemakmuran dengan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat;
- penanganan masyarakat miskin melalui pengkajian dan pemetaan terhadap masyarakat miskin untuk mengetahui secara akurat kantong-kantong kemiskinan selanjutnya mengkaji dampak kebijakan terhadap ketimpangan sosial dan melakukan upaya penanggulangannya;
- menyiapkan infrastruktur yang mampu memperlancar pergerakan faktor produksi, sumberdaya manusia, dan produk dari satu daerah ke daerah lain sehingga mempermudah produksi dan pemasaran termasuk memperlancar ekspor;
- memperkuat peran usaha mikro kecil dan menengah serta alokasi yang lebih memberikan manfaat langsung kepada masyarakat serta meningkatkan aktivitas yang lebih produktif dan menyentuh para pelaku ekonomi rakyat;
- pengembangan agribisnis yang bertujuan untuk menghasilkan produk pertanian yang berdaya saing, nilai tambah bagi masyarakat petani dan nelayan khususnya di perdesaan, mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- mengembangkan kebijakan pengembangan wilayah untuk mendukung pelayanan meliputi percepatan pembangunan perdesaan, revitalisasi pembangunan perkotaan, pengembangan kawasan pesisir, percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Sebagai wujud nyata pengembangan ekonomi lokal tersebut diatas, Provinsi Sumatera Utara membuat kerjasama pembangunan wilayah atas dasar kerjasama di bidang agribisnis di Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan Provinsi Sumatera Utara. Hal ini ditandai adanya Nota Kesepahaman pada tanggal 28 September 2002 oleh Kepala Daerah Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Tapanuli Utara.

Dengan memperhatikan dari hasil pemekaran Kabupaten dan peningkatan daerah wilayah pengembangan program Agropolitan serta kesamaan karakteristik

yang dimiliki oleh daerah, pada tanggal 5 Mei 2006, Kepala Daerah dari Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan Kabupaten Pakpak Bharat dan Kota Pematang Siantar bergabung untuk ikut serta mengembangkan program pengembangan kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan Provinsi Sumatera Utara.

Program Agropolitan merupakan salah satu program yang diharapkan dapat mengatasi dan pengangguran dan merupakan program terpadu pengembangan wilayah dengan melibatkan masyarakat di pedesaan dan pemerintah mempunyai peran sebagai fasilitator.

Sejalan dengan kegiatan diatas dan dalam rangka menyeimbangkan serta mensinergikan pembangunan sektor pertanian antara dataran tinggi Kawasan Pantai Barat dan Pantai Timur, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mencanangkan program Agromarinepolitan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil dan pulau terluar sumatera utara yang diwujudkan dengan penandatanganan kesepakatan dari 16 Pemerintah Kabupaten/Kota se kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Sumatera Utara pada tanggal 13 April 2006 di gedung Bina Graha Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Sasaran dari Agromarinepolitan ini adalah mendorong percepatan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta pulau terluar Sumatera Utara yang berbasis kelautan dan perikanan secara terintegrasi, terkoordinasi dan terencana sesuai dengan target dan sasaran yang diharapkan, sehingga pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan dapat meningkat.

Adanya perbedaan kondisi geografis daerah membawa implikasi terhadap corak pembangunan yang diterapkan. Kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang ditetapkan di suatu daerah harus disesuaikan dengan kondisi (masalah, kebutuhan dan potensi) daerah tersebut.

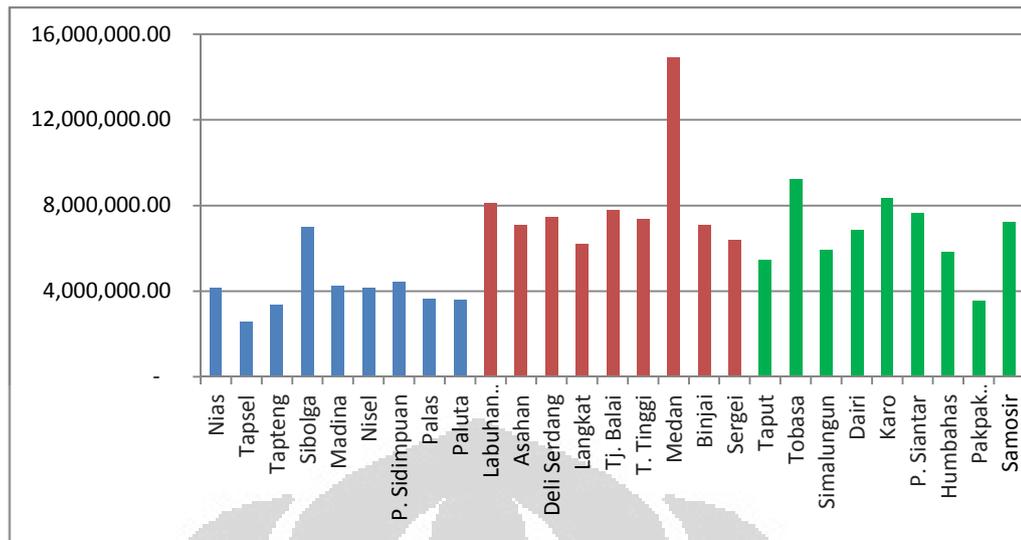
Perbedaan ini menyebabkan tingkat pembangunan di berbagai daerah dalam suatu negara atau di antara berbagai negara sangat berbeda satu sama lain yang dapat menimbulkan jurang kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah tersebut. Di antara berbagai daerah di dalam suatu negara seringkali terjadi perbedaan yang mencolok dalam tingkat pendapatan masyarakatnya, prasarana

ekonomi dan sosial yang tersedia, struktur kegiatan ekonominya dan tingkat pengangguran pada berbagai daerah.

Secara umum kegiatan sektor industri, perdagangan, keuangan dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya di daerah kaya akan lebih lancar dan lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan daerah yang lebih miskin. Pembangunan akan tetap lebih cepat dilakukan di daerah yang lebih kaya dibandingkan daerah yang lebih miskin dan akhirnya akan menimbulkan bertambah melebarnya jurang kesejahteraan di daerah-daerah tersebut.

Pemanfaatan sumber daya di daerah-daerah yang belum optimalnya merupakan salah satu sebab melebarnya jurang kesejahteraan antar daerah. Potensi dan pemanfaatan sumberdaya sangat bervariasi antar wilayah dan antar provinsi bahkan antar daerah dalam provinsi itu sendiri. Perkembangan perekonomian suatu daerah dapat dilihat melalui Produk Domestik Regional Bruto per kapita di daerah tersebut. Ketimpangan dan variasi distribusi pendapatan mempunyai hubungan positif dengan variasi distribusi penguasaan faktor-faktor produksi, Keberhasilan pembangunan akan berbeda-beda antar wilayah dan provinsi, akan tetapi dengan tetap mengacu pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota masyarakat secara luas, perbedaan ini dapat dikurangi.

Masih belum meratanya dan adanya kesenjangan pembangunan dan pendapatan masyarakat antara Kawasan Agropolitan dan Kawasan Agromarinepolitan di Provinsi Sumatera Utara dapat diperkecil dengan memanfaatkan potensi secara maksimal dari masing-masing daerah untuk memajukan perekonomian daerah yang bersangkutan guna mengurangi ketimpangan yang terjadi. Berikut disajikan gambar 1.1, pendapatan/kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2008.

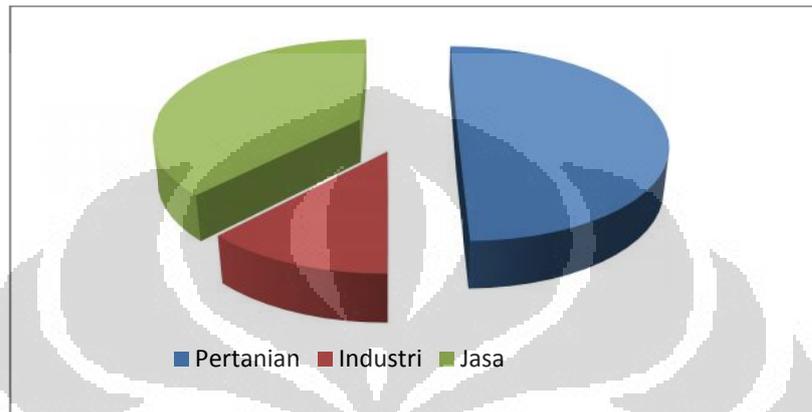


Gambar 1.1. Pendapatan Perkapita Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008

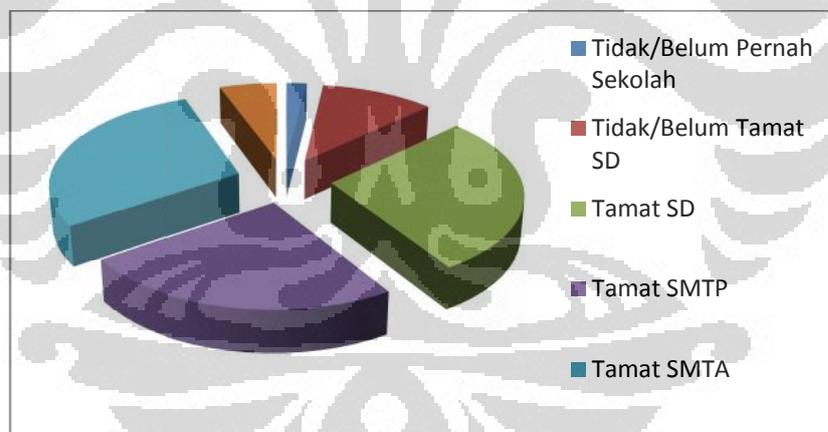
Dari gambar 1.1., dapat dilihat bahwa pendapatan perkapita secara kewilayahan dimana kawasan Agromarinepolitan Pantai Timur (warna merah) lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan Agromarinepolitan Pantai Barat (warna biru) dan kawasan Agropolitan (warna hijau). Hal ini dimungkinkan karena adanya perbedaan yang terlalu mencolok dari pendapatan perkapita Kota Medan yang tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya. Kota Medan disamping sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara juga berperan sebagai kutub pertumbuhan ekonomi dengan mengandalkan sektor perdagangan dan jasa-jasa. Sementara itu Kabupaten Tapanuli Selatan dengan pendapatan perkapita yang rendah lebih banyak didukung oleh sektor pertanian.

Sementara itu dari gambaran persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004-2008, rata-rata persentase rata-rata tenaga kerja di sektor pertanian sebesar 49.79%, sektor industri 12.28% dan sektor jasa sebesar 37.93%. Sedangkan jika dilihat dari persentase jumlah angkatan kerja yang berumur 15 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan pada tahun 2004-2008, persentase rata-rata tenaga kerja tidak/belum pernah sekolah sebesar 1.96%, persentase rata-rata tenaga kerja tidak/belum tamat SD sebesar 10.97%, persentase rata-rata tenaga kerja tamat SD sebesar 28.15%, persentase rata-rata tenaga kerja tamat SMTP sebesar 24.34%, rata-rata tenaga kerja tamat SMTA sebesar 29.07%

dan rata-rata tenaga kerja Diploma/Universitas sebesar 5.51%. Dari distribusi tenaga kerja diatas menggambarkan masih banyak tenaga kerja yang belum mempunyai keahlian dibandingkan dengan yang memiliki keahlian, hal ini menunjukkan adanya perbedaan upah/pendapatan yang diperoleh oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang berbeda tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.2. dan gambar 1.3. dibawah ini.



Gambar 1.2. Persentase Rata-Rata Penduduk yang bekerja menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004-2008



Gambar 1.3. Persentase Rata-Rata Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004-2008

Adelman dan Morris dalam Arsyad (2010) mengemukakan beberapa faktor yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara-negara sedang berkembang, yaitu : penambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita; inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan penambahan produksi barang-barang; ketidakmerataan pembangunan antar daerah.

Salah satu langkah awal untuk mengetahui disparitas pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara adalah dengan membuat suatu analisis disparitas pendapatan dan dilanjutkan dengan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya di Provinsi Sumatera Utara.

1.2. Perumusan Masalah

Pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Utara, di Kawasan Agropolitan dan Kawasan Agromarinepolitan ditujukan demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat (Masterplan Agromarinepolitan Provinsi Sumatera Utara). Tanpa pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi tidak akan berhasil. Namun pertumbuhan ekonomi yang terjadi harus disertai dengan pemerataan hasil-hasil pembangunan, sehingga kesejahteraan masyarakat juga akan terjadi peningkatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat diketahui bahwa telah terjadi disparitas pendapatan di Provinsi Sumatera Utara. Untuk itu penelitian ini akan menganalisa seberapa besar terjadinya disparitas tersebut. Berkaitan dengan hal ini diajukan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kecenderungan disparitas pendapatan di Provinsi Sumatera Utara ?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi disparitas di Provinsi Sumatera Utara ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kecenderungan disparitas pendapatan di Provinsi Sumatera Utara ?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas di Provinsi Sumatera Utara ?

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat digunakan sebagai pertimbangan alternatif untuk menyusun kebijakan ekonomi daerah dalam rangka menurunkan tingkat disparitas pendapatan antar Kabupaten/Kota.
2. Bagi ilmu pengetahuan adalah untuk menambah bahan studi kepustakaan tentang pertumbuhan ekonomi sebagai dasar pertimbangan studi selanjutnya

dimana Indeks Williamson digunakan sebagai alat ukur atas terjadinya ketimpangan antar daerah serta hubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas pendapatan di Provinsi Sumatera Utara.

1.5. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut :

1. Diduga tingkat inflasi mempunyai hubungan positif terhadap penurunan disparitas pendapatan di Provinsi Sumatera Utara.
2. Diduga peranan perdagangan mempunyai hubungan negatif terhadap penurunan disparitas pendapatan di Provinsi Sumatera Utara.
3. Diduga kontribusi pengeluaran pemerintah mempunyai hubungan negatif terhadap penurunan disparitas pendapatan di Provinsi Sumatera Utara.
4. Diduga tingkat pertumbuhan tenaga kerja non pertanian mempunyai hubungan negatif terhadap penurunan disparitas pendapatan di Provinsi Sumatera Utara.

Dari sekian banyak faktor-faktor yang dapat menyebabkan kesenjangan antar daerah di Provinsi Sumatera Utara, maka penulis membatasi penelitian ini pada empat faktor, sebagai berikut :

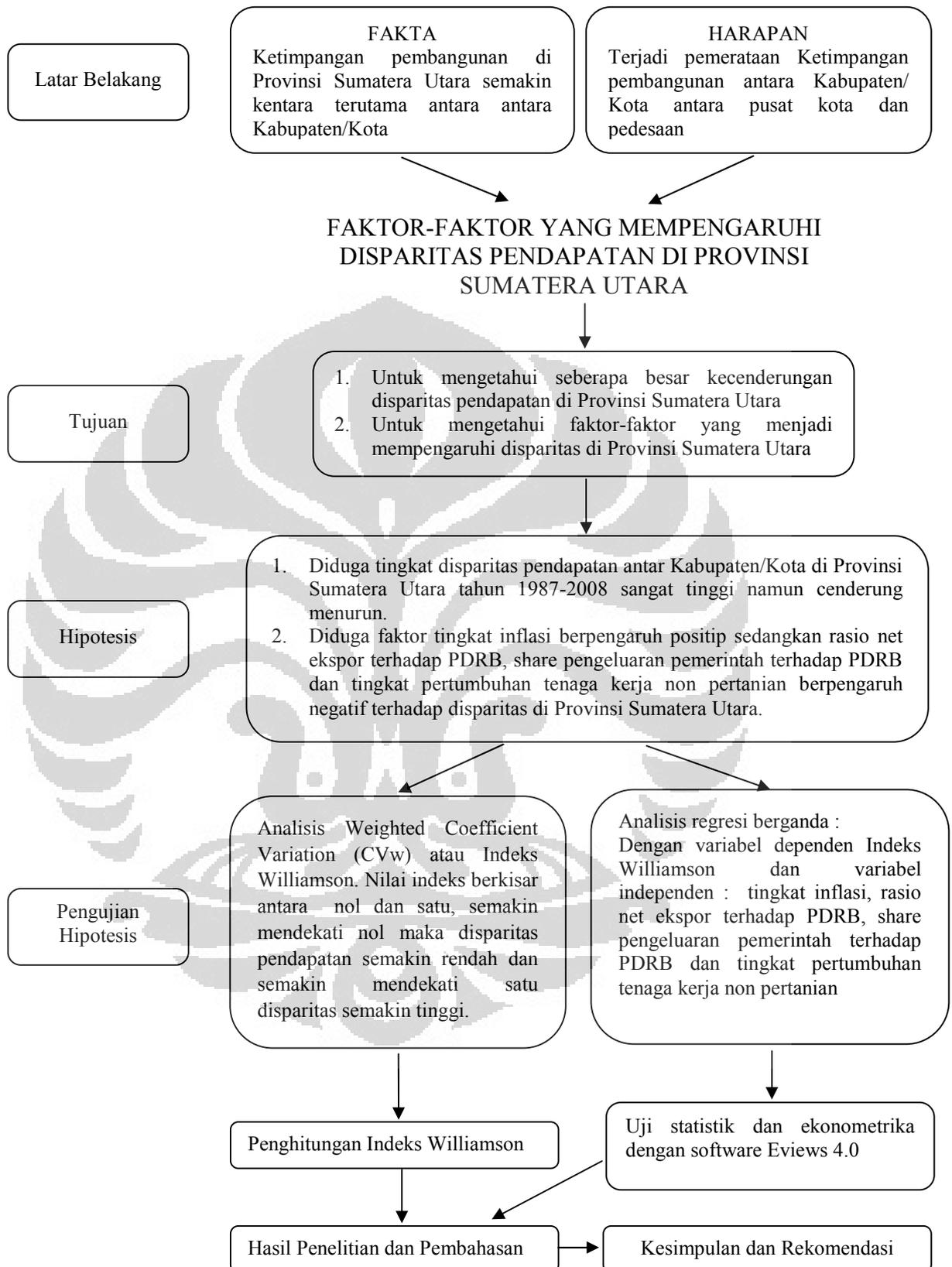
1. Tingkat inflasi, dengan dugaan bahwa inflasi yang tinggi akan melemahkan daya beli masyarakat, sedangkan meningkatnya daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan. Peningkatan daya beli masyarakat jika diiringi dengan tingkat harga yang stabil dan terkendali akan menunjukkan semakin tinggi pengeluaran konsumsi perkapita di daerah tersebut, maka kesejahteraan di daerah tersebut juga makin tinggi dan dapat dikatakan berkurangnya tingkat disparitas.
2. Perdagangan diukur dari net ekspor terhadap PDRB diduga mempunyai hubungan yang kuat antara ekspor dengan pertumbuhan produk domestik regional bruto suatu daerah. Ekspor dapat dikatakan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah sehingga terjadi peningkatan standar kehidupan. Pertumbuhan ekspor akan menyebabkan kenaikan permintaan output negara yang kemudian meningkatkan permintaan output riil, yang kemudian akan meningkatkan tingkat produktivitas serta kemampuan tenaga

kerjanya dan kemudian akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang akhirnya akan menurunkan ketimpangan.

3. Kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap PDRB diduga menggambarkan belanja pembangunan daerah secara kontiniu untuk meningkatkan perekonomian daerah dengan tujuan meningkatkan output riil, yang kemudian akan meningkatkan tingkat produktivitas serta kemampuan tenaga kerjanya dan kemudian akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang akhirnya akan menurunkan ketimpangan..
4. Tingkat pertumbuhan tenaga kerja non pertanian diduga dapat meningkatkan pendapatan perkapita suatu wilayah dimana dengan tingkat upah yang lebih tinggi di sektor non pertanian dibanding sektor pertanian sehingga nantinya akan mengurangi tenaga kerja di sektor pertanian. Peningkatan pendapatan tenaga kerja di sektor non pertanian tersebut pada jangka panjang akan cenderung menggeser orang untuk bekerja di sektor non pertanian dibandingkan bekerja di sektor pertanian unuk mendapatkan tingkat pendapatan yang lebih tinggi yang akhirnya akan menurunkan tingkat disparitas pendapatan.

1.6. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dibatasi pada perhitungan tingkat disparitas pendapatan antar kabupaten/kota dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Provinsi Sumatera Utara dalam jangka waktu 22 (dua puluh dua) tahun mulai dari Tahun 1987 sampai dengan Tahun 2008. Periode pengambilan data tersebut seiring terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998 dan diterapkannya sistem otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia.



Gambar 1.4. Kerangka Pemikiran

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan (development) secara tradisional diartikan sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional - yang kondisi ekonomi awalnya kurang bersifat statis dalam kurun waktu yang lama - untuk menciptakan dan mempertahankan kenaikan pendapatan nasional bruto dan GNI (gross national income) tahunan pada tingkat 5% - 7% atau bahkan lebih tinggi jika hal itu memungkinkan. (Todaro, 2006)

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. (Arsyad, 2002)

Perkembangan pembangunan yang semakin tinggi mendorong pemerintah pusat dan daerah berupaya merencanakan pembangunan semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang optimal dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah. Dalam perencanaan dan pembangunan daerah yang menjadi titik perhatian adalah mengenai konsep dasar daerah dan berbagai studi empiris tentang kegiatan ekonomi ditinjau dari sudut penyebarannya di berbagai daerah.

Menurut Arsyad (2002), tinjauan aspek ekonomi suatu daerah dapat dibagi menjadi 3 definisi, yaitu :

1. Suatu daerah dianggap sebagai suatu ruang dimana kegiatan ekonomi terjadi dan diberbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Kesamaan tersebut tercermin dari pendapatan perkapitanya, sosial budayanya, geografisnya dan sebagainya dan biasanya disebut daerah homogen.
2. Suatu daerah dianggap sebagai suatu "ruang ekonomi" yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi dan biasanya disebut daerah nodal.
3. Suatu daerah adalah suatu "ruang ekonomi" yang berada dibawah satu administrasi tertentu seperti satu propinsi, kabupaten, kecamatan dan

sebagainya dan biasanya dinamakan daerah perencanaan atau daerah administrasi.

Namun yang sering digunakan dalam perencanaan pembangunan ekonomi adalah yang ketiga, karena :

1. dalam melaksanakan kebijaksanaan dan rencana pembangunan daerah diperlukan tindakan-tindakan dari berbagai lembaga pemerintah. Oleh karena itu akan lebih praktis jika suatu negara dipecah menjadi beberapa daerah ekonomi berdasarkan satuan administrasi yang ada.
2. daerah yang batasannya ditentukan secara administratif lebih mudah dianalisis karena biasanya pengumpulan data di berbagai daerah dalam suatu negara pembagiannya didasarkan pada satuan administratif.

Pertumbuhan output suatu daerah biasanya dipakai sebagai indikator dari pertumbuhan kapasitas produksi yang dipengaruhi oleh kemampuan daerah tersebut menarik modal dan tenaga kerja dari daerah lainnya. Pertumbuhan output per pekerja digunakan sebagai indikator perubahan tingkat keunggulan suatu daerah melalui pertumbuhan produktivitas, sedangkan pertumbuhan output per kapita digunakan sebagai indikator perubahan kesejahteraan ekonomi. (Etharina, 2005)

Konsep pusat pertumbuhan dalam perencanaan pembangunan regional dapat dilakukan dengan menetapkan beberapa wilayah pembangunan dengan menentukan sebuah pusat pertumbuhan pada masing-masing daerah seperti yang dilakukan di tingkat nasional maupun provinsi. Aspek kesamaan kondisi sosial ekonomi dan potensi pembangunan yang dimiliki (homogeneous region) dan keterkaitan ekonomi dengan daerah sekitarnya (nodal region) merupakan bagian dalam menentukan wilayah pembangunan.

Sementara itu, aspek pertumbuhan ekonomi akan lebih didorong melalui pemanfaatan keterkaitan antara dinamika kegiatan ekonomi pada pusat pertumbuhan karena adanya keuntungan aglomerasi yang didukung dengan potensi ekonomi wilayah bersangkutan. Sedangkan aspek pemerataan akan dapat pula ditingkatkan karena potensi ekonomi wilayah bersangkutan akan dapat dimanfaatkan secara optimal. Sementara itu, penentuan wilayah dan pusat

pertumbuhan secara lebih tersebar tentunya juga akan mendorong terjadi pemerataan pembangunan antar wilayah. (Sjafrizal, 2008)

Kuznets yang telah berjasa besar dalam memelopori analisis pola-pola pertumbuhan historis di negara-negara maju mengemukakan bahwa pada tahap awal dari proses pembangunan ekonomi, perbedaan dalam laju pertumbuhan regional yang besar antar propinsi mengakibatkan kesenjangan pendapatan antar provinsi tetapi pada jangka panjang pada saat kondisi ekonomi mencapai tingkat kedewasaan (maturity) dengan asumsi mekanisme pasar bebas dimana mobilitas semua faktor produksi antar provinsi berjalan lancar tanpa sedikitpun rintangan atau distorsi, maka perbedaan dalam laju pertumbuhan output antar provinsi cenderung mengecil. Dengan tingkat pendapatan/kapita yang semakin tinggi di setiap provinsi yang akhirnya menghilangkan kesenjangan ekonomi regional. Observasi inilah yang kemudian dikenal secara luas sebagai konsep kurva U – terbalik dari Kuznets. (Todaro, 2006)

2.2. Teori Pertumbuhan

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat menggambarkan proses kemajuan pembangunan suatu negara. Hal ini dikarenakan kemampuannya dalam menggambarkan tercapainya suatu proses peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kapasitas produksi nasional, peningkatan jumlah konsumsi dan yang terpenting adalah peningkatan pendapatan.

Namun pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi hanya menggambarkan nilai secara agregat, bukan secara parsial. Faktanya proses pertumbuhan ekonomi yang terjadi di dunia pada saat ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu dibarengi dengan pembagian porsi pendapatan yang merata diantara pelaku ekonomi.

Di negara sedang berkembang (NSB) yang menjadi perhatian utama adalah masalah pertumbuhan versus distribusi pendapatan. Pada tahun 1960-an sebagian besar NSB yang mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi mulai menyadari bahwa pertumbuhan semacam itu hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan. Di negara Afrika, Asia dan Amerika Latin, tingkat kehidupan nampaknya mengalami stagnasi dan bahkan untuk beberapa negara malah terjadi penurunan tingkat kehidupan riil. Tingkat

pengangguran dan pengangguran semu meningkat di daerah pedesaan dan perkotaan. Distribusi pendapatan antara kaya dan miskin semakin tidak merata. Dengan kata lain, pertumbuhan GNP perkapita yang cepat tidak secara otomatis meningkatkan tingkat hidup rakyat. Apa yang disebut dengan penetesan ke bawah (trickle down effect) dari manfaat pertumbuhan ekonomi bagi orang miskin tidak terjadi. Sekalipun dalam empat dekade terakhir beberapa NSB telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, malahan lebih pesat daripada yang pernah dialami negara-negara Barat selama tahap-tahap awal dari proses industrialisasi mereka, namun pertumbuhan ekonomi yang pesat ini pada umumnya ternyata tidak berhasil menyediakan kesempatan kerja yang produktif bagi penduduk yang tumbuh begitu cepat dan juga kurang berhasil dalam mengurangi laju kemiskinan yang begitu memprihatinkan (Arsyad, 2010)

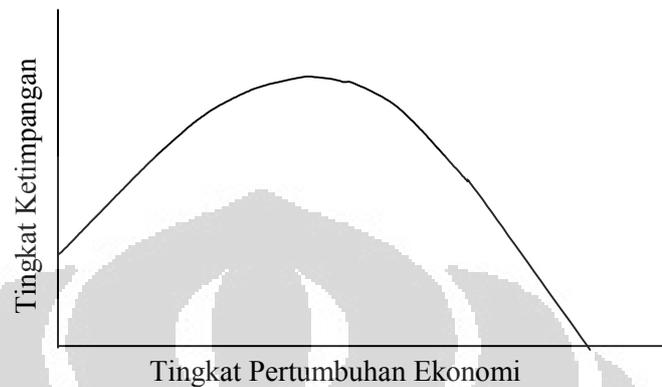
2.2.1. Teori Pertumbuhan Rostow

Menurut Rostow didalam Arsyad (2010), pembangunan ekonomi atau transformasi masyarakat tradisional menjadi suatu masyarakat modern merupakan proses multidimensi. Ia, selanjutnya mengemukakan tahap-tahap dalam proses pembangunan setiap negara yaitu : (1). masyarakat tradisional (the traditional society), (2). prasyarat untuk tinggal landas (the preconditions for take-off), (3). tinggal landas (the take-off), (4). menuju ke dewasaan (the drive to maturity), (5). masa konsumsi tinggi (the age of high mass-consumption). Pembangunan ekonomi bukan berarti perubahan struktur ekonomi suatu negara yang ditunjukkan oleh menurunnya peranan sektor pertanian dan peningkatan peranan sektor industri saja, tetapi juga proses yang menyebabkan : (a) perubahan orientasi organisasi ekonominya, politik, dan sosial yang pada mulanya berorientasi kepada suatu daerah menjadi berorientasi ke luar; (b) perubahan pandangan masyarakat mengenai jumlah anak dalam keluarga; (c) perubahan dalam kegiatan investasi masyarakat, dari melakukan investasi yang tidak produktif menjadi investasi yang produktif; (d) perubahan sikap hidup dan adat istiadat yang terjadi kurang merangsang pembangunan ekonomi.

2.2.2. Teori Pertumbuhan Kuznet

Kuznet mendefenisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kemampuan jangka

panjang untuk menyediakan berbagai jenis barang ekonomi yang terus menerus meningkat kepada masyarakat. Kemampuan ini tumbuh atas dasar kemajuan teknologi, institusional dan ideologis yang diperlukannya. Hipotesis Kuznets dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini :



Gambar 2.1. Kurve “ U “ Terbalik

2.2.3. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Harrod-Domar mempunyai beberapa asumsi yaitu: (1) perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (full employment) dan barang-barang modal; (2) terdiri dari 2 sektor yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan; (3) besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional; (4) kecenderungan untuk menabung besarnya tetap, demikian juga ratio antara modal-output dan rasio pertambahan modal-output. Harrod Domar berpendapat bahwa perlunya penanaman modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, setiap usaha ekonomi harus menyelamatkan proporsi tertentu dari pendapatan nasional untuk menambah stok modal yang akan digunakan dalam investasi baru. (Arsyad, 2010)

2.3. Teori Lokasi

Teori lokasi merupakan konsep ilmu dengan cakupan analisa yang cukup luas meliputi beberapa sektor kegiatan. Cakupan utama analisa adalah menyangkut dengan analisa kegiatan ekonomi, terutama kegiatan industri pengolahan (manufaktur) dan jasa. Faktor lokasi dalam hal ini mencakup ongkos angkut baik untuk bahan baku maupun hasil produksi, perbedaan upah buruh, keuntungan aglomerasi, konsentrasi permintaan dan persaingan antar tempat.

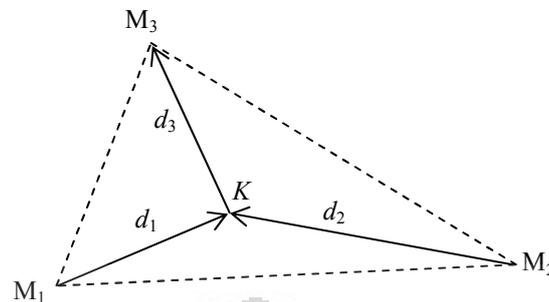
Disamping itu, pembahasan juga mencakup kegiatan sektor pertanian dengan faktor lokasi utama yang dibahas adalah sewa tanah. (Sjahrizal. 2008)

Secara umum teori lokasi dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian besar, yaitu (Sjahrizal, 2008) :

1. kelompok teori lokasi berdasarkan analisa pemilihan lokasi kegiatan ekonomi pada kemampuan membayar harga tanah (bid-rent) yang berbeda dengan harga pasar tanah (land-rent). Dipelopori oleh Von Thunen (1854), berdasarkan struktur ruang yang sederhana, untuk pemilihan dan analisa lokasi kegiatan pertanian. Faktor utama yang menentukan pemilihan lokasi atau penggunaan tanah (land-use) adalah tinggi rendahnya sewa tanah (land-rent). Biasanya sewa tanah ini akan semakin tinggi bila mendekati pusat kota dan akan semakin rendah bila jauh dari pusat kota. Sedangkan pemilihan lokasi akan ditentukan oleh kemampuan membayar sewa tanah (bid-rent) yang dapat dihasilkan dari penggunaan tanah yang bersangkutan. Bid-rent tersebut ditentukan oleh besarnya hasil produksi yang diperoleh serta biaya-biaya yang dikeluarkan baik untuk kegiatan produksi maupun ongkos angkut hasil produksi ke pasar.
2. kelompok teori lokasi berdasarkan analisa pemilihan lokasi kegiatan ekonomi pada prinsip biaya minimum (least cost). Lokasi yang terbaik (optimal) adalah pada tempat dimana biaya produksi dan ongkos angkut adalah yang paling kecil, apabila dapat dicapai maka tingkat keuntungan perusahaan akan menjadi maksimum. Dipelopori oleh Alfred Weber (1929), untuk kegiatan industri pengolahan (manufacturing). Weber mencoba memberikan analisa pemilihan lokasi yang paling ekonomis (optimal) yang dapat memberikan ongkos angkut yang minimum.

Faktor utama yang mempengaruhi lokasi industri adalah biaya transportasi, dengan asumsi wilayah yang ditinjau bersifat homogen secara fisik, budaya, politik dan teknologi; sumber bahan baku dan pasar/konsumen diketahui; tenaga kerja tersedia; satu jenis komoditas/produk; biaya transportasi merupakan fungsi dari jarak dan berat. Prinsip teori ini adalah penentuan lokasi industri ditempatkan di tempat-tempat yang resiko biaya atau biayanya paling murah atau minimal (*least cost location*).

Weber menyusun sebuah model yang dikenal dengan istilah segitiga lokasional (*locational triangle*),



Gambar 2.2. Segitiga Lokasi Produksi Weber

Keterangan :

- M_1, M_2 : lokasi produksi dari input barang 1 dan 2
 M_3 : lokasi pasar untuk output barang 3
 d_1, d_2, d_3 : jarak
 K : lokasi perusahaan

Lokasi optimal dari suatu perusahaan industri umumnya terletak di dekat pasar atau sumber bahan baku dengan alasan jika suatu perusahaan industri memilih lokasi pada salah satu dari kedua tempat tersebut, maka ongkos angkut untuk bahan baku dan hasil produksi akan dapat diminimumkan dan keuntungan aglomerasi yang ditimbulkan dari adanya konsentrasi perusahaan pada suatu lokasi akan dapat pula dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Input faktor produksi tenaga kerja dan modal yang tersedia secara bebas di mana-mana dengan faktor harga dan kualitas yang tidak berubah dengan lokasi dan lahan yang homogen. Dengan kata lain, harga dan kualitas tenaga kerja diasumsikan sama di mana-mana, karena biaya dan kualitas modal dan kualitasnya dan harga sewa tanah. (McCann, 2001).

- kelompok teori lokasi berdasarkan analisa pemilihan lokasi kegiatan ekonomi pada prinsip luas pasar (market area) terbesar yang dapat dikuasai perusahaan. Luas pasar tersebut adalah mulai dari lokasi pabrik sampai ke lokasi konsumen yang membeli produk perusahaan yang bersangkutan. Bila pasar yang dikuasai yang terbesar, maka tingkat keuntungan analisa pemilihan lokasi optimal pada luas pasar yang dapat dikuasai dan kompetisi antar

tempat. Berdasarkan pandangan ini, sebuah perusahaan akan memilih tempat sebagai lokasi yang optimal berdasarkan kekuatan persaingan antar tempat dan luas pasar yang dapat dikuasainya.

Asumsi dasar dari teori ini yaitu: Pertama, konsumen tersebar secara relatif merata antar tempat, artinya teori ini cocok diberlakukan di daerah perkotaan dimana konsentrasi penduduk dan industri relatif merata dibandingkan dengan daerah pedesaan. Kedua, produk homogen sehingga persaingan akan sangat ditentukan oleh harga dan ongkos angkut. Ketiga, ongkos angkut per satuan jarak (ton/km) adalah sama.

2.4. Pusat Pertumbuhan

Pertumbuhan (growth) dan pemerataan (equality) merupakan dua unsur penting dalam proses pembangunan, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Namun kenyataannya kedua aspek ini seringkali terjadi “trade-off” antara satu dengan lainnya, yaitu bilamana pertumbuhan diutamakan maka hal ini cenderung akan mengurangi aspek pemerataan dan sebaliknya. Sementara itu, proses pembangunan memerlukan kedua unsur pertumbuhan dan pemerataan tersebut secara bersamaan. (Sjahrizal, 2008)

Pusat pertumbuhan, mempunyai empat karakteristik utama yaitu (a) adanya sekelompok kegiatan ekonomi terkonsentrasi pada suatu lokasi tertentu, (b) konsentrasi kegiatan ekonomi tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang dinamis dalam perekonomian, (c) terdapat keterkaitan input dan output yang kuat antara sesama kegiatan ekonomi pada pusat tersebut, (d) dalam kelompok kegiatan ekonomi tersebut terdapat sebuah industri induk yang mendorong pengembangan kegiatan ekonomi pada pusat tersebut.

Konsentrasi sekaligus desentralisasi merupakan dua unsur dari konsep pusat pertumbuhan. Unsur konsentrasi diperlukan agar proses pembangunan tersebut dapat terus dilakukan secara efisien konsentrasi dapat menimbulkan keuntungan aglomerasi. Dengan adanya keuntungan tersebut maka kegiatan pembangunan akan tetap dilakukan dengan biaya yang lebih rendah sesuai dengan kondisi wilayah setempat. Sedangkan unsur desentralisasi diperlukan untuk dapat

menyebarkan kegiatan ekonomi ke seluruh wilayah sehingga aspek pemerataan dapat pula dikembangkan.

Penerapan konsep pusat pertumbuhan dalam perencanaan pembangunan regional dapat dilakukan dengan menetapkan beberapa wilayah pembangunan dimana pada masing-masingnya ditentukan pada suatu pusat pertumbuhan, baik tingkat nasional maupun Provinsi. Wilayah pembangunan biasanya ditentukan dengan memperhatikan aspek kesamaan kondisi sosial ekonomi dan potensi pembangunan yang dimiliki (homogeneous region) dan keterkaitan ekonomi dengan daerah sekitarnya (nodal region). Sedangkan pusat pertumbuhan ditempatkan pada kota atau pusat kegiatan ekonomi yang terdapat pada wilayah bersangkutan. Dengan cara demikian aspek ekonomi akan dapat lebih didorong melalui pemanfaatan keterkaitan antara dinamika kegiatan ekonomi pada pusat pertumbuhan karena adanya keuntungan aglomerasi yang didukung dengan potensi ekonomi wilayah bersangkutan. Sedangkan aspek pemerataan akan dapat pula ditingkatkan karena potensi ekonomi wilayah bersangkutan akan dapat dimanfaatkan secara optimal. Sementara itu, penentuan wilayah dan pusat pertumbuhan secara lebih tersebar tentunya juga akan mendorong terjadinya pemerataan pembangunan antar wilayah.

2.5. Disparitas Pendapatan Antar Daerah

Thee Kian Wie, (1981) menyatakan bahwa ketidakmerataan distribusi pendapatan dari sudut pandangan ekonomi dibagi menjadi :

1. Ketimpangan pembagian pendapatan antar golongan penerima pendapatan (size distribution oncome);
2. Ketimpangan pembagian pendapatan antar daerah perkotaan dan daerah pedesaan (urban-rural income disparities);
3. Ketimpangan pembagian pendapatan antar daerah (regional income disparities);

Pada awal proses pembangunan, ketimpangan dalam distribusi pendapatan akan naik sebagai akibat dari proses urbanisasi dan industrialisasi. Pada akhir proses pembangunan ketimpangan menurun, yakni saat sektor industri di perkotaan sudah dapat menyerap sebagian besar dari tenaga kerja yang datang

dari pedesaan (sektor pertanian) atau pada saat pangsa pertanian lebih kecil di dalam produksi dan penciptaan pendapatan. (Tambunan, 2001)

Menurut Gittelman dan Joyce dalam Arief dan Yundy (2010), pendapatan yang terbesar diperoleh individu atau keluarga adalah pendapatan yang diperoleh dari pasar kerja. Pendapatan yang diperoleh dari pasar kerja antar satu individu dengan individu lain akan berbeda-beda. Besarnya tingkat pendapatan ini dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja tersebut.

Hubungan antara kesenjangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan dengan Kuznets Hypothesis. Hipotesis tersebut berawal dari pertumbuhan ekonomi (berasal dari tingkat pendapatan yang rendah berasosiasi dalam suatu masyarakat agraris pada tingkat awal) yang pada mulanya menaik pada tingkat kesenjangan pendapatan rendah hingga sampai pada suatu tingkat pertumbuhan tertentu selanjutnya menurun. Indikasi yang diberikan oleh Kuznets di atas didasarkan pada riset dengan menggunakan data time series terhadap indikator kesenjangan negara Inggris, Jerman dan Amerika Serikat.

Hipotesis Kuznet bahwa dalam jangka pendek ada korelasi positif antara pertumbuhan pendapatan perkapita dengan ketimpangan pendapatan. Namun dalam jangka panjang hubungan keduanya menjadi korelasi yang negatif berarti dalam jangka pendek meningkatnya pendapatan akan diikuti dengan meningkatnya ketimpangan pendapatan, namun dalam jangka panjang peningkatan pendapatan akan diikuti dengan penurunan ketimpangan pendapatan. (Arief dan Yundy, 2010)

Pemikiran tentang mekanisme yang terjadi pada fenomena Kuznets bermula dari transfer yang berasal dari sektor tenaga kerja dengan produktivitas rendah (dan tingkat kesenjangan pendapatannya rendah), ke sektor-sektor yang mempunyai produktivitas tinggi (dan tingkat kesenjangan menengah). Dengan adanya kesenjangan antar sektor maka secara substansial akan menaikkan kesenjangan diantara tenaga kerja yang bekerja pada masing-masing sektor. (Joko Waluyo, 2004).

Sementara itu, alokasi anggaran pembangunan sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan ekonomi tampaknya lebih perlu diperhatikan. Strategi alokasi anggaran tersebut harus mendorong dan mempercepat pertumbuhan

ekonomi nasional sekaligus menjadi alat untuk mengurangi kesenjangan/ketimpangan regional (Majidi, 1997).

Bertitik tolak dari kenyataan tersebut, kesenjangan atau ketimpangan antar daerah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri. Perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (backwash effects) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (spread effects) terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini mengakibatkan proses ketidakseimbangan. Pelaku-pelaku yang mempunyai kekuatan di pasar secara normal akan cenderung meningkat bukannya menurun, sehingga akan mengakibatkan peningkatan ketimpangan antar daerah. Tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus dan mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Todaro, 2006).

Pembangunan dalam lingkup negara secara spasial tidak selalu merata. Kesenjangan antar daerah seringkali menjadi permasalahan yang serius. Beberapa daerah dapat mencapai pertumbuhan yang signifikan, sementara beberapa daerah lainnya mengalami pertumbuhan yang lambat. Daerah-daerah yang tidak mengalami kemajuan yang sama disebabkan karena kurangnya sumber-sumber yang dimiliki; adanya kecenderungan pemilik modal (investor) memilih daerah perkotaan atau daerah yang memiliki fasilitas seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi juga tenaga terampil. Disamping itu juga adanya ketimpangan redistribusi pembagian pendapatan dari Pemerintah Pusat atau Propinsi kepada daerah seperti propinsi atau kecamatan (Kuncoro, 2004)

Menurut Sjahrizal (2008), ada beberapa faktor penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan wilayah dan akan memberikan informasi penting untuk pengambilan keputusan dalam melakukan perumusan kebijakan untuk menanggulangi atau mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah tersebut, diantaranya adalah :

1. Perbedaan Kandungan Sumber Daya Alam

Daerah dengan kandungan sumber daya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif lebih murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih rendah. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat. Sedangkan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih kecil hanya akan dapat memproduksi barang-barang dengan biaya produksi lebih tinggi sehingga daya saingnya menjadi lemah. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih lambat.

2. Perbedaan Kondisi Demografis

Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan.

Jumlah populasi yang besar dengan pendidikan yang baik, kesehatan yang baik serta etos kerja yang tinggi didukung dengan berbagai fasilitasnya yang ada menjadikan perekonomian Jawa lebih dinamis sehingga lebih maju dan luar Jawa. (Tambunan, 2001)

3. Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa

Ketimpangan ekonomi regional dapat juga disebabkan karena kurang lancarnya mobilitas faktor produksi antar daerah terutama antar pulau. Keadaan ini akan menyebabkan semakin berkumpulnya faktor produksi terutama tenaga kerja ke daerah yang memiliki selisih upah tinggi, mengikuti pola Todaro migration model, bukan mengikuti model unlimited supply of labour dari Lewis (Todaro, 2006).

Migrasi yang kurang lancar menyebabkan kelebihan tenaga kerja suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang sangat membutuhkannya. Akibatnya ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi karena kelebihan suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkan, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya.

4. Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah

Konsentrasi kegiatan ekonomi di daerah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah. Pembangunan ekonomi dan daerah dengan tingkat konsentrasi kegiatan ekonomi tinggi cenderung tumbuh pesat bila dibandingkan dengan daerah yang memiliki tingkat konsentrasi ekonomi yang rendah. Begitu pula konsentrasi penduduk di dalam dan di sekitar kota-kota besar biasanya diikuti dengan adanya ketimpangan pendapatan antar daerah (Akita dan Lukman, 1995). Sementara itu menurut Tambunan (2001), konsentrasi kegiatan ekonomi terutama industri manufaktur di daerah tertentu menyebabkan terjadinya disparitas. Daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi tinggi atau dengan kata lain mengalami industrialisasi akan tumbuh pesat.

5. Alokasi Dana Pembangunan Antar Daerah

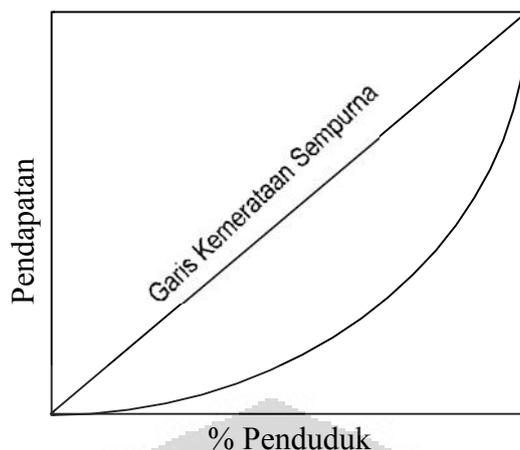
Daerah yang dapat alokasi investasi yang lebih besar dari pemerintah, atau dapat menarik lebih banyak investasi swasta akan cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih cepat. Kondisi ini tentunya akan dapat pula mendorong proses pembangunan daerah melalui penyediaan lapangan kerja yang lebih banyak dan tingkat pendapatan perkapita lebih tinggi. Demikian sebaliknya terjadi bilamana investasi pemerintah dan swasta yang masuk ke suatu daerah ternyata lebih rendah.

2.6. Pengukuran Disparitas

Pengukuran ketimpangan wilayah (disparitas regional) dapat dilakukan dengan beberapa metode pengukuran ketimpangan, diantaranya adalah :

2.6.1. Kurva Lorenz

Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif aktual antara persentase jumlah penduduk penerima pendapatan tertentu dari total penduduk dengan persentase pendapatan yang benar-benar mereka peroleh dari total pendapatan selama waktu tertentu. (Todaro, 2006)



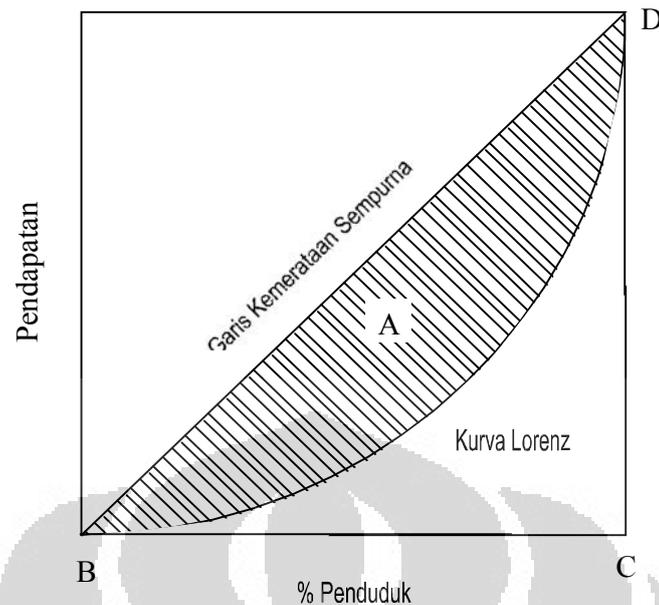
Gambar 2.3. Kurva Lorenz

Semakin jauh kurva Lorenz tersebut dari garis diagonal (kemerataan sempurna), semakin tinggi derajat ketidakmerataan yang ditunjukkan. Keadaan yang paling ekstrim dari ketidakmerataan sempurna, misalnya keadaan dimana seluruh pendapatan hanya diterima oleh satu orang, akan ditunjukkan oleh berhimpitnya kurva Lorenz tersebut dengan sumbu horizontal bagian bawah dan sumbu vertikal sebelah kanan.

2.6.2. Koefisien Gini

Suatu ukuran yang singkat mengenai derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam suatu negara biasa diperoleh dengan menghitung luas daerah antara garis diagonal (kemerataan sempurna) dengan kurva Lorenz dibandingkan dengan luas total dari separuh bujur sangkar dimana terdapat kurva Lorenz tersebut.

Koefisien Gini adalah ukuran ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Pada hakekatnya, koefisien Gini untuk negara-negara yang derajat ketimpangannya tinggi berkisar antara 0.5 hingga 0.7, sedangkan untuk negara-negara yang distribusi pendapatannya relatif merata, angkanya berkisar antara 0.2 hingga 0.5. (Todaro, 2006)



Gambar 2.4. Kurva Koefisien Gini

2.6.3. Indeks Williamson

Ukuran ketimpangan pembangunan antar wilayah yang mula-mula ditemukan adalah Williamson Index yang digunakan dalam studinya pada tahun 1966. Secara ilmu statistik, indeks ini sebenarnya adalah coefficient of variation yang lazim digunakan untuk mengukur suatu perbedaan. (Arief dan Yundy, 2010)

Williamson meneliti hubungan antar disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi, dengan menggunakan data ekonomi yang sudah maju dan ekonomi yang sedang berkembang, menemukan selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lebih matang dari pertumbuhan ekonomi tampak adanya keseimbangan antar daerah dan disparitas berkurang dengan signifikan. Walaupun indeks ini mempunyai beberapa kelemahan, yaitu antara lain sensitif terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan, namun demikian indeks ini sering digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah. (Sjafrizal, 2008)

Indeks Williamson merupakan alat analisa yang digunakan untuk mengukur ketimpangan antar daerah. Indeks ini digunakan untuk mengukur koefisien variasi tertimbang suatu daerah dan disparitas pendapatan dalam proses pembangunan. Indeks Williamson juga mengukur penyebaran tingkat pendapatan

perkapita antara wilayah relatif terhadap rata-rata pusat dimana tiap deviasi wilayah dibobot sumbangannya dengan penduduk daerah secara keseluruhan.

Hasil dari penelitian Jeffrey Williamson menunjukkan bahwa :

1. Disparitas pendapatan antar daerah akan berkurang dengan meningkatnya perekonomian nasional.
2. Disparitas antar daerah di negara yang sedang berkembang lebih tinggi dari disparitas antar daerah di negara maju.

Beberapa hal yang mempengaruhi hasil tersebut :

1. Migrasi tenaga kerja, di negara yang sedang berkembang, tenaga kerja yang berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain biasanya selektif, dalam arti tenaga kerja pada usia produktif dan pada umumnya yang pendidikannya relatif tinggi. Sehingga akibatnya, di daerah yang miskin ditinggalkan oleh penduduk yang relatif produktif, sehingga perbedaan antar daerah maju dan terbelakang semakin besar. Hal tersebut tidak terjadi di negara maju, antara lain karena fasilitas yang tersedia di setiap daerah relatif lebih homogen, sehingga penduduk yang pindah bukan hanya yang lebih produktif saja, tetapi juga orang yang kalah bersaing.
2. Migrasi capital, di negara maju biasanya kapital lari ke daerah yang relatif miskin, karena tingkat pengembaliannya (rate of return of capital) lebih tinggi di daerah yang miskin. Hal ini tidak terjadi di negara yang sedang berkembang mengingat keterbatasan sarana yang ada, sehingga akibatnya investasi yang dilakukan di daerah yang miskin akan menjadi lebih mahal dibandingkan jika dilakukan di daerah yang relatif sudah maju.
3. Keterkaitan antar daerah, di negara maju keterkaitan antar daerah sangat tinggi, sehingga arus informasi tidak menjadi masalah utama. Di negara yang sedang berkembang, infrastruktur belum berkembang dengan baik, sehingga arus informasi tidak berjalan dengan lancar, yang pada gilirannya menyebabkan keterkaitan antar daerah tidak terlalu erat.
4. Kebijakan pemerintah pusat, di negara yang maju, karena tingkat pendapatan perkapita telah tinggi, maka yang lebih dipentingkan oleh pemerintah pusatnya adalah masalah pemerataan. Sedangkan di negara yang sedang berkembang, karena pendapatan perkapitanya masih rendah,

pemerintah masih memprioritaskan pertumbuhan. Walaupun di negara yang sedang berkembang tujuan pertumbuhan lebih diutamakan, namun masalah distribusi pendapatan ini tidak boleh ditinggalkan. Adanya ketimpangan antar daerah dapat menimbulkan berbagai masalah, antara lain kecemburuan antar daerah dan berbagai masalah kependudukan (migrasi/urbanisasi/under employment, dan sebagainya), yang pada gilirannya akan sangat berpengaruh pada kestabilan nasional. (Susanti, Ikhsan dan Widyanti, 1995)

Kelebihan Indeks Williamson adalah mudah dan praktis dalam melihat disparitas. Sedangkan kelemahannya adalah Indeks Williamson bersifat agregat sehingga tidak diketahui daerah mana saja yang memberikan kontribusi terhadap disparitas. (Achjar, 2004)

Indeks Williamson (IW), dengan besaran nilai antara 0 sampai dengan 1. Semakin besar IW maka semakin besar kesenjangan, sebaliknya jika IW semakin kecil (mendekati 0) maka semakin merata. Nilai $IW < 0,3$ berarti disparitas pendapatan yang terjadi tergolong rendah, IW antara 0,3 – 0,5 termasuk kategori sedang, kemudian dikatakan tinggi jika $IW > 0,5$. (Kuncoro, 2004).

2.6.4. Indeks Theils

Indeks Theil juga lazim digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah. Data yang diperlukan untuk mengukur indeks ini adalah sama dengan yang diperlukan untuk menghitung Williamson Index yaitu PDRB perkapita untuk setiap wilayah dan jumlah penduduk. Demikian pula halnya dengan penafsirannya yang juga sama yaitu bila indeks mendekati 1 artinya sangat timpang dan sebaliknya bila indeks mendekati 0 yang berarti sangat merata.

Penggunaan Theil Index sebagai ukuran ketimpangan mempunyai kelebihan tertentu. Pertama, dapat menghitung ketimpangan dalam daerah dan antar daerah secara sekaligus, sehingga cakupan analisa menjadi lebih luas. Dalam kasus Indonesia, menggunakan metode ini dapat dihitung ketimpangan dalam provinsi dan Kabupaten/Kota serta antar Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kedua, dapat menghitung kontribusi (dalam persentase) masing-masing daerah terhadap ketimpangan pembangunan wilayah secara keseluruhan sehingga dapat memberikan implikasi kebijakan yang cukup penting. (Sjafrizal, 2008)

2.7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Disparitas di Provinsi Sumatera Utara

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini terjadi disebabkan adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. (Sjafrizal, 2008).

Dalam Xu dan Zou (2000), melakukan penelitian ketimpangan pendapatan provinsi di China dengan karakteristik daerah pesisir, pantai tengah dan pantai barat. Diperoleh hasil adanya tidakmerataan antara wilayah dalam pesisir, wilayah tengah dan barat dan terdapat juga kesenjangan dalam daerah dan kesenjangan antar daerah.

Beberapa faktor yang mempengaruhi ketimpangan di Provinsi China tersebut diantaranya adalah inflasi, pertumbuhan ekonomi, perdagangan, pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja non pertanian.

Dengan adanya kesamaan karakteristik yang hampir sama dengan Provinsi Sumatera Utara dan adanya data yang mencukupi dalam penelitian ini maka diupayakan dengan melakukan penelitian dengan variabel faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi disparitas di Provinsi Sumatera Utara.

2.7.1. Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. (BPS, 2009). Sedangkan menurut Mankiw (2007) menyatakan inflasi adalah kenaikan dalam keseluruhan tingkat harga. Inflasi menjadi salah satu fenomena moneter yang menjadi perhatian utama para ekonomi dan pembuat kebijakan.

Inflasi regional diukur oleh tingkat pertumbuhan dari deflator PDRB. Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang mempunyai dampak yang luas terhadap makroekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi. Boediono (1982) menggolongkan inflasi berdasarkan lajunya per tahun menjadi empat bagian yaitu (1) inflasi ringan (dibawah 10% setahun), (2) inflasi sedang (10%-30% setahun), (3) inflasi berat (30%-100% setahun) dan (4) hiperinflasi (lebih 100% setahun).

Inflasi dapat menimbulkan beberapa akibat buruk kepada individu, masyarakat dan kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Salah satu akibat dari inflasi adalah menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pekerja yang memiliki tingkat upah tetap akan menurun tara hidupnya jika terjadi inflasi. Jika tidak diturunkan, inflasi akan memperburuk pembangunan jangka panjang. Inflasi cenderung mengurangi konsumsi, mengurangi produktivitas, mengurangi ekspor dan meningkatkan impor. Sehingga akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penurunan inflasi merupakan tujuan utama bagi pemerintah, terutama jika negara tersebut mengalami *hyperinflations*.

Inflasi ditengarai memiliki efek negatif bagi perekonomian. Setyowati, *et al.* (2000) menyatakan dampak inflasi antara lain (1) inflasi dapat mendorong penanaman modal spekulatif yang tidak berdampak terhadap pendapatan nasional, (2) inflasi menyebabkan tingkat bunga yang meningkat dan akan mengurangi tingkat investasi, (3) inflasi menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi di masa yang akan datang, (4) inflasi menimbulkan masalah dalam neraca perdagangan, (5) inflasi memperburuk distribusi pendapatan, (6) inflasi menyebabkan pendapatan riil merosot. Secara umum rumah tangga dan perusahaan akan memiliki kinerja yang buruk ketika terjadi inflasi tinggi dan tidak dapat diprediksikan (hiperinflasi).

Laju inflasi menunjukkan stabilitas harga yang merupakan ukuran keberhasilan ekonomi makro suatu negara. Inflasi yang tinggi biasanya ditengarai memiliki efek negatif bagi perekonomian sebab inflasi yang tinggi akan mengganggu mobilisasi dana domestik dan tingkat investasi. Prospek pembangunan ekonomi jangka panjang akan memburuk jika terjadi inflasi yang tinggi yang tidak dikendalikan, sebab akan mengurangi investasi produktif, mengurangi ekspor dan menaikkan impor barang sehingga akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Secara umum rumah tangga dan perusahaan akan memiliki kinerja yang buruk ketika terjadi inflasi tinggi (hiperinflasi) dan tidak dapat diprediksikan.

Sukirno (2004) menggolongkan inflasi atas dasar sebab terjadinya menjadi dua macam, yaitu inflasi tarikan permintaan (*demand pull inflation*) dan inflasi desakan biaya (*cost push inflation*). *Demand pull inflation* yaitu inflasi yang

timbul karena adanya permintaan masyarakat (demand side) akan berbagai barang terlalu kuat dimana permintaan masyarakat ini tidak bisa diimbangi dengan tersedianya barang yang disediakan oleh perekonomian, sehingga akan mengakibatkan perpindahan kurva permintaan agregat (agregat demand=AD) naik dan mendorong kenaikan harga-harga. Perusahaan-perusahaan akan beroperasi pada kapasitas yang maksimal sehingga berdampak positif dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Sebaliknya cost push inflation adalah inflasi yang timbul karena adanya kenaikan biaya produksi (suplay side). Pertambahan biaya produksi akan mendorong perusahaan-perusahaan untuk menaikkan harga atas barang yang diproduksi walaupun mereka menghadapi ancaman resiko pengurangan permintaan atas barang-barang yang diproduksi tersebut. Tindakan ini akan mengakibatkan perpindahan kurva penawaran agregat (agregat suplai=AS) ke atas sehingga mengakibatkan harga-harga naik tetapi outputnya justru menurun dan berdampak negatif.

Menurut Sukirno (2004), kenaikan harga-harga yang tinggi dan terus-menerus bukan saja menimbulkan efek buruk terhadap kegiatan ekonomi saja, tetapi juga terhadap kemakmuran individu dan masyarakat dengan efek-efek sebagai berikut :

- inflasi akan menurunkan pendapatan riil orang-orang yang berpendapatan tetap. Pada umumnya kenaikan upah tidaklah secepat kenaikan harga-harga. Maka inflasi akan menurunkan upah riil individu-individu yang berpenghasilan tetap.
- inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Sebagian kekayaan masyarakat disimpan dalam bentuk uang, simpanan di bank dimana nilai riilnya akan menurun jika inflasi berlaku.
- memperburuk pembagian kekayaan. Penerima pendapatan tetap akan menghadapi kemerosotan nilai riil pendapatannya dan pemilik kekayaan bersifat keuangan mengalami penurunan dalam nilai riil kekayaannya. Akan tetapi pemilik harta-harta tetap seperti tanah, bangunan dan rumah akan dapat mempertahankan atau menambah nilai riil kekayaannya. Juga sebagian penjual/pedagang dapat mempertahankan nilai riil pendapatannya. Dengan

demikian inflasi menyebabkan pembagian pendapatan di antara golongan berpendapatan tetap dengan pemilik-pemilik harta tetap dan penjual/pedagang akan menjadi semakin tidak merata.

Menurut Xu and Zou (2000), pengaruh inflasi lebih banyak terhadap orang miskin daripada terhadap orang kaya. Dalam realita, asset-aset yang dimiliki orang kaya seperti saham, ekuitas, kepemilikan lahan, rumah pribadi dan perusahaan. Sementara di kalangan miskin perkotaan biasanya bekerja di sektor pemerintah yang sangat tergantung pada gaji dan pendapatan dari pensiun yang biasanya jumlahnya tetap dan berpengaruh sangat lambat terhadap terhadap tingkat inflasi. Kita bisa menyimpulkan bahwa inflasi bisa meningkatkan kesenjangan pendapatan dan mengurangi distribusi pendapatan terhadap kalangan miskin.

Tingkat inflasi juga memiliki dampak positif yang signifikan terhadap melebarnya kesenjangan pendapatan kota-desa melalui efeknya pada kaum miskin. Pada kenyataannya, aset dari penduduk perkotaan yang lebih beragam (saham, ekuitas, kepemilikan tanah, perumahan swasta, dan usaha bisnis), sedangkan petani miskin tergantung terutama pada produk pertanian. Penurunan indeks harga konsumen mengurangi pendapatan petani dan dengan demikian meningkatkan kesenjangan pendapatan perkotaan-pedesaan. (Furong, 2007)

2.7.2. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah barang dan jasa yang dibeli pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pengeluaran pemerintah pada penelitian ini diukur dari total belanja rutin dan belanja pembangunan dari pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara. Variabel ini digunakan untuk mengukur pengeluaran pemerintah yang tidak memperbaiki produktivitas perekonomian. Semakin besar pengeluaran pemerintah daerah yang tidak produktif, semakin kecil tingkat pertumbuhan perekonomian daerah.

Pengeluaran pemerintah daerah yang tidak efisien tidak akan memperbaiki produktivitas perekonomian daerah. Semakin besar pengeluaran pemerintah yang tidak produktif, maka semakin besar tingkat pertumbuhan ekonomi yang akan berkurang. (Wibisono, 2003).

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu kebijakan fiskal selain pajak yang kedua-duanya dapat bersifat ekspansif atau kontraktif. Perubahan kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah mempengaruhi level output melalui perubahan kurva IS melalui peningkatan permintaan agregat. Dikatakan ekspansif apabila membuat kurva IS bergeser ke kanan sehingga akan meningkatkan output perekonomian, antara lain melalui peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak. Tetapi pada umumnya pengeluaran pemerintah membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah daerah melakukan kebijakan fiskal melalui pengeluaran pemerintah untuk mendorong proses pembangunan daerah dengan meningkatkan belanja anggaran pembangunan belanja daerah (APBD) yang dialokasikan untuk belanja publik dan belanja modal. Pada saat ini belanja pegawai makin lama makin besar dan merupakan konsumsi yang berarti dampaknya terhadap pembangunan jauh lebih kecil dari investasi. Belanja untuk publik juga sebagian merupakan konsumsi karena digunakan untuk kegiatan rutin. Dengan adanya belanja publik dan belanja modal berarti pemerintah daerah telah berusaha untuk meningkatkan investasi yang selanjutnya akan memberikan dampak yang lebih besar bagi peningkatan proses pembangunan pada daerah.

Disamping itu kebijakan fiskal wilayah dapat dilakukan dengan menggunakan dana alokasi khusus yang mempunyai peranan melalui kebijakan nasional untuk kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan, pembangunan prasarana jalan yang tidak mampu dibiayai oleh APBD. Dana alokasi khusus ini juga diprioritaskan untuk peningkatan proses pembangunan pada daerah yang sedang berkembang dalam rangka mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Anggaran belanja pemerintah selalu disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada suatu masa tertentu. Apabila tingkat ekonomi rendah dan banyak pengangguran, pemerintah akan melakukan belanja yang melebihi pendapatannya dan biasanya dinamakan anggaran belanja defisit. Akan tetapi apabila kegiatan ekonomi tinggi dimana kesempatan kerja penuh sudah tercapai dan kenaikan harga-harga berlaku, pemerintah akan menghemat anggaran belanja sehingga memperoleh tabungan dari pendapatannya dan biasanya dinamakan belanja

surplus. Kebijakan fiskal lebih bertujuan untuk menyeimbangkan pendapatan masyarakatnya, sehingga perbedaan antara masyarakat yang sangat kaya dengan yang sangat miskin tidak begitu nyata. Tujuan ini dicapai dengan menggunakan alat-alat kebijakan fiskal dengan melakukan belanja yang bersifat membantu golongan masyarakat yang miskin. (Sukirno, 2002)

2.7.3. Perdagangan

Net ekspor adalah nilai barang dan jasa yang diekspor ke negara lain dikurangi nilai barang dan jasa yang diimpor ke dalam negeri. Net ekspor positif merefleksikan pengeluaran bersih dari luar negeri atas barang dan jasa kita, yang merupakan pendapatan bersih untuk negara kita, sedangkan net ekspor negatif adalah kebalikannya.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, menganut sistem perekonomian terbuka di mana lalu lintas perekonomian internasional sangat penting dalam perekonomian dan pembangunan nasional. Hubungan antara ekspor dan pertumbuhan ekonomi dalam waktu belakangan ini sudah menjadi perhatian berbagai kalangan. Perdagangan internasional khususnya ekspor diyakini merupakan lokomotif penggerak dalam pertumbuhan ekonomi. Ekspor merupakan agregat output yang sangat dominan dalam perdagangan internasional. Suatu negara tanpa adanya jalinan kerjasama dengan negara lain akan sulit untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, maka perdagangan internasional lebih kompleks. Kompleksitas ini disebabkan oleh faktor-faktor antara lain :

1. Pembeli dan penjual terpisah oleh batas-batas kenegaraan.
2. Barang harus dikirim dan diangkut dari suatu negara ke negara lainnya melalui bermacam peraturan seperti pabean, yang bersumber dari pembatasan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah.

3. Antara satu negara dengan negara lainnya terdapat perbedaan dalam bahasa, mata uang, taksiran dan timbangan, hukum dalam perdagangan dan sebagainya.

Perdagangan internasional terdiri dari kegiatan-kegiatan perniagaan dari suatu negara asal yang melintasi perbatasan menuju suatu negara tujuan yang dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk melakukan perpindahan barang dan jasa, perpindahan modal, perpindahan tenaga kerja, perpindahan teknologi (pabrik) dan perpindahan merek dagang.

Sedangkan bila ditinjau dari Teori Basis Ekonomi, maka dapat dibagi menjadi 2 yaitu Sektor Basis dan Sektor Non Basis (Tarigan, 2004) :

1. Sektor Basis adalah satu-satunya sektor yang bisa meningkatkan perekonomian wilayah melebihi pertumbuhan alamiah.
2. Sektor Non Basis adalah sektor untuk memenuhi kebutuhan lokal yang sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat setempat sehingga terikat terhadap kondisi ekonomi setempat dan tidak bisa berkembang melebihi pertumbuhan ekonomi wilayah.

Analisis basis dan non basis pada umumnya didasarkan atas nilai tambah (pendapatan) atau lapangan kerja.

Teori basis ekonomi ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan suatu barang dan jasa dari luar daerah. Proses produksi di sektor atau industri di suatu daerah yang menggunakan sumber daya produksi (SDP) lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku dimana outputnya diekspor akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan perkapita dan penciptaan peluang kerja di daerah tersebut. (Tambunan, 2001)

Ekspor merupakan bentuk paling sederhana dalam sistem perdagangan internasional dan merupakan salah satu strategi dalam memasarkan produk ke luar negeri (Kotler dan Armstrong, 1996). Keegan (1996) menjelaskan bahwa ekspor adalah memasok pelanggan di suatu negara atau luar negeri dengan produk yang dibuat di negara lain. Kegiatan ekspor menjadi semakin penting karena negara akan meningkatkan usaha untuk memasok dan melayani pasar yang terletak di luar batas-batas negara.

Besarnya ekspor dari suatu negara sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terkait dengan permintaan dan penawaran. Menurut Todaro (2006) bahwa dari sisi permintaan paling tidak ada lima faktor yang mempengaruhi ekspor produk suatu negara yaitu pendapatan perkapita importir, harga semua barang pokok, pertumbuhan populasi, keberadaan barang substitusi dan proteksi dalam bentuk tarif, kuota dan hambatan non tarif seperti isu kesehatan dan lingkungan. Sedangkan untuk penawaran ekspor dipengaruhi oleh harga komoditas di negara eksportir, pendapatan negara eksportir dan tren waktu.

2.7.4. Tenaga Kerja

Tenaga kerja yang terampil merupakan potensi sumberdaya manusia yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun keatas, dan dibedakan sebagai Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Pertumbuhan penduduk setiap tahunnya akan mempengaruhi pertumbuhan angkatan kerja.

Menurut Todaro (2006) pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Meski demikian hal tersebut masih dipertanyakan apakah benar laju pertumbuhan penduduk yang cepat benar-benar akan memberikan dampak positif atau negatif dari pembangunan ekonominya.

Makin berperannya sektor industri dalam perekonomian maka menyebabkan semakin besarnya produksi daerah karena sektor industri dapat memacu pertumbuhan ekonomi lebih cepat dibandingkan sektor pertanian. Dilihat dari besarnya tingkat produksi daerah maka diharapkan akan menaikkan pendapatan masyarakat di daerah yang bersangkutan, dimana peningkatan pendapatan ini diharapkan dapat semakin mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan yang ada.

2.8. Penelitian Terdahulu

Nurimansyah (1993) mengadakan penelitian mengenai sebab-sebab ketimpangan distribusi pendapatan dengan menggunakan model regresi ganda. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat kepincangan rata-rata pengeluaran rumah tangga, produk domestik regional bruto (PDRB), pertumbuhan PDRB, angkatan kerja, pengeluaran pemerintah, kesehatan, pendidikan dan bagian penduduk yang tidak atau kurang produktif. Hasil penelitian dikatakan bahwa pengeluaran rumah tangga perkapita per bulan maupun tingkat pertumbuhan PDRB per kapita setiap bulan berpengaruh secara negatif terhadap tingkat kesenjangan pembagian pendapatan. Artinya pada daerah-daerah yang tingkat pertumbuhan PDRB per kapita relatif tinggi, kesenjangan pembagian pendapatan relatif rendah, sedangkan pada daerah-daerah yang tingkat pertumbuhan PDRB relatif rendah ternyata kesenjangan pembagian pendapatan relatif tinggi. Pengaruh tenaga kerja yang bekerja pada sektor pertanian secara positif mempengaruhi tingkat ketidakmerataan pendapatan. Maksudnya pada daerah-daerah yang persentase jumlah tenaga kerja pada sektor pertanian relatif meningkat, maka ada kecenderungan tingkat kesenjangan pembagian pendapatannya juga meningkat. Pengaruh pengeluaran pemerintah (Pengeluaran Rutin dan Pembangunan Daerah) terhadap tingkat kepincangan pembagian pendapatan secara positif. Artinya pengeluaran pemerintah memperpincang pembagian pendapatan. Selanjutnya pengaruh variabel pendidikan terhadap kesenjangan pembagian pendapatan adalah negatif, yaitu: semakin tinggi persentase penduduk yang pernah sekolah, maka tingkat kesenjangan menurun. Pada daerah-daerah di mana pekerja yang telah sekolah relatif banyak, kesenjangan pembagian pendapatannya relatif rendah. Pengaruh tingkat kesehatan terhadap kesenjangan pembagian pendapatan adalah negatif. Pengaruh penduduk yang tidak atau kurang produktif terhadap kesenjangan pembagian pendapatan negatif. Artinya bila suatu daerah mempunyai bagian penduduk yang tidak produktif tinggi, maka kesenjangan pembagian pendapatannya relatif memburuk.

Xu dan Zou (2000) menjelaskan bahwa ketimpangan yang terjadi di China dipengaruhi oleh faktor-faktor luar yang mempengaruhi ketimpangan pertumbuhan

ekonomi dengan melihat pada hubungan terbalik, yaitu saham perusahaan milik negara (BUMN), tingkat inflasi (INF), jarak dari ibukota provinsi ke port terdekat dengan kereta api (DIS), share penduduk dengan lebih dari sekolah menengah (SCH), tingkat pertumbuhan PDRB (PDB), perdagangan diukur sebagai rasio dari nilai impor dan ekspor terhadap PDB (TRA), share pengeluaran pemerintah sebagai bagian dari PDRB (EXP), dan perubahan tingkat urbanisasi provinsi diukur sebagai tingkat pertumbuhan tenaga kerja non-pertanian di provinsi (URB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi pendapatan telah dipengaruhi oleh perubahan struktur perekonomian, peran negara, dan urbanisasi meningkat. Ketidaksetaraan dengan pengurangan saham BUMN, inflasi yang lebih tinggi, tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi, dan perdagangan luar negeri. Belanja pemerintah cenderung menggeser sumber daya dari yang kaya dan yang miskin untuk kelas menengah. Provinsi yang jauh dari pantai memiliki ketidaksetaraan yang lebih besar yang mencerminkan ketidaksempurnaan lebih besar dari pasar modal. Sekolah dan urbanisasi meningkat tidak mempengaruhi ketimpangan pendapatan.

Heppy Yana Syateri (2005), melakukan penelitian disparitas antar daerah Kabupaten/Kota dan faktor-faktor yang mempengaruhi di Provinsi Bengkulu Tahun 1983-2003, dengan menggunakan data sekunder dengan runtun waktu (Time Series). Untuk perhitungan tingkat kesenjangan digunakan Indeks Williamson. Sedangkan untuk mengetahui hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesenjangan di Provinsi Bengkulu digunakan model persamaan regresi berganda Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan selama periode 1983 - 2003 berfluktuatif dan semakin menurun. Hasil estimasi didapatkan bahwa variabel PMTDB dan tenaga kerja memiliki hubungan yang negatif yang berarti apabila jumlah PMTDB dan tenaga kerja meningkat maka akan menurunkan tingkat kesenjangan, sedangkan variabel sumbangan memiliki hubungan yang positif artinya apabila jumlah sumbangan meningkat maka akan meningkatkan tingkat kesenjangan. Hasil penelitian tersebut memiliki implikasi kebijakan yang diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi antara lain kebijakan peningkatan investasi dan kebijakan tenaga kerja.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan software Eviews 4.0 agar pengolahan data lebih cepat dan akurat.

3.2. Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dari Badan Pusat Statistik. Dalam penelitian ini data yang dipakai adalah data berkala (time series) dari tahun 1987-2008 yang berasal dari data publikasi, yaitu:

1. Data PDRB masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Atas Dasar Harga Konstan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Utara.
2. Data jumlah penduduk masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang didapat dari Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Utara.
3. Data inflasi, ekspor, impor, pengeluaran pemerintah, tenaga kerja non pertanian yang didapat dari Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Utara.

3.3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mencoba untuk menyelidiki permasalahan ketimpangan antar daerah di Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu pada tahun 1998 telah terjadi krisis ekonomi global dan pelaksanaan otonomi daerah pada tahun 2001. Pemerintah terus berupaya mengalokasikan dana untuk pembangunan daerah di seluruh Indonesia dengan prinsip yang pemerataan sesuai dengan sumber daya yang dikandung oleh daerah. Namun pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara sampai dengan sekarang masih terjadi ketimpangan. Untuk melihat ketimpangan tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan teori dan penelitian dengan melakukan :

3.3.1. Pertumbuhan Ekonomi

Perubahan atas nilai PDRB Riil yang diukur dengan mempergunakan perubahan PDRB masing-masing daerah di Provinsi Sumatera Utara menurut atas dasar harga konstan tahun 2000 dengan rumus :

$$g_i = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1} \times 100 \%}{\text{PDRB}_{t-1}}$$

g : Pertumbuhan ekonomi.

PDRB_t : PDRB riil pada periode yang bersangkutan.

PDRB_{t-1} : PDRB riil pada periode sebelumnya.

Pada data yang indeks tahun dasarnya berbeda (1983 dan 1993) dilakukan penyesuaian indeks tahun dasar ke tahun 2000.

3.3.2. Indeks Williamson atau Weighted Coefficient Variation (CVw)

Perhitungan Indeks Williamson pada dasarnya sama dengan coefficient of variance, yang diboboti dengan jumlah penduduk dan biasa disebut dengan Weighted Coefficient Variation (CVw), dapat dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$CVw = \frac{1}{\bar{Y}} \sqrt{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2 \frac{P_i}{P}} \quad 0 < CVw < 1$$

$$\bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

Keterangan :

P_i = jumlah penduduk Kabupaten/Kota ke - i

P = jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara

Y_i = pendapatan perkapita di Kabupaten/Kota ke - i

$\sum_{i=1}^n X_i$ = jumlah pendapatan perkapita di Kabupaten/Kota ke - i sampai dengan ke - n

\bar{Y} = pendapatan perkapita rata-rata Kabupaten/Kota ke - i

n = banyaknya Kabupaten/Kota

Pada penelitian ini dilakukan penghitungan Indeks Williamson (CVw) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dengan menghitung indeks

Williamson pra pemekaran dan pasca pemekaran. Untuk data pra pemekaran setelah tahun 1998 dilakukan dengan mengagregasi data PDRB dan jumlah penduduk dari Kabupaten/Kota yang mengalami pemekaran menjadi Kabupaten/Kota induknya seperti Kabupaten Tapanuli Utara (Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Samosir), Kabupaten Dairi (Kabupaten Pakpak Bharat), Kabupaten Tapanuli Selatan (Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas dan Kota Padangsidimpuan), Kabupaten Deli Serdang (Kabupaten Serdang Bedagai), Kabupaten Nias (Kabupaten Nias Selatan).

Indeks Williamson (CVw) yang dipakai dalam persamaan regresi adalah hasil perhitungan dari CVw pra pemekaran, hal ini dilakukan untuk menjaga konsistensi data sebelum dan sesudah pemekaran (1987-2008) dengan jumlah sebanyak 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota.

3.3.3. Regresi Linier Berganda

Nilai suatu variabel dapat berubah biasanya disebabkan oleh perubahan variabel lain yang berhubungan dengannya. Pola perubahan nilai suatu variabel biasanya menggunakan teknik analisa regresi untuk menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel. Dengan melakukan analisa regresi maka kita dapat membuat perkiraan nilai variabel tersebut pada nilai tertentu variabel yang mempengaruhi.

Persamaan regresi terdapat dua macam variabel yaitu variabel dependen (*dependent variable*) dan variabel independen (*independent variable*). Variabel dependen adalah variabel yang nilainya bergantung dari nilai variabel lain sedangkan variabel independen adalah variabel yang nilainya tidak bergantung dari variabel lain. Dengan menggunakan persamaan regresi inilah nilai variabel dependen ditaksir berdasarkan pada nilai variabel independen tertentu.

Variabel dependen dengan variabel independennya mempunyai sifat hubungan sebab akibat, baik yang didasarkan pada teori, hasil penelitian sebelumnya, ataupun yang didasarkan pada penjelasan logis tertentu. Hal ini merupakan prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam membangun suatu persamaan regresi.

Secara umum analisis regresi terbagi dua yaitu analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Analisis regresi sederhana yaitu analisis regresi apabila hanya terdapat satu variabel bebas sedangkan analisis regresi berganda yaitu apabila terdapat lebih dari satu variabel bebas. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah analisis regresi berganda yang persamaannya dituliskan sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + u$$

Y : variabel dependen
 β_0 : konstanta
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: koefisien variabel independen
 X : variabel independen
 u : error

Dalam menentukan persamaan linear estimasi dengan menggunakan metode kuadrat terkecil yang berarti memilih satu kurva linear dan beberapa kemungkinan kurva linear yang dapat dibuat dari data yang ada yang mempunyai kesalahan (error) paling kecil dari data aktual dengan data estimasinya. Kriteria ini terkenal dengan istilah prinsip kuadrat.

Metode analisis regresi yang paling kuat dan populer dan sering digunakan untuk analisis regresi adalah metode kuadrat terkecil (OLS) karena terdapat asumsi dasar (klasik) yang dikemukakan oleh Carl Frederich Gaus. Asumsi dasar tersebut menghasilkan penaksiran yang BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) adalah sebagai berikut :

1. Model regresinya adalah linier dalam parameter .
2. Variabel bebas mempunyai nilai yang tetap dalam sampel yang berulang atau variabel bebas merupakan variabel non stokastis sehingga variabel bebas tidak berhubungan dengan error term. Kovarian $(u_i, X_i) = E [X_i - E (X_i)] [u_i - E (u_i)] = 0$
3. Rata-rata atau expected value dari error term untuk setiap nilai X sama dengan nol $E (u_i, X_i) = 0$ dan varian error term adalah konstan pada setiap periode dan untuk setiap $X_i = \sigma^2$. Asumsi ini sering disebut homoscedasticity atau equal variance. Karena asumsi ini maka variasi Y adalah sama untuk setiap nilai X . Asumsi ini menjamin penduga koefisien regresi populasi adalah efisien.

Sebaliknya jika varian berubah mengikuti perubahan X, keadaan ini dinamakan heteroscedasticity.

4. Non-autokorelasi, yaitu bahwa error term pada suatu observasi tidak berhubungan dengan error term pada observasi yang lain.
5. Error term u memiliki distribusi normal. Sebagai hasilnya Y dan distribusi sampling koefisien regresi juga memiliki distribusi normal.

3.3.4. Pengujian Model

Untuk mengetahui ketepatan suatu model yang digunakan perlu dilakukan pengujian model sehingga masing-masing variabel dan keseluruhan parameter sudah sesuai dengan hipotesa yang disusun serta berpengaruh secara signifikan secara statistik. Langkah awal dengan melakukan pengujian pelanggaran asumsi klasik dari model regresi yang digunakan sehingga diperoleh model regresi yang BLUE. Pendeteksian dan pengujian terhadap penyimpangan asumsi klasik terdiri atas :

3.3.4.1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah residual atau faktor gangguan terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan statistik Jarque-Bera.

3.3.4.2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas didefinisikan sebagai adanya korelasi yang signifikan diantara dua atau lebih variabel independen dalam model regresi. Indikasi adanya multikolinearitas dalam model regresi adalah sebagai berikut :

- Terdapat nilai R^2 yang tinggi dan nilai F yang signifikan tetapi sebagian besar nilai t tidak signifikan,
- Terdapat korelasi yang tinggi (lebih dari 0,8) antara satu atau lebih pasangan variabel independen,
- Terdapat nilai R^2 yang tinggi pada model regresi bantuan yang merupakan model regresi antar variabel bebas,
- Terdapat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) > 10 dan *Tolerance* (TOL) > 1 .

Untuk menghilangkan multikolinearitas pada model regresi maka perlu dilakukan perbaikan dengan cara :

- Menghilangkan salah satu variabel independen yang saling berkorelasi,

- Melakukan transformasi data variabel,
- Menambah data tahun sebelumnya atau sesudahnya.

Dalam penelitian ini, uji multikolinearitas melalui Corellation dengan menggunakan Eviews 4.0.

3.3.4.3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas didefinisikan sebagai adanya variasi yang tidak sama pada gangguan acak pada setiap variabel bebas. Dampak adanya heteroskedastisitas adalah varians yang dihasilkan bukan varians yang minimum sehingga dugaan parameterny menjadi bias. Deteksi adanya heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji white dan solusi pemecahannya dengan menggunakan koreksi standart error (*white heteroscedasticity consistent standart erroe and covariance*) dan *weighted least square* yaitu pembobotan setiap variabel dengan varians yang tidak konstan agar menjadi varians yang konstan. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas melalui Heteroskedasticity Test dengan menggunakan Eviews 4.0.

3.3.5.4. Uji Autokorelasi

Autokorelasi terjadi jika gangguan acak dari setiap observasi yang berbeda berkorelasi atau dengan kata lain terjadi korelasi gangguan acak antar waktu. Autokorelasi tidak mempengaruhi ketidakbiasan atau konsistensi penduga kuadrat terkecil tetapi model yang dihasilkan tidak efisien. Keberadaan autokorelasi dapat diketahui dengan menggunakan uji durbin watson d dengan kriteria sebagai berikut :

HIPOTESIS NOL	KEPUTUSAN	KRITERIA
Ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak ada keputusan	$dl < d < du$
Ada autokorelasi negatif	Tolak	$4-dl < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tidak ada keputusan	$4-du < d < 4-dl$
Tidak ada autokorelasi	Jangan ditolak	$du < d < 4-du$

Uji autokorelasi dilakukan untuk memastikan tidak adanya korelasi atau hubungan antar pengamatan (observasi) dari setiap variabel independen yang

terdapat di dalam model regresi. Dalam penelitian ini, uji autokorelasi menggunakan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test.

Adapun uji terhadap kriteria dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pengujian kriteria ekonomi dilakukan melalui pengujian berdasarkan teori ekonomi yang ada. Jika hasil pembuktian model menunjukkan adanya kesesuaian dengan teori ekonomi maka model dinyatakan benar secara teori ekonomi. Jika menunjukkan tidak adanya kesesuaian dengan teori ekonomi maka diperlukan penelitian dan pembahasan lebih lanjut mengenai penyebab ketidaksesuaian tersebut.
2. Pengujian koefisien regresi secara parsial (Uji-t). Uji-t merupakan pengujian untuk mengetahui apakah koefisien regresi signifikan atau tidak. Apabila t statistik $>$ t tabel pada tingkat keyakinan 95% maka variabel bebas yang diuji berpengaruh terhadap variabel terikat.
3. Pengujian model secara keseluruhan (Uji-F). Uji-F untuk menguji signifikansi parameter model. Apabila F statistik $>$ F tabel pada tingkat keyakinan 95% maka model secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel terikat.

Uji kebaikan model (*Goodnes of Fit*) adalah uji menguji apakah model dapat diandalkan atau tidak. Nilai R^2 yang tinggi dapat diartikan bahwa model dapat diandalkan. Nilai R^2 dikatakan tinggi jika terletak antara 0,7 – 1,00.

3.3.5. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Disparitas di Provinsi Sumatera Utara

Model penelitian ini merupakan modifikasi dari model penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Xu dan Zou pada tahun 2000 yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pertumbuhan ekonomi dengan melihat pada hubungan terbalik, yaitu saham perusahaan milik negara (BUMN), tingkat inflasi (INF), jarak dari ibukota provinsi ke port terdekat dengan kereta api (DIS), share penduduk dengan lebih dari sekolah menengah (SCH), tingkat pertumbuhan PDRB (PDB), perdagangan diukur sebagai rasio dari nilai impor dan ekspor terhadap PDB (TRA), share pengeluaran pemerintah sebagai bagian dari PDRB (EXP).

Pada penelitian ini faktor penyebab disparitas dimodifikasi dengan mempertahankan variabel yang mempengaruhi ketimpangan disparitas dengan

melihat pada hubungan dengan variabel tingkat inflasi, peranan perdagangan diukur dari rasio net ekspor terhadap PDRB, kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap PDRB, tingkat pertumbuhan tenaga kerja (non-pertanian) dalam menentukan perubahan dalam disparitas pendapatan tahun 1987–2008. Hal ini dilakukan karena adanya kesulitan pencarian data pada beberapa variabel. Oleh karena itu untuk melihat penyebab disparitas pendapatan di Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan modifikasi model sebagai berikut :

$$CVw_t = \beta_0 + \beta_1 INF + \beta_2 TRA + \beta_3 EXP + \beta_4 URB + \varepsilon$$

Keterangan :

- β_0 : konstanta
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: koefisien variabel independen
 CVw : Indeks Williamson pra pemerakaran
 INF : tingkat inflasi
 TRA : peranan perdagangan diukur sebagai net ekspor terhadap PDRB
 EXP : kontribusi pengeluaran pemerintah sebagai bagian dari PDRB
 URB : tingkat pertumbuhan tenaga kerja non-pertanian di provinsi Sumatera Utara.
 ε : error

BAB 4

KONDISI UMUM DAN PEREKONOMIAN DAERAH

4.1. Kondisi Umum

Provinsi Sumatera Utara berada di bagian barat Indonesia, terletak pada garis 1° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur, sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebelah Timur dengan Negara Malaysia di Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Provinsi Sumatera Utara memiliki luas daratan 71.680,68 km, sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, Pulau-pulau Batu, serta beberapa pulau kecil, baik di bagian barat maupun bagian timur pantai Pulau Sumatera. Luas daerah terbesar di Sumatera Utara adalah Kabupaten Mandailing Natal dengan luas 6.620,70 km² atau sekitar 9,24 persen dari total luas Sumatera Utara, sedangkan luas daerah terkecil adalah Kota Sibolga dengan luas 10,77 km² atau sekitar 0,02 persen dari total luas wilayah Sumatera Utara. Sedangkan berdasarkan kondisi letak dan kondisi alam, Sumatera Utara dibagi dalam 3 kelompok wilayah yaitu Pantai Barat, Dataran Tinggi, dan Pantai Timur. (BPS, 2011)

Pada bulan Juni 2009 Administrasi pemerintahan Provinsi Sumatera Utara terdiri atas 25 Kabupaten dan 8 Kota. Selanjutnya Kabupaten/Kota tersebut terdiri atas 417 kecamatan. Provinsi Sumatera Utara mempunyai 5.856 desa/kelurahan.

Menurut hasil pencacahan lengkap Sensus Penduduk (SP) 1990 penduduk Sumatera Utara berjumlah 10,26 juta jiwa, dan dari hasil SP 2000, jumlah penduduk Sumatera Utara sebesar 11,51 juta jiwa. Dari hasil estimasi jumlah penduduk keadaan Juni 2008 diperkirakan sebesar 13.042.317 jiwa. Kepadatan penduduk Sumatera Utara tahun 1990 adalah 143 jiwa per km dan tahun 2008 meningkat menjadi 182 jiwa per km². Laju pertumbuhan penduduk Sumatera Utara selama kurun waktu tahun 1990-2000 adalah 1,20 persen per tahun, dan pada tahun 2000-2005 menjadi 1,37 % per tahun. Dan laju pertumbuhan penduduk 2000–2008 mencapai 1,57 %.

Pada tahun 2008 penduduk Sumatera Utara yang berjenis kelamin perempuan berjumlah sekitar 6.553.317 jiwa dan penduduk laki-laki sebesar 6.489.000 jiwa. Pada tahun 2008, jumlah penduduk Sumatera Utara yang tinggal di perdesaan adalah 7,11 juta jiwa (54,52 persen) dan yang tinggal di daerah perkotaan sebesar 5,93 juta jiwa (45,48 persen).

Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara mengalami perubahan dari tahun 1999–2008. Akibat terjadinya krisis moneter pada pertengahan tahun 1997, penduduk miskin di Sumatera Utara tahun 1999 meningkat menjadi 16,74 persen dari total penduduk Sumatera Utara yaitu sebanyak 1,97 juta jiwa. Pada tahun 2003 terjadi penurunan penduduk miskin baik secara absolut maupun secara persentase, yaitu menjadi 1,89 juta jiwa atau sekitar 15,89 persen, sedangkan tahun 2004 jumlah dan persentase turun menjadi sebanyak 1,80 juta jiwa atau sekitar 14,93 persen kemudian pada tahun 2005 penduduk miskin turun menjadi 1,76 juta jiwa (14,28 persen), namun akibat dampak kenaikan harga BBM pada bulan Maret dan Oktober 2005 penduduk miskin tahun 2006 meningkat menjadi 1,98 juta jiwa (15,66 persen). Pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin sebanyak 1,77 juta atau 13,90 persen, angka ini menurun pada tahun 2008 menjadi 1,63 juta jiwa atau 12,55 persen.

Pada tahun 2000, TPAK di Sumatera Utara sebesar 57,34 persen, tahun 2006 naik menjadi 66,90 persen kemudian pada tahun 2007 kembali naik menjadi 67,49 persen. Begitu pula pada tahun 2008, angka tersebut kembali naik menjadi 68,33 persen.

Sebagian besar angkatan kerja di Sumatera Utara masih berpendidikan SD ke bawah. Persentase angkatan kerja golongan ini mencapai 40,66 persen, angkatan kerja yang berpendidikan setingkat SLTP dan SLTA masing-masing sekitar 23,70 persen dan 29,27 persen, sedangkan sisanya 6,37 persen berpendidikan di atas SLTA. Dengan masih rendahnya pendidikan angkatan kerja memungkinkan produktivitasnya juga masih belum optimal.

Penduduk Sumatera Utara yang bekerja ini sebagian besar bekerja pada sektor pertanian yaitu 47,12 persen. Sektor kedua terbesar dalam menyerap tenaga kerja di Sumatera Utara adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar 20,20 persen. Sektor lain yang cukup besar peranannya dalam

menyerap tenaga kerja adalah sektor jasa-jasa, baik jasa perorangan, jasa perusahaan, dan jasa pemerintahan yaitu sebesar 12,04 persen, sementara penduduk yang bekerja di sektor industri hanya sekitar 8,08 persen saja. Selebihnya bekerja di sektor penggalian dan pertambangan, sektor listrik, gas, dan air minum, sektor bangunan, sektor angkutan dan komunikasi, dan sektor keuangan.

Jika dilihat dari status pekerjaannya, hampir sepertiga (28,40 persen) penduduk yang bekerja di Sumatera Utara adalah buruh atau karyawan. Penduduk yang berusaha dengan dibantu anggota keluarga mencapai sekitar 20,12 persen, sedangkan penduduk yang bekerja sebagai pekerja keluarga mencapai 20,62 persen. Hanya 2,78 persen penduduk Sumatera Utara yang menjadi pengusaha yang mempekerjakan buruh tetap/bukan anggota keluarganya.

Produksi padi Sumatera Utara selama periode 1999-2008 rata-rata mengalami penurunan sebesar minus 0,15 % per tahun. Penurunan ini disebabkan turunnya produksi padi sawah dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar minus 0,11 %.

Sumatera Utara merupakan salah satu pusat perkebunan di Indonesia. Komoditi hasil perkebunan yang paling penting dari Sumatera Utara saat ini antara lain kelapa sawit, karet, kopi, coklat dan tembakau. Luas tanaman karet rakyat di Sumatera Utara selama periode 2005-2008 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,18 per tahun.

Pada tahun 2007 luas tanaman karet rakyat adalah sebesar 362.687,20 Ha, menjadi 387.656,56 Ha pada tahun 2008. Kabupaten Mandailing Natal, Labuhan Batu, dan Langkat merupakan pusat perkebunan karet rakyat di Sumatera Utara. Di ketiga daerah tersebut terbentang seluas 180.365,41 Ha kebun karet, atau sama dengan 46,52 persen dari total luas kebun karet rakyat Sumatera Utara.

Sementara itu luas tanaman kebun kelapa sawit rakyat di Sumatera Utara pada tahun 2008 sebesar 383.651,79 Ha dengan produksi 4.151.779,10 ton Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. Kabupaten Labuhan Batu merupakan pusat perkebunan kelapa sawit rakyat di Sumatera Utara. Di daerah ini terdapat sebesar 132.962 Ha kebun sawit rakyat atau 34,66 persen dari seluruh perkebunan kelapa sawit rakyat Sumatera Utara.

Pada tahun 2008, produksi kopi Sumatera Utara sebesar 47.847,75 ton dengan luas lahan 75.782,15 Ha. Kabupaten Dairi dan Tapanuli Utara merupakan penghasil kopi dari Sumatera Utara.

Jumlah usaha industri besar dan sedang di Sumatera Utara tahun 2008 tercatat sebanyak 1.145 perusahaan, yang berarti mengalami penurunan sebanyak 36 perusahaan atau sekitar 3,05 persen jika dibandingkan dengan tahun 2007 yang berjumlah 1.181 perusahaan. Jumlah perusahaan terbanyak berada di Kabupaten Deli Serdang, disusul Kota Medan dan Asahan.

Sedangkan nilai output industri besar dan sedang pada tahun 2008, mencapai Rp.81,41 triliun dengan nilai tambah atas dasar harga pasar sebesar Rp.24,32 triliun. Nilai tambah terbesar pada tahun 2008 terdapat pada golongan industri makanan, minuman dan tembakau yaitu sebesar Rp.16,50 triliun. Kemudian diikuti oleh industri kimia, batu bara, karet, dan plastik sebesar Rp. 3,17 triliun dan industri kayu dan perabot rumah tangga sebesar Rp.1,36 triliun. Nilai tambah terkecil pada tahun yang sama terdapat pada golongan industri pengolahan lainnya sebesar Rp.24,10 milyar.

Volume ekspor Sumatera Utara pada tahun 2008, mencapai 8,52 juta ton dan volume impor sebesar 5,88 juta ton. Hal ini berarti terjadi peningkatan 8,66 persen pada ekspor, begitu pula pada impor terjadi kenaikan 23,92 persen dibandingkan tahun 2007.

Realisasi penerimaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2008 tercatat sebesar Rp. 3.225,8 milyar, yang terdiri atas Penerimaan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 2.181,3 milyar, penerimaan dana perimbangan sebesar Rp.1.039,0 milyar, dan sisanya dari penerimaan lainnya. Adapun realisasi pengeluaran pada tahun tersebut adalah sebesar Rp. 2.967 milyar, yang terdiri atas belanja langsung sebesar Rp. 1.172,9 milyar dan belanja tak langsung sebesar Rp. 1.794,4 milyar. Untuk pembayaran belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sebesar Rp. 683,3 milyar dan untuk belanja pegawai sebesar Rp.559,8 milyar.

4.2. Wilayah Pembangunan di Provinsi Sumatera Utara

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama ini telah banyak melakukan pembangunan berbagai prasarana dan infrastruktur untuk memperlancar perdagangan baik antar Kabupaten/Kota maupun antar Provinsi lainnya. Hal ini diperkuat dengan sektor swasta yang turut serta membangun dengan mendirikan berbagai properti untuk perdagangan, perkantoran, hotel, begitu juga dengan sektor pertambangan dan energi, pariwisata, pengangkutan dan telekomunikasi, dan jasa-jasa lainnya.

Setelah otonomi daerah pada tahun 2001, Provinsi Sumatera Utara berupaya mengembangkan ekonomi lokal yang tujuannya untuk menggali dan memanfaatkan potensi daerah agar dapat diproduksi untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk memudahkan koordinasi pembangunan bersinergi antar Kabupaten/Kota dengan melihat kesamaan karakteristik daerah yang berdekatan dan potensi daerah, maka Pemerintah Provinsi membuat Program dengan pembagian sebanyak 3 wilayah pembangunan di Provinsi Sumatera Utara, yaitu Wilayah pembangunan Agropolitan, Wilayah pembangunan Agromarinepolitan Pantai Barat dan Wilayah pembangunan Agromarinepolitan Pantai Timur.

Wilayah pembangunan Agropolitan ditandai dengan nota kesepakatan bersama para Bupati dan Walikota daerah tersebut dengan adanya pemikiran kesamaan karakteristik daerah yang sama untuk pengembangan agribisnis. Dengan harapan dapat menghadapi globalisasi ekonomi maka dianggap perlu membangun suatu jaringan agribisnis mulai dari hulu ke hilir.

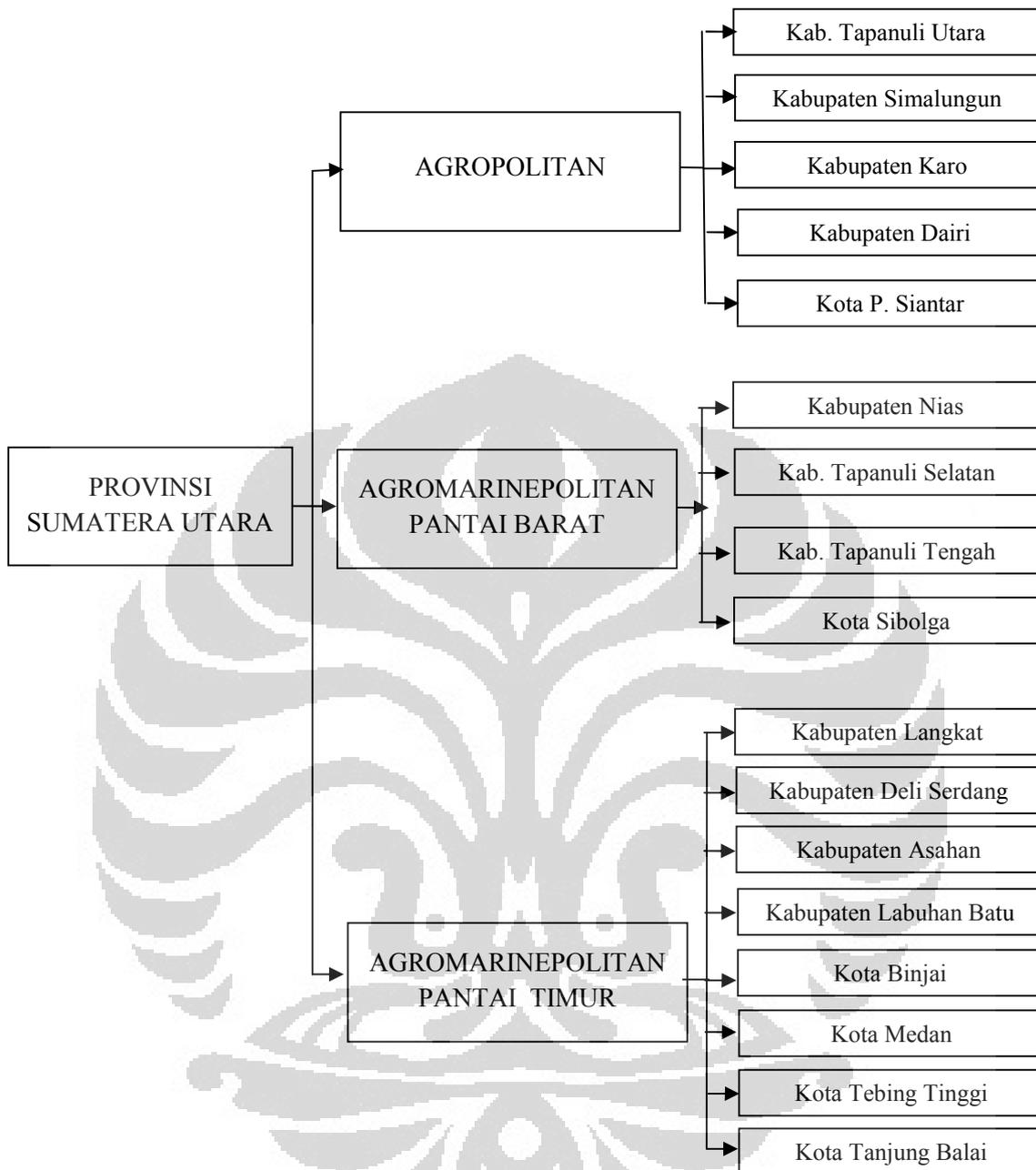
Pembentukan Agromarinepolitan (Pantai Barat dan Pantai Timur) difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan tujuan meningkatkan taraf penghidupan masyarakat, mendorong pengelolaan potensi sumber daya alam khususnya perikanan, pariwisata bahari dan industri non perikanan secara terpadu berlandaskan potensi sumberdaya pesisir dan laut dengan berazaskan kepada pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dan pengelolaan kawasan pesisir berbasis masyarakat. Ditandai dengan kesepakatan dari 16 Kabupaten/Kota yang berada di wilayah tersebut.

Untuk lebih jelasnya pembagian luas wilayah pembangunan di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel 4.1, dibawah ini.

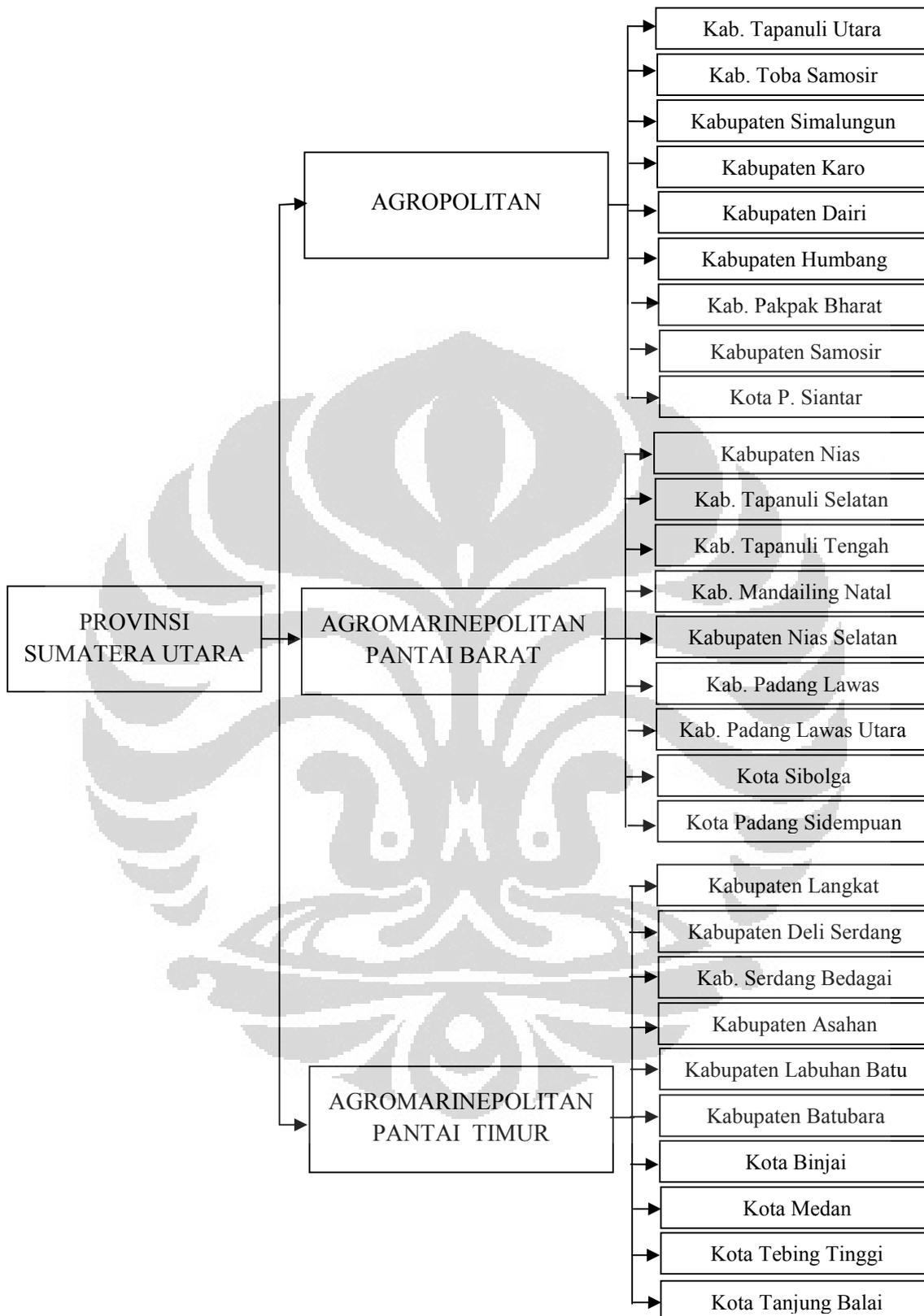
Tabel 4.1. Luas Menurut Wilayah Pembangunan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008

Wilayah	Luas Wilayah (km ²)	% Luas wilayah	Pendapatan perKapita (Rp)	Kegiatan
I. AGROPOLITAN				
			6.745.596,58	- Pertanian
Kabupaten Tapanuli Utara	3764,65	5,25		- Perkebunan
Kabupaten Toba Samosir	2352,35	3,28		- Panas Bumi
Kabupaten Simalungun	4368,60	6,09		- Industri
Kabupaten Karo	2127,25	2,97		- Pariwisata
Kabupaten Dairi	1927,80	2,69		
Kabupaten Humbang	2297,20	3,20		
Kabupaten Pakpak Bharat	1218,30	1,70		
Kabupaten Samosir	2433,50	3,39		
Kota Pematang Siantar	79,97	0,11		
AGROMARINEPOLITAN				
II. PANTAI BARAT				
			4.346.496,88	- Pertanian
Kabupaten Nias	3495,39	4,88		- Perkebunan
Kabupaten Tapanuli Selatan	4352,86	6,07		- Perikanan
Kabupaten Tapanuli Tengah	2158,00	3,01		- Pariwisata
Kabupaten Mandailing Natal	6620,70	9,24		
Kabupaten Nias Selatan	1625,91	2,27		
Kabupaten Padang Lawas	1625,91	5,43		
Kabupaten Padang Lawas Utara	3918,05	5,47		
Kota Sibolga	114,65	0,16		
Kota Padang Sidempuan				
III. PANTAI TIMUR				
			3.168.944,13	- Perkebunan
Kabupaten Langkat	6263,29	8,74		- Pertambangan
Kabupaten Deli Serdang	2486,14	3,47		- Pertanian
Kabupaten Serdang Bedagai	1913,33	2,67		- Perikanan
Kabupaten Asahan	3675,79	5,13		- Industri
Kabupaten Labuhan Batu	9223,18	12,87		- Perdagangan dan jasa
Kabupaten Batubara	904,96	1,26		
Kota Binjai	904,96	0,13		
Kota Medan	265,10	0,37		
Kota Tebing Tinggi	38,44	0,05		
Kota Tanjung Balai	61,52	0,09		

Sumber : BPS Sumatera Utara, 2009



Gambar 4.1. Pembagian Wilayah Pembangunan Pra Pemerkanan di Provinsi Sumatera Utara



Sumber : BPS dan Masterplan AgromarinePolitan, 2007

Gambar 4.2. Pembagian Wilayah Pembangunan Pasca Pemekaran di Provinsi Sumatera Utara

4.2.1. Wilayah Pembangunan Agropolitan

Agropolitan merupakan kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya. Agropolitan adalah Kawasan pertanian yang memiliki fasilitas seperti layaknya di perkotaan. Fasilitas tersebut antara lain adalah : Jaringan jalan, lembaga pasar, lembaga keuangan, perkantoran, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, transportasi, telekomunikasi, listrik, air bersih, prasarana dan sarana umum lainnya.

Pengertian lain dari Agropolitan adalah Strategi Pengembangan Kawasan dengan tujuan untuk membangun sebuah agropolis (Kota Pertanian) yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (Agribisnis) di wilayah sekitarnya.

Tujuan Agropolitan

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani melalui peningkatan nilai tambah, produktivitas dan diversifikasi produk di KADTBB
2. Meningkatkan kapasitas KADTBB dalam menghasilkan produk-produk agribisnis, kesempatan kerja, kesempatan berusaha secara berkelanjutan.
3. Menjadikan kawasan agropolitan sebagai sentra agribisnis sekaligus melestarikan fungsi hidrologis dataran tinggi dan menunjang aneka produk wisata agro.
4. Meningkatkan daya saing produk-produk agribisnis, baik di tingkat nasional maupun internasional
5. Mengurangi arus urbanisasi (brain drain dan capital drain)

Visi dari Agropolitan adalah terwujudnya Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan Sumatera Utara sebagai salah satu pusat agribisnis di Asia-Pasifik tahun 2020 dengan ciri berdaya saing, berkerakyatan dan berkelanjutan.

Sedangkan Misi Agropolitan adalah memodernisasi sistem dan usaha agribisnis berbasis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan yang ada di Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan

Sumatera Utara menuju sistem dan usaha agribisnis berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi dalam satu kawasan agropolitan.

Tabel 4.2. Komoditas Unggulan di Lokalita Percontohan se-Kawasan Agropolitan

Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Lokalita	Komoditas Unggulan	Luas (ha)
Simalungun	Silimakuta	Saribudolok	– Jagung – Kentang – Kopi	2.060
Karo	Merek	Nagalingga	– Kentang – Tomat – Cabai – Kopi	2.000
Dairi	Sitinjo	panjidabutar	– Jagung – Ubi jalar – Alpokat – Kopi	1.287
Pakpak Barat	Siempat Rube	Siempat Rube	– Jagung – Ubi jalar – Kopi	1.188
Tapanuli Utara	Siborong- borong	Huta bulu	– Jagung – Nenas – Kopi	1.199
Toba Samosir	Lumban Julu	Sionggang	– Jagung – Kacang Tanah – Bawang Merah – Kopi	1.320
Humbang Hasundutan	Dolok Sanggul	Sileang	– Jagung – Wortel – Kopi	1.800
Samosir	Harian	Partungko Naginjang	– Kentang – Kubis – Cabai – Kopi	48.759
Pematang Siantar	Siantar Martoba	Pondok Sayur	– Jagung – Ubi Kayu	1.397

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Utara

4.2.2. Wilayah Pembangunan Agromarinepolitan

Agromarinepolitan adalah kota dimana kegiatan perikanan sebagai sektor unggulan yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agri(marine)bisnis serta mampu melayani dan mendorong kegiatan pembangunan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sistem Agrimarine bisnis adalah pembangunan perikanan yang dilakukan secara terpadu oleh nelayan maupun petambak dan pengusaha, baik usaha budidaya dan pembangunan agri(marine)bisnis hulu, agri(marine)bisnis hilir serta jasa-jasa pendukungnya. Sementara Kota Pesisir (Agromarinepolitan) berada dalam kawasan sentra produksi perikanan yang memberikan kontribusi besar terhadap mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakatnya yang selanjutnya kawasan ini disebut kawasan Agromarine-politan. (Bappeda Provinsi Sumatera Utara, 2007)

Visi Agromarinepolitan adalah terwujudnya pembangunan kawasan Agromarinepolitan sebagai kawasan industri Agromarine (agro, perikanan, pariwisata bahari) secara terpadu berbasis sumberdaya Agromarine untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan.

Misi Agromarinepolitan adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan kegiatan usaha berbasis agromarine pada kawasan di pantai barat dan timur,
2. Mengembangkan sistem transportasi yang mengintegrasikan kawasan agro dengan kawasan/pusat industri dan perdagangan marine di pesisir
3. Meningkatkan segenap lembaga/ pelaku agromarine secara optimal dan berkelanjutan.
4. Menciptakan iklim yang kondusif bagi partisipasi seluruh stakeholder dalam pemanfaatan potensi sumberdaya agromarinepolitan secara berkelanjutan.
5. Meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, pembudidaya ikan dan pengolahan hasil agromarine secara arif dan berkeadilan.
6. Memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan agromarine guna menjamin keberlanjutan pemanfaatan.

Tujuan Agromarinepolitan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan taraf penghidupan masyarakat.

2. Mendorong pengelolaan Potensi sumber daya alam khususnya perikanan, pariwisata bahari dan industri non perikanan secara terpadu berlandaskan potensi sumberdaya pesisir dan laut dengan berazaskan kepada pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).
3. Pengelolaan kawasan pesisir berbasis masyarakat.

Sasaran Agromarinepolitan adalah sebagai berikut (Bappeda Provinsi Sumatera Utara, 2007) :

1. Mendorong percepatan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta pulau terluar Sumatera Utara yang berbasis kelautan dan perikanan secara terintegrasi, terkoordinasi dan terencana sesuai dengan target dan sasaran yang diharapkan, sehingga pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan dapat meningkat.
2. Rencana induk untuk pengembangan dan implementasi program/kegiatan yang dilaksanakan oleh para stakeholders guna mempercepat pembangunan dan pengembangan wilayah pesisir pantai khususnya di Kabupaten/Kota yang menjadi anggota program Agromarinepolitan yang berbasiskan pembangunan Kelautan dan Perikanan serta agro lainnya.

Kabupaten/Kota yang telah menentukan lokalita Agromarinepolitan:

1. Kota Tanjung Balai di Kelurahan Pematang Pasir dan Perjuangan kecamatan Teluk Nibung
2. Kota Sibolga di Kelurahan Pancur Dewa Kecamatan Sibolga Sambas
3. Kota Tebing Tinggi di Kelurahan Brohol Kecamatan Bajenis
4. Kabupaten Serdang Bedagai di desa Bagan Kuala kecamatan Tanjung Beringin
5. Kabupaten Asahan di desa Asahan Mati kecamatan Tanjung Balai, desa Sarang Heleng kecamatan Sei Kepayang, kelurahan Binjei Serbangun kecamatan Air Joman
6. Kabupaten Nias di kelurahan Pasar Lahewa kecamatan Lahewa, desa Siofaewali kecamatan Bawalato.

Sedangkan Kabupaten Langkat, Labuhan Batu, Nias Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Deli Serdang, Kota Binjai, Medan, Sibolga, Padangsidempuan dan Tebing Tinggi belum menentukan lokalita.

4.3. Produk Domestik Wilayah Brutto (PDRB) sebagai Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Wilayah Brutto (PDRB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha kegiatan ekonomi dalam suatu daerah/wilayah pada periode tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. (BPS Provinsi Sumatera Utara, 2010).

Dalam menghitung pendapatan wilayah, hanya dipakai konsep domestik, berarti seluruh nilai tambah yang ditimbulkan oleh berbagai sektor/lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya disuatu wilayah (dalam hal ini Provinsi/Kabupaten/Kota) dihitung dan dimasukkan, tanpa memperhatikan kepemilikan atas faktor tersebut. Dengan demikian PDRB secara agregatif menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan/balas jasa kepada faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah tersebut, dengan kata lain PDRB menunjukkan gambaran "Production Originated" (BPS Propinsi Sumatera Utara, 2010).

Perhitungan PDRB yang biasa digunakan ada 2 jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB menggambarkan kondisi nilai tambah barang dan jasa pada tahun yang bersangkutan dan sangat dipengaruhi oleh inflasi sehingga tidak mencerminkan output nilai yang sebenarnya.

Sedangkan PDRB ADHK menggambarkan kondisi nilai (output) barang dan jasa yang sebenarnya pada setiap tahun berjalan dan tidak dipengaruhi oleh inflasi. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya apabila negatif menunjukkan terjadinya penurunan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting untuk memonitor dan mengevaluasi hasil pembangunan dengan menunjukkan sejauh mana kinerja atau aktivitas dari berbagai sektor ekonomi dalam menghasilkan nilai tambah atau pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Untuk mengetahui fluktuasi pertumbuhan ekonomi tersebut secara riil dari tahun ke tahun, digunakan PDRB atas dasar harga konstan secara berkala. Pertumbuhan yang positif menunjukkan terjadinya penurunan kinerja perekonomian yang dilaksanakan dibanding periode sebelumnya.

Propinsi Sumatera Utara memiliki pertumbuhan PDRB yang dihitung dari penjumlahan nilai tambah yang diberikan oleh setiap sektor terhadap 17 Kabupaten/Kota. Selama kurun waktu 22 tahun (1987-2008) dengan laju pertumbuhan mengalami fluktuasi, misalnya pada saat terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998, pertumbuhan PDRB turun sampai negatif. Dampaknya dirasakan hampir semua wilayah yang ada di Provinsi Sumatera Utara, kecuali daerah-daerah yang mempunyai basis pertanian yang kuat.

Tabel 4.3. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Tahun 2000 dengan dan tanpa minyak bumi di Provinsi Sumatera Utara

Tahun	PDRB Minyak Bumi	% Laju Pertumbuhan	PDRB Non Minyak Bumi	% Laju Pertumbuhan
1987	-	-	-	-
1988	32,390,238.16	11.72	31,822,438.14	11.75
1989	35,672,029.56	10.13	35,051,834.94	10.15
1990	38,461,564.31	7.82	37,823,734.25	7.91
1991	41,570,823.28	8.08	40,924,068.88	8.20
1992	44,660,910.94	7.43	43,970,430.40	7.44
1993	48,897,842.99	9.49	48,120,038.13	9.44
1994	53,139,463.17	8.67	52,343,894.93	8.78
1995	58,449,528.69	9.99	57,575,176.65	9.99
1996	63,518,071.51	8.67	62,582,443.18	8.70
1997	67,585,920.62	6.40	66,719,725.30	6.61
1998	63,717,736.16	- 5.72	62,860,209.31	- 5.78
1999	65,882,328.82	3.40	65,024,588.74	3.44
2000	69,134,404.53	4.94	68,247,296.12	4.96
2001	72,059,187.34	4.23	71,382,460.07	4.59
2002	75,365,476.68	4.59	74,711,935.46	4.66
2003	81,062,822.86	7.56	80,459,824.51	7.69
2004	85,042,993.81	4.91	84,599,062.23	5.14
2005	89,687,692.67	5.46	88,540,007.80	4.66
2006	94,072,345.29	4.89	93,698,970.68	5.83
2007	100,329,026.88	6.65	99,937,188.36	6.66
2008	106,170,829.40	5.82	105,812,896.93	5.88
	Rata-Rata	6.51		6.57

Sumber ; BPS, data diolah

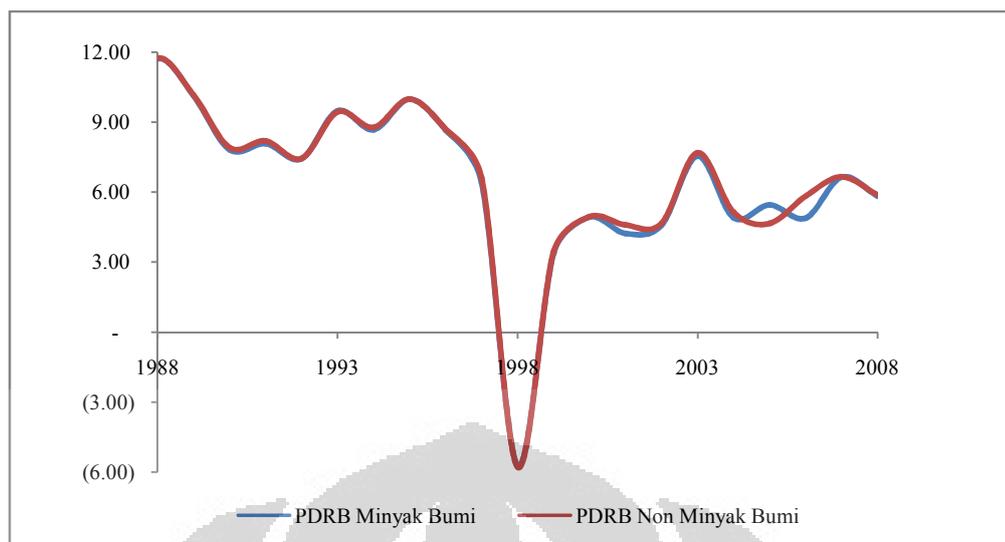
Pada tabel 4.3. dapat dilihat PDRB ADHK 2000 Provinsi Sumatera Utara dengan minyak bumi, cenderung meningkat setiap tahunnya, hal ini dapat dilihat pada tahun 1988 ADHK 2000 sebesar 32,390,238.16 (juta) dengan laju pertumbuhan sebesar 11.72 %, dan nilainya fluktuatif sampai dengan tahun 1997

dan mengalami penurunan pada tahun 1998 dengan laju pertumbuhan negatif sebesar - 5.72 % , dikarenakan adanya krisis ekonomi dengan nilai PDRB sebesar 63,717,736.16 (juta). Kejadian ini tidak berlangsung lama dan berangsur-angsur pulih setiap tahunnya sampai tahun 2008 sebesar 105,812,896.93 (juta) dengan laju pertumbuhan positif sebesar 5.82 %.

Sedangkan pada PDRB ADHK 2000 Provinsi Sumatera Utara non minyak bumi, cenderung meningkat setiap tahunnya sejalan dengan PDRB dengan minyak bumi. Dapat dilihat pada tahun 1988 ADHK 2000 sebesar 31,822,438.14 (juta) dengan laju pertumbuhan sebesar 11.75 % sampai dengan tahun 1997 dan mengalami penurunan pada tahun 1998 dengan laju pertumbuhan negatif sebesar - 5.78 % , dikarenakan adanya krisis ekonomi dengan nilai PDRB sebesar 62,860,209.31 (juta). Hal ini tidak berlangsung lama dan berangsur-angsur pulih setiap tahunnya sampai tahun 2008 sebesar 106,170,829.40 (juta) dengan laju pertumbuhan positif sebesar 5.88 %.

Sementara itu, berdasarkan pertumbuhan PDRB rata-rata selama 22 tahun, PDRB dengan minyak bumi ternyata lebih rendah sedikit yaitu sebesar 6,44 %, sedangkan pertumbuhan PDRB tanpa minyak bumi sebesar 6,51%. Ini menunjukkan kontribusi minyak bumi terhadap pertumbuhan ekonomi secara umum di Provinsi Sumatera Utara tidak terlalu berpengaruh terlalu besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pada Gambar 4.3. dapat dilihat tren pertumbuhan PDRB dengan dan tanpa minyak bumi cenderung sama dan kurva keduanya saling berhimpitan dan bernilai positif sampai dengan tahun 2008. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai hasil perkembangan sektor pertambangan migas tidak selalu mempunyai dampak positif yang cukup berarti terhadap kehidupan masyarakat daerah setempat. Hal ini disebabkan peningkatan produksi daerah hasil migas tersebut pada umumnya ditujukan untuk ekspor dan kurang berkaitan dengan kegiatan ekonomi daerah setempat. Dampak positifnya lebih dirasakan oleh perekonomian nasional dalam bentuk penerimaan devisa. Selain itu, penggunaan teknologi tinggi dalam pengelolaan migas yang memerlukan SDM yang terampil, yang tidak terdapat di daerah (SDM rendah) (Sjafrizal, 2008).



Gambar 4.3. Tren Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Tahun 2000 dengan dan tanpa Minyak Bumi di Provinsi Sumatera Utara

4.4. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Wilayah

Pada tabel 4.4. dapat dilihat laju pertumbuhan PDRB setiap wilayah pembangunan berbeda. Pada tahun 1988, laju pertumbuhan setiap wilayah Agropolitan sebesar 9.70 %, wilayah Agromarinetropolitan Pantai Barat 14.55 % dan wilayah Agromarinetropolitan Pantai Timur sebesar 11.72 %. Laju pertumbuhan bervariasi setiap tahunnya, kadang meningkat dan mengalami penurunan dan juga pernah mengalami laju pertumbuhan dengan angka 2 digit. Sementara pada tahun 2008, laju pertumbuhan setiap wilayah Agropolitan sebesar 4.89 %, wilayah Agromarinetropolitan Pantai Barat 5.89 % dan wilayah Agromarinetropolitan Pantai Timur sebesar 6.02 %.

Sementara dari rata-rata laju pertumbuhan PDRB masing-masing wilayah, menunjukkan bahwa wilayah Agropolitan memiliki nilai tertinggi sebesar 6.62 %, wilayah Agromarinetropolitan Pantai Timur sebesar 6.50 % dan wilayah Agromarinetropolitan Pantai Barat sebesar 6.33 %.

Sektor pertanian yang kuat dan karakteristik yang cenderung sama di wilayah Agropolitan membuat pertumbuhan perekonomian cenderung konstan, sedangkan wilayah Agromarinetropolitan Pantai Timur disebabkan karena di wilayah tersebut ada Kota Medan yang didalamnya terdapat kutub pertumbuhan industri. Sedangkan wilayah Agromarinetropolitan Pantai Barat disebabkan karena

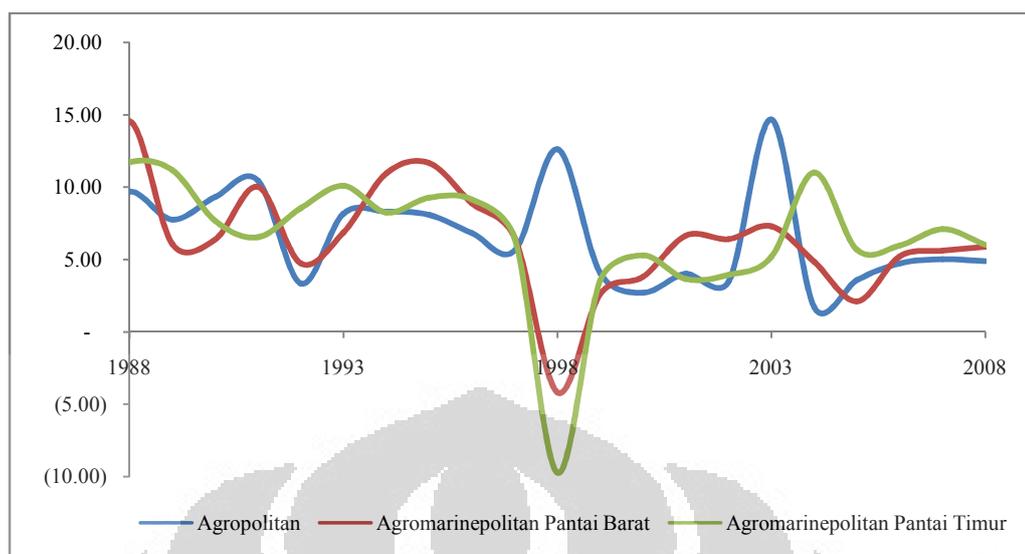
sarana dan prasarana yang belum memadai, disamping itu wilayah ini berbeda secara geografis sehingga menyulitkan dalam masalah infrastruktur dan transportasi.

Tabel 4.4. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Tahun 2000 menurut Wilayah

Tahun	Kawasan / Wilayah		
	Agropolitan	Agromarinepolitan	
		Pantai Barat	Pantai Timur
1987	-	-	-
1988	9.70	14.55	11.72
1989	7.76	6.06	11.16
1990	9.31	6.39	7.66
1991	10.44	10.02	6.53
1992	3.35	4.73	8.54
1993	8.17	6.86	10.09
1994	8.30	10.95	8.24
1995	8.08	11.66	9.26
1996	6.82	8.86	9.14
1997	5.62	6.50	6.48
1998	12.62	-4.19	-9.74
1999	4.04	2.60	3.55
2000	2.70	3.80	5.29
2001	4.02	6.65	3.66
2002	3.48	6.41	3.94
2003	14.67	7.30	5.19
2004	1.70	4.85	11.00
2005	3.59	2.10	5.66
2006	4.73	5.22	5.95
2007	5.01	5.62	7.10
2008	4.89	5.89	6.02
Rata-Rata	6.62	6.33	6.50

Sumber ; BPS, data diolah

Berdasarkan pada gambar 4.4. dapat dilihat semua wilayah mengalami fluktuasi laju pertumbuhan ekonomi yang hampir mirip antar wilayah satu dengan wilayah lainnya. Pada tahun 1998, wilayah Agromarinepolitan Pantai Timur sempat mengalami penurunan laju pertumbuhan ekonomi yang negatif dan kembali meningkat pada tahun berikutnya sampai pada tahun 2008 meninggalkan wilayah lainnya. Hal ini disebabkan sektor-sektor pembentuk PDRB wilayah tersebut cepat bangkit seperti sektor industri dan sektor perdagangan yang mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.



Gambar 4.4. Tren Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Tahun 2000 menurut Wilayah

4.5. Laju Pertumbuhan PDRB Sektoral Provinsi Sumatera Utara

PDRB sektoral adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan komponen pembentuk dari PDRB total dikarenakan laju Pertumbuhan PDRB sektoral sangat erat kaitannya dengan laju pertumbuhan PDRB total. Oleh sebab itu perlu diketahui laju pertumbuhan masing-masing sektor, sehingga dari pengamatan data pada tahun 1987-2008 dapat diketahui perkembangan dan pertumbuhan masing-masing sektor.

Sementara pada tabel 4.5. dapat dilihat bahwa tahun 1988, sektor pertanian dengan laju pertumbuhan sebesar 11.93 merupakan sektor dengan laju pertumbuhannya tinggi dan diikuti sektor lainnya dengan pertumbuhannya diatas 10 %. Sedangkan pada tahun 2008, laju pertumbuhan sektor pertanian mengalami perlambatan sebesar 4.66 % dan merupakan yang paling rendah dari semua sektor. Sedangkan sektor Keuangan memiliki laju pertumbuhannya tinggi dan diikuti sektor bangunan, sektor pengangkutan, dan sektor jasa-jasa. Sedangkan sektor lainnya melambat dengan laju pertumbuhan di bawah 7 %.

Sedangkan pada krisis ekonomi tahun 1998 sektor pertanian dan sektor penggalian mengalami laju pertumbuhan yang positif sedangkan sektor lainnya mengalami laju pertumbuhan yang negatif.

Tabel 4.5. Laju Pertumbuhan PDRB Sektoral ADHK Tahun 2000 di Provinsi Sumatera Utara

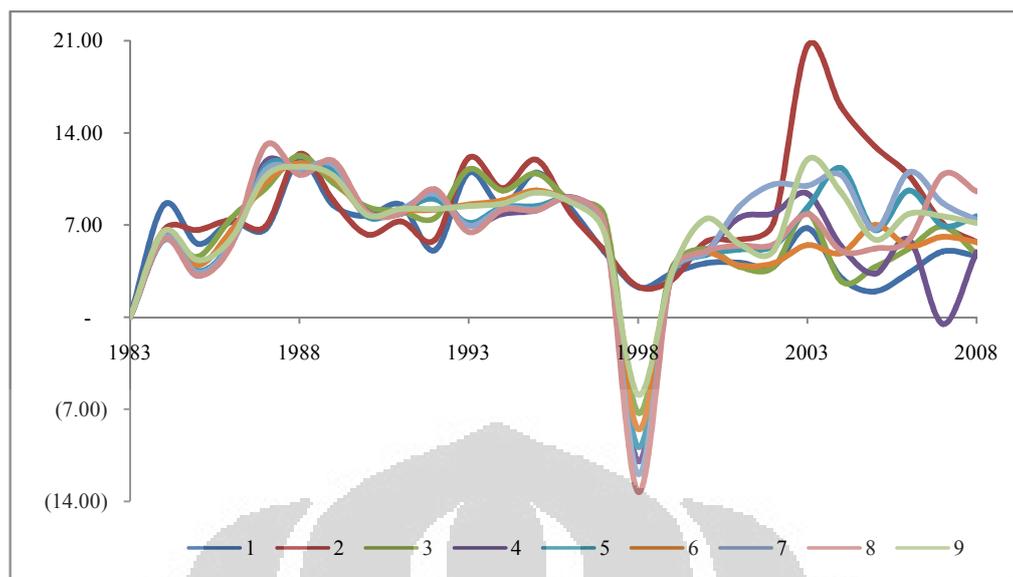
Tahun	Sektor-Sektor								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1987	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	11.93	12.39	12.25	11.03	11.45	11.68	11.23	10.82	11.43
1989	8.51	8.86	10.20	11.59	11.22	10.59	11.58	11.87	10.76
1990	7.68	6.28	8.37	8.05	7.63	7.85	7.84	8.00	7.77
1991	8.54	7.27	8.03	7.86	8.20	8.06	8.22	7.87	8.21
1992	5.08	5.87	7.52	9.32	8.97	8.18	9.36	9.71	8.22
1993	10.94	12.10	11.23	7.01	7.16	8.56	6.95	6.46	8.42
1994	8.42	9.79	9.61	7.84	8.35	8.87	8.24	8.15	8.63
1995	10.98	11.94	10.91	8.13	8.43	9.63	8.20	8.12	9.46
1996	8.28	7.93	8.80	9.12	8.97	8.79	9.00	9.10	8.75
1997	5.00	5.11	7.75	7.14	6.87	7.03	7.03	7.14	6.50
1998	2.27	2.31	-7.26	-10.94	-9.86	-8.49	-11.90	-13.27	-5.87
1999	3.32	2.84	3.71	3.51	3.25	3.45	3.37	3.38	3.36
2000	4.10	5.71	5.17	5.00	4.72	4.90	4.88	5.02	7.47
2001	4.14	5.88	3.82	7.57	5.15	3.93	8.40	5.43	5.56
2002	3.88	7.16	3.80	7.89	5.41	4.10	10.07	5.52	5.05
2003	6.76	20.58	7.93	9.38	8.31	5.46	9.99	7.83	11.97
2004	3.01	15.97	2.73	5.37	11.33	4.87	10.79	5.03	9.48
2005	1.95	12.98	3.80	3.30	6.61	7.00	6.66	5.22	5.88
2006	3.37	10.75	5.21	5.88	9.61	5.41	11.01	5.88	7.85
2007	5.00	7.13	6.89	-0.52	6.96	6.11	8.66	10.82	7.67
2008	4.66	5.69	4.79	4.95	7.65	5.70	7.39	9.55	7.16
Rata-rata	6.09	8.79	6.44	6.12	6.97	6.27	7.47	6.55	7.32

Sumber ; BPS, data diolah

Keterangan :

- 1 : Sektor Pertanian
- 2 : Sektor Penggalian
- 3 : Sektor Industri dan Pengolahan
- 4 : Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih
- 5 : Sektor Bangunan
- 6 : Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran
- 7 : Sektor Pengangkutan dan Komunikasi
- 8 : Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
- 9 : Sektor Jasa-Jasa

Berdasarkan pada gambar 4.5. dapat dilihat fluktuasi laju pertumbuhan sektoral dari tahun 1987-2008, namun pada tahun 1988 semua sektor saling berhimpitan pada kisaran angka 10.82% - 12.92%. Pada grafik juga terlihat tahun 1998, krisis ekonomi menyebabkan banyak sektor mengalami perlambatan laju pertumbuhan. Sektor pertanian sebagai pembentuk PDRB Total terbesar, pada tahun 2005 mengalami laju pertumbuhannya yang lambat sebesar 1.95 % dengan grafik menurun tajam, namun pada tahun berikutnya sampai tahun 2008 kembali melaju dengan pertumbuhan 4.66%.



Gambar 4.5. Tren Laju Pertumbuhan PDRB Sektoral Provinsi Sumatera Utara

4.6. Laju Pertumbuhan PDRB Sektoral Menurut Wilayah

Struktur ekonomi suatu wilayah sangat ditentukan oleh besarnya peranan sektor-sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing sektor menggambarkan ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari masing-masing sektor.

Berikut kita akan melihat laju pertumbuhan sektor-sektor pembentuk PDRB wilayah menurut wilayahnya :

4.6.1. Wilayah Agropolitan

Berdasarkan tabel 4.6. dapat dilihat bahwa tahun 1988, semua sektor menunjukkan laju pertumbuhan yang tinggi, hal ini ditandai dengan nilai diatas 10% yaitu sektor listrik (10.16%), sektor bangunan (10.44%), sektor perdagangan (10.18%), sektor pengangkutan (10.62%), sektor jasa keuangan (10,58%). Sedangkan yang dibawah 10% adalah sektor sektor pertanian (9.20%), sektor penggalian (9.40%), sektor industri (9.47%) dan jasa-jasa (9.96%). Sementara pada tahun 2008, laju pertumbuhan sektor pertanian mengalami melambat sebesar 4.23 % diatas sektor industri dengan nilai sebesar 3.19%, sedangkan sektor jasa-jasa (8.56%) merupakan yang paling tinggi laju pertumbuhannya.

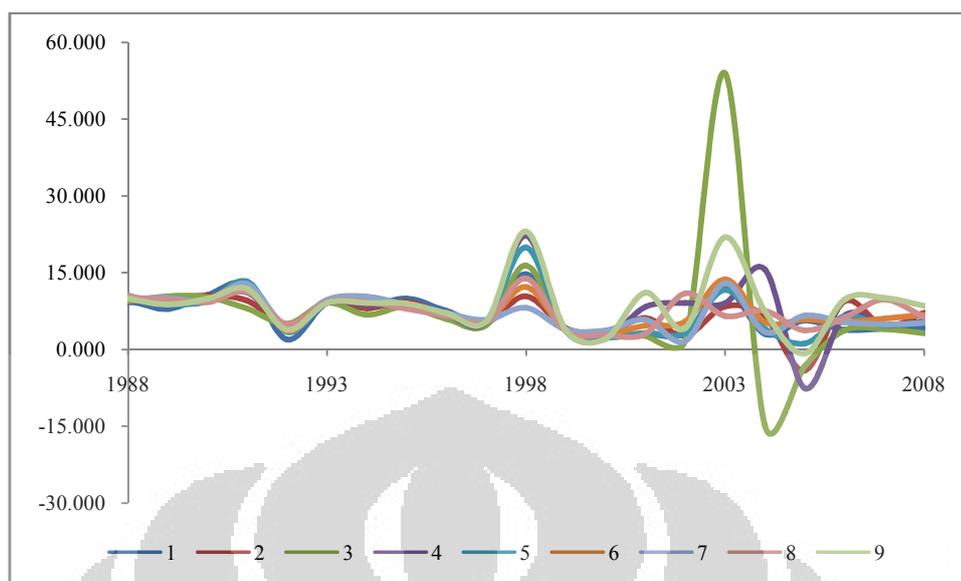
Tabel 4.6. Laju Pertumbuhan PDRB Sektoral ADHK Tahun 2000 di Wilayah Agropolitan Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Sektor								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1987	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	9.20	9.40	9.47	10.16	10.44	10.18	10.62	10.58	9.96
1989	7.93	9.71	10.44	9.21	8.94	9.28	10.13	9.80	8.78
1990	10.64	10.55	10.24	9.60	9.41	9.74	9.55	9.26	9.90
1991	12.71	9.52	7.96	11.14	13.28	12.51	12.77	11.26	11.86
1992	1.97	4.69	5.03	4.37	3.41	3.62	4.67	5.00	3.89
1993	9.09	9.20	9.14	9.11	9.35	9.41	9.76	9.29	9.13
1994	8.31	8.06	6.79	8.81	9.62	9.28	10.35	9.32	9.12
1995	9.99	9.36	8.38	8.39	8.50	8.77	8.71	7.98	8.99
1996	7.57	6.76	5.96	6.76	7.14	7.06	7.09	6.61	7.14
1997	5.51	5.28	4.75	5.38	5.63	5.56	5.80	5.44	5.57
1998	14.74	10.44	16.42	22.31	19.96	12.22	8.17	13.91	23.07
1999	4.13	4.19	3.90	3.69	3.66	3.85	3.92	3.65	3.82
2000	2.79	3.25	2.49	2.10	2.39	3.11	3.73	2.87	2.12
2001	3.08	6.14	2.67	8.34	3.25	4.70	5.81	3.11	11.10
2002	3.20	2.73	1.72	9.10	3.26	5.49	1.67	10.98	4.18
2003	11.90	8.40	53.98	9.06	11.64	13.73	12.99	6.54	21.97
2004	3.05	6.42	- 14.85	15.65	4.08	5.37	3.42	7.56	7.50
2005	5.68	- 4.13	- 3.32	- 7.54	1.20	5.88	6.63	3.77	- 0.82
2006	3.88	9.42	3.75	6.64	6.47	5.40	5.38	6.25	9.72
2007	4.13	4.49	3.99	4.76	4.75	6.06	4.92	9.80	10.10
2008	4.23	7.25	3.19	5.53	5.26	6.80	5.23	6.39	8.56
Rata-Rata	6.84	6.72	7.24	7.74	7.22	7.53	7.21	7.59	

Sumber ; BPS, data diolah

Sementara pada tahun 1998, saat terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, PDRB Sektoral wilayah Agropolitan tidak terkena imbasannya, dengan laju pertumbuhan yang positif dan cenderung tinggi.

Berdasarkan pada gambar 4.6. dapat dilihat fluktuasi laju pertumbuhan sektoral dari tahun 1988-2008, semua sektor seakan berhimpitan dan cenderung bergerak ke arah yang sama.. Pada grafik dapat dilihat pada tahun 1999-2000 semua sektor mengalami perlambatan karena belum mempunyai sektor untuk bangkit dari terjadinya krisis ekonomi, namun demikian pada tahun 2005 ada empat sektor yang mengalami laju pertumbuhan negatif yaitu sektor penggalian, sektor industri dan pengolahan, sektor listik, gas dan air serta sektor jasa-jasa.



Gambar 4.6. Tren Laju Pertumbuhan PDRB Sektoral Wilayah Agropolitan Provinsi Sumatera Utara

4.6.2. Wilayah Agromarinepolitan Pantai Barat

Berdasarkan tabel 4.7. dapat dilihat bahwa tahun 1988, pada sektor pertanian (14.84%) dan sektor penggalian (11.09%), sektor industri (18.12%), sektor listrik (13.05%), sektor bangunan (13.53%), sektor perdagangan (13.36%), sektor pengangkutan (13.12%), sektor keuangan sebesar (12.94%) dan sektor jasa-jasa (14,22%). Sementara pada tahun 2008, laju pertumbuhan sektor pertanian mengalami melambat sebesar 5.32 % diatas sektor industri dengan nilai sebesar 4.24%, sedangkan sektor bangunan (9.48%) merupakan yang paling tinggi laju pertumbuhannya. Sementara pada tahun 1998, saat terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, ada 5 sektor yang terkena imbasannya sampai mengalami pertumbuhan yang negatif (melambat) yaitu sektor industri (-24.87%), sektor listrik (-6.45%), sektor perdagangan (-0.85%), sektor pengangkutan (-6%), sektor keuangan (-8.69) dan sektor jasa-jasa (-6.47).

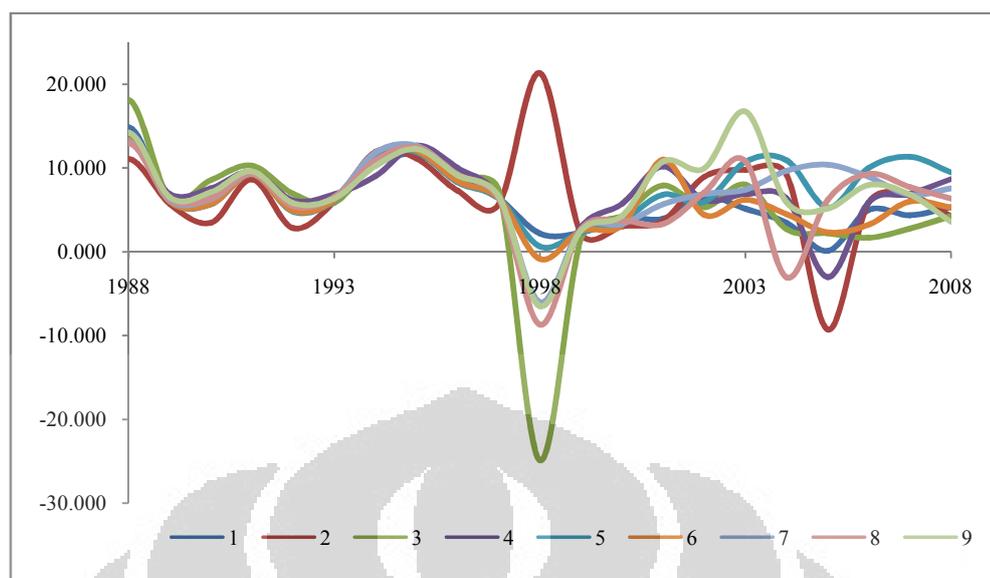
Sektor pertanian dan sektor bangunan mengalami fluktuasi pertumbuhan ekonomi sepanjang tahunnya namun kedua sektor tersebut tidak sampai mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif walaupun ada terjadinya perlambatan pada tahun-tahun tertentu.

Tabel 4.7. Laju Pertumbuhan PDRB Sektoral ADHK Tahun 2000 di Wilayah Agromarinepolitan Pantai Barat Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Sektor								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1987	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	14.84	11.09	18.12	13.05	13.53	13.36	13.12	12.94	14.22
1989	6.05	5.71	6.40	6.90	6.00	5.98	6.11	6.31	6.49
1990	6.58	3.47	8.57	7.57	5.67	5.70	6.27	6.38	7.10
1991	9.43	8.65	10.27	9.55	9.29	9.26	9.29	9.32	9.61
1992	5.28	2.82	6.95	6.13	4.80	4.90	5.53	5.43	5.81
1993	6.30	5.96	5.85	6.84	6.09	6.18	6.51	6.54	6.37
1994	10.37	11.93	10.90	9.03	11.69	11.87	11.85	10.94	10.25
1995	11.64	11.11	12.12	12.69	11.88	12.05	12.65	12.47	12.25
1996	8.74	7.29	8.80	10.03	8.30	8.46	9.20	9.23	9.16
1997	6.37	5.65	7.37	6.47	6.40	6.39	6.46	6.39	6.63
1998	2.19	21.35	-24.87	-6.45	0.65	-0.85	-6.00	-8.69	-6.47
1999	2.29	2.24	1.57	2.95	2.29	2.49	2.67	2.70	2.53
2000	4.10	3.04	4.30	5.76	3.77	3.19	3.34	3.68	4.30
2001	3.94	3.70	7.91	10.19	6.82	11.00	5.65	3.32	10.79
2002	6.62	8.93	5.33	6.17	5.94	4.42	6.89	7.06	9.96
2003	5.13	9.78	8.03	6.88	10.76	6.20	7.42	10.80	16.74
2004	3.48	9.19	2.68	6.35	10.92	4.48	9.66	-3.04	5.92
2005	0.12	-9.27	2.20	-3.02	5.29	2.33	10.40	6.22	5.17
2006	4.99	5.85	1.67	5.92	10.02	3.23	8.93	9.31	7.97
2007	4.36	6.71	2.78	6.92	11.34	5.99	6.82	7.75	6.86
2008	5.32	4.28	4.24	8.69	9.48	5.30	7.57	6.36	3.59
	6.10	6.64	5.29	6.60	7.66	6.28	7.16	6.25	

Sumber ; BPS, data diolah

Berdasarkan pada gambar 4.7. dapat dilihat fluktuasi laju pertumbuhan sektoral dari tahun 1988-2008, pada tahun 1988, sembilan sektor dengan laju pertumbuhan yang tinggi, kemudian mengalami penurunan dan meningkat kembali secara bersamaan pada tahun 1994 dan 1995. Pada tahun 1988 terlihat sektor pengolahan mengalami pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Disamping itu, krisis ekonomi juga menyebabkan banyak sektor mengalami perlambatan laju pertumbuhan yang tajam yaitu sektor industri (-24.87%). Sementara pada tahun 2006-2008 perekonomian daerah mulai membaik sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi meningkat kembali.



Gambar 4.7. Tren Laju Pertumbuhan PDRB Sektoral Wilayah Agromarine politan Pantai Barat Provinsi Sumatera Utara

4.6.3. Wilayah Agromarinepolitan Pantai Timur

Berdasarkan tabel 4.8. dapat dilihat bahwa tahun 1988, pada sektor pertanian (12.50%) dan sektor penggalian (10.58%), sektor industri (12.05%), sektor listrik (11.04%), sektor bangunan (11.29%), sektor perdagangan (11.65%), sektor pengangkutan (11.17%), sektor keuangan sebesar (10.70%) dan sektor jasa-jasa (11,65%). Sementara pada tahun 2008, laju pertumbuhan sektor pertanian mengalami melambat sebesar 4.74 % diatas sektor industri dengan pertumbuhan negatif sebesar -0.39%, sedangkan sektor keuangan (10.05%) merupakan yang paling tinggi laju pertumbuhannya. Sementara pada tahun 1998, saat terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, semua sektor terkena imbasannya sampai mengalami pertumbuhan yang negatif (melambat) yaitu sektor pertanian (-3.87%), sektor penggalian (-1.63%), sektor industri (-7.56%), sektor listrik (-14.13%), sektor bangunan (-14.49%), sektor perdagangan (-11.22%), sektor pengangkutan (-14.99%), sektor keuangan (-15.45) dan sektor jasa-jasa (-12.25).

Semua sektor mengalami fluktuasi pertumbuhan ekonomi yang beragam di wilayah Agromarinepolitan Pantai Timur, jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan selama kurun waktu 21 tahun, sektor industri (6.51 %) lebih tinggi dari sektor pertanian (5.70%) sedangkan yang paling rendah yaitu sektor penggalian (2.26%).

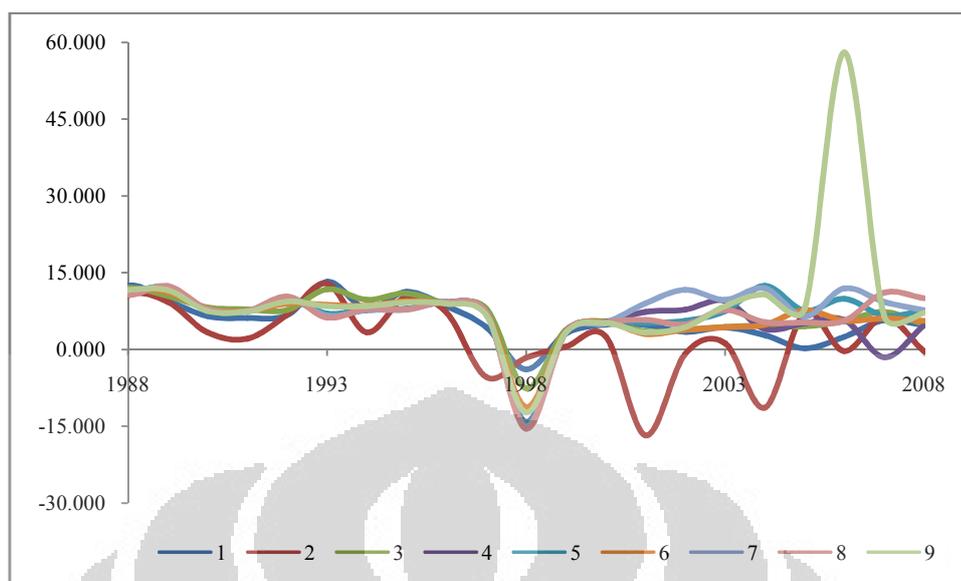
Tabel 4.8. Laju Pertumbuhan PDRB Sektoral ADHK Tahun 2000 di Wilayah Agromarinepolitan Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Sektor								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1987	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	12.50	10.58	12.05	11.04	11.29	11.65	11.17	10.70	11.65
1989	9.52	9.32	10.46	11.99	12.19	11.22	12.17	12.38	11.57
1990	6.54	3.39	8.22	7.92	7.68	7.89	7.73	8.01	7.52
1991	6.17	2.14	7.88	7.49	7.50	7.51	7.55	7.54	7.43
1992	6.71	6.81	7.75	9.91	10.16	8.98	10.27	10.32	9.37
1993	13.23	12.92	11.77	6.83	7.05	8.72	6.62	6.26	8.47
1994	7.96	3.36	9.72	7.70	7.80	8.54	7.72	7.90	8.49
1995	11.29	10.32	11.00	7.94	7.99	9.47	7.82	7.86	9.25
1996	8.50	7.22	8.99	9.31	9.27	8.99	9.25	9.27	8.95
1997	4.37	-5.36	7.98	7.33	7.06	7.23	7.23	7.31	6.71
1998	-3.87	-1.63	-7.56	-14.13	-14.49	-11.22	-14.99	-15.45	-12.25
1999	3.14	0.54	3.82	3.51	3.33	3.50	3.33	3.41	3.29
2000	4.89	2.57	5.56	5.35	5.22	5.30	5.20	5.31	5.14
2001	4.82	-16.75	3.57	7.37	5.19	3.07	9.05	5.79	3.34
2002	3.48	-0.84	3.87	7.81	5.64	3.89	11.68	4.93	4.40
2003	4.31	1.24	4.43	9.53	7.46	4.37	9.73	7.75	8.47
2004	2.84	-11.33	4.70	4.02	12.48	4.85	11.99	5.35	10.77
2005	0.24	7.27	4.54	5.11	7.60	7.72	6.41	5.29	7.93
2006	2.52	-0.29	5.53	5.78	9.92	5.65	11.95	5.62	58.02
2007	5.77	6.33	7.36	-1.48	6.59	6.13	9.28	11.12	6.53
2008	4.74	-0.39	4.95	4.72	7.67	5.60	7.65	10.05	7.16
	5.70	2.26	6.51	5.96	6.89	6.15	7.56	6.51	

Sumber ; BPS, data diolah

Berdasarkan pada gambar 4.8. dapat dilihat fluktuasi laju pertumbuhan sektoral selama kurun waktu 21 tahun, pada tahun 1988 sembilan sektor dengan laju pertumbuhan yang tinggi dan kemudian mengalami fluktuasi pertumbuhan dengan angka diatas 6% sampai dengan tahun 1996 dimana sektor pertanian masih menjadi penopang utama dalam pembentukan PDRB.

Pada wilayah Agromarinepolitan Pantai Timur mengalami perbedaan dengan kedua wilayah sebelumnya dikarenakan pada gambar 4.6 dapat kita lihat pada tahun 1998, saat terjadinya krisis ekonomi, berdampak terhadap semua sektor yang membentuk PDRB wilayah tersebut. Hal ini ditandai dengan kurva semua sektor berada dibawah dengan nilai negatif. Disamping itu, krisis ekonomi juga menyebabkan banyak sektor mengalami perlambatan laju pertumbuhan yang tajam yaitu sektor industri (-15.45%). Namun sektor ini mulai kembali meningkat tajam pada tahun 2006 dengan pertumbuhan yang sangat tinggi pada kurva industri meninggalkan sektor lainnya.



Gambar 4.8. Tren Laju Pertumbuhan PDRB Sektoral Wilayah Agromarine politan Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara

4.7. Peranan PDRB Sektoral Menurut Wilayah Terhadap PDRB Total

Besarnya nilai PDRB yang dihasilkan oleh setiap Kabupaten/Kota selain tergantung dari investasi yang ditanamkan di masing-masing daerah, juga sangat dipengaruhi sumber daya alam dan sumber daya manusia daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan tabel 4.9., diperoleh hasil analisa dari PDRB menurut Kabupaten/Kota rata-rata PDRB ADHK Tahun 2000 di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 1987-2008, pada sektor pertanian mempunyai peranan besar di wilayah Agropolitan (8.03%) dan Agromarinepolitan Pantai Barat (4.16%) dikarenakan sektor pertanian merupakan sumber daya alam sebagai penopang utama dalam pembentukan PDRB Total di kedua wilayah tersebut. Namun pada wilayah Agromarinepolitan Pantai Timur yang mempunyai peranan besar adalah sektor Industri sebesar 19.95%. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Medan merupakan kutub dari pertumbuhan Provinsi Sumatera Utara disebabkan adanya Kawasan Industri Medan dan Deli Serdang. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.9. Peranan PDRB Sektoral (%) ADHK Tahun 2000 Menurut Wilayah Terhadap Total PDRB (1987-2008)

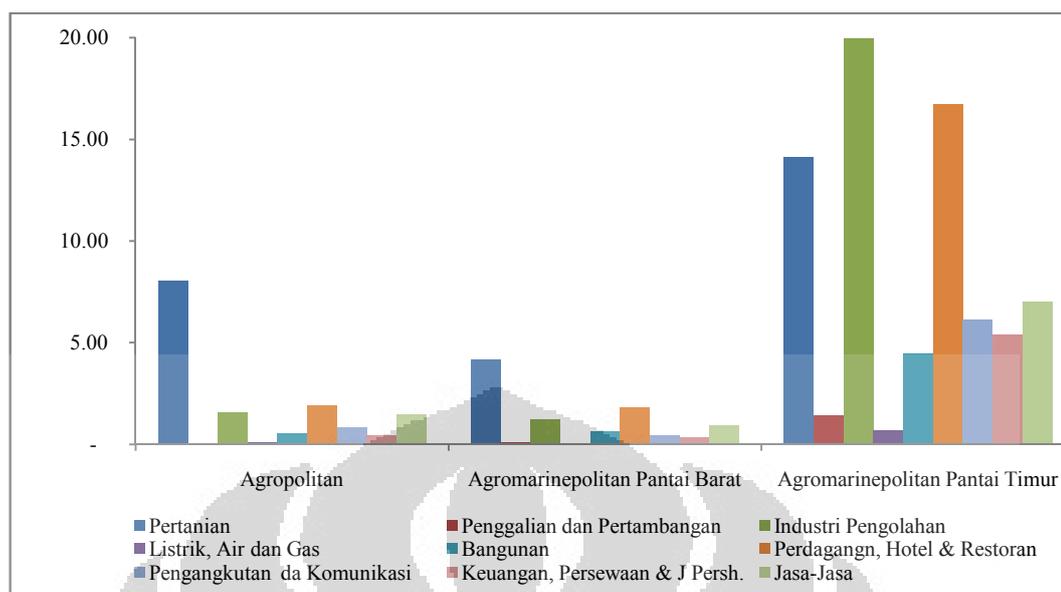
No	Sektor	Kawasan / Wilayah		
		Agropolitan	Agromarinepolitan	
			Pantai Barat	Pantai Timur
1	Pertanian	8.03	4.16	14.12
2	Penggalian dan Pertambangan	0.04	0.10	1.43
3	Industri Pengolahan	1.57	1.23	19.95
4	Listrik, Air dan Gas	0.08	0.03	0.69
5	Bangunan	0.57	0.63	4.45
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	1.91	1.83	16.69
7	Pengangkutan dan Komunikasi	0.85	0.44	6.12
8	Keuangan, Persewaan & J Persh.	0.45	0.35	5.41
9	Jasa-Jasa	1.49	0.96	7.01
	Total	14.98	9.72	75.87

Sumber ; BPS, data diolah

Jika dilihat dari tabel 4.9., sektor penggalian mempunyai peran yang kecil pada wilayah Agropolitan sebesar 0.04 % dan pada wilayah Agromarinepolitan Pantai Barat sebesar 0.01%, sedangkan pada wilayah Agromarinepolitan Pantai Timur yang mempunyai kontribusi kecil terhadap PDRB total adalah sektor Listrik, Air dan Gas sebesar 0.69%. Secara keseluruhan Agromarinepolitan Pantai Timur mempunyai peranan yang besar dibanding kedua wilayah lainnya dengan peranan sebesar 75,87% terhadap PDRB total, kemudian wilayah Agropolitan sebesar 14.98% dan Agromarinepolitan Pantai Barat sebesar 9.72%.

Hal ini dikarenakan adanya perbedaan potensi ekonomi antar Kabupaten/Kota yang satu dengan lainnya. Secara keseluruhan Medan sebagai ibukota Provinsi, umumnya masih mendominasi dalam pembentukan NTB sektoralnya di Sumatera Utara, khususnya sektor sekunder dan tersier.(BPS, 2010)

Dari gambar 4.9., dapat dilihat sektor pertanian pada masing-masing wilayah mempunyai peranan sektor yang tinggi sebagai pembentuk PDRB Total, kecuali di wilayah Agromarinepolitan Pantai Timur yang mendominasi adalah sektor industri dikarenakan banyaknya hasil pertanian khususnya perkebunan di Kabupaten Deli Serdang. Kemudian sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor yang kontribusi yang besar terhadap wilayah sebagai pembentuk PDRB total dan kemudian diikuti oleh sektor-sektor lainnya.



Gambar 4.8. Peranan PDRB Sektoral (%) ADHK Tahun 2000 Menurut Wilayah Terhadap Total PDRB (1987-2008)

4.8. Peranan PDRB Wilayah Terhadap Pembentukan PDRB Total

Pada tahun 2008, Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 28 Kabupaten/Kota dan sejalan dengan perkembangannya telah terjadi pemekaran dan pelaksanaan otonomi daerah pada tahun 2001, Pemerintah Provinsi mempunyai program pengembangan kawasan untuk meningkatkan kerjasama antar daerah yang memiliki karakteristik yang hampir sama, terutama pada sektor pertanian dengan 3 wilayah pembangunan.

Ketiga wilayah tersebut memiliki peranan yang berbeda dalam pembentukan PDRB total, hal ini dipengaruhi oleh keberadaan potensi sumber daya alam yang dimiliki wilayah, letak geografis, keberadaan sarana dan prasarana dan kondisi lainnya yang terdapat pada wilayah tersebut.

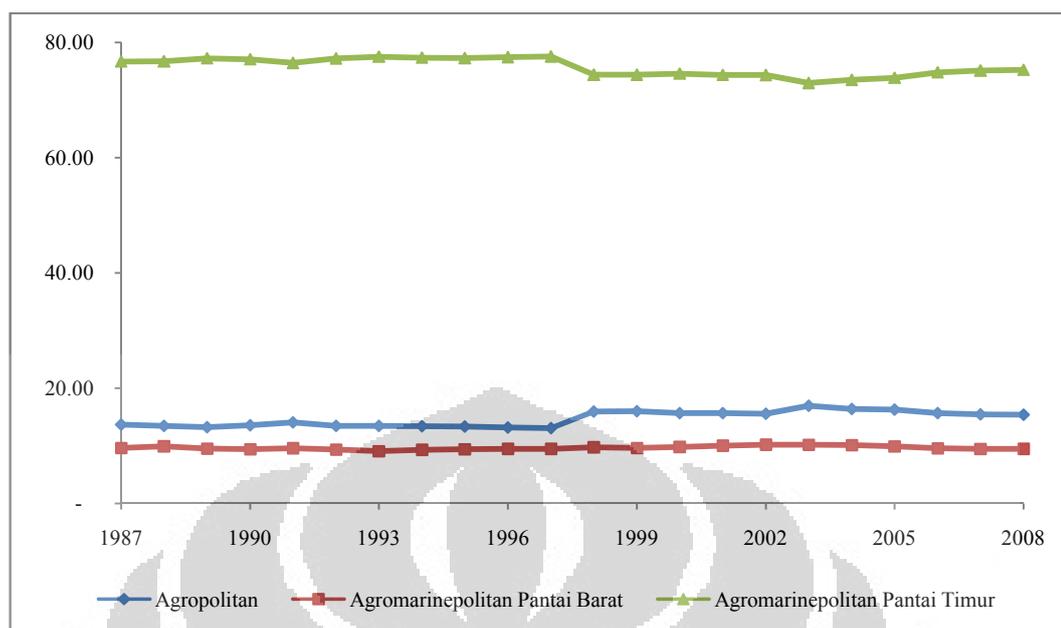
Berdasarkan tabel 4.10., diperoleh hasil analisa dari PDRB menurut wilayah pembangunan rata-rata peranan wilayah terhadap pembentukan PDRB Total ADHK Tahun 2000 di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 1987-2008, didominasi oleh wilayah Agromarinepolitan Pantai Timur dengan peranan sebesar 75.71%, diikuti di wilayah Agropolitan sebesar 14.66% dan wilayah Agromarinepolitan Pantai Barat sebesar 9.63%. Peranan masing-masing wilayah cenderung konstan sebagai pembentuk PDRB total.

Tabel 4.10. Peranan PDRB Wilayah Terhadap Pembentukan PDRB Total Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Kawasan / Wilayah		
	Agropolitan	Agromarinepolitan	
		Pantai Barat	Pantai Timur
1987	13.68	9.64	76.68
1988	13.42	9.88	76.70
1989	13.24	9.52	77.24
1990	13.54	9.41	77.05
1991	14.04	9.53	76.43
1992	13.46	9.36	77.19
1993	13.42	9.08	77.50
1994	13.41	9.26	77.34
1995	13.33	9.42	77.25
1996	13.15	9.43	77.42
1997	13.03	9.44	77.53
1998	15.92	9.72	74.36
1999	16.01	9.62	74.37
2000	15.68	9.75	74.57
2001	15.67	9.98	74.34
2002	15.53	10.16	74.32
2003	16.92	10.16	72.92
2004	16.40	10.12	73.48
2005	16.26	9.89	73.85
2006	15.65	9.55	74.80
2007	15.46	9.46	75.08
2008	15.35	9.42	75.22
Rata-Rata	14.66	9.63	75.71

Sumber ; BPS, data diolah

Dari gambar 4.10., dapat dilihat selama kurun waktu 22 tahun (1987-2008), wilayah Agromarinepolitan Pantai Timur mempunyai peranan yang besar sebagai Pembentuk PDRB Total, diikuti wilayah Agropolitan dan wilayah Agromarinepolitan Pantai Barat. Hal ini disebabkan adanya Kota Medan sebagai pusat pertumbuhan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Asahan sebagai penyumbang tertinggi dari sektor Industri dan Pengolahan sebagai pembentuk PDRB total.



Gambar 4.10. Peranan PDRB Wilayah Terhadap Pembentukan PDRB Total Provinsi Sumatera Utara (1987-2008)

4.9. Pertumbuhan Pendapatan/Kapita dan Jumlah Penduduk di Provinsi Sumatera Utara

Pertumbuhan pendapatan perkapita sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB dan pertumbuhan jumlah penduduk. Diharapkan pertumbuhan PDRB selalu lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk agar diperoleh pertumbuhan pendapatan perkapita yang tinggi. Sedangkan jumlah penduduk erat kaitannya dengan jumlah kelahiran, kematian, imigrasi dan emigrasi.

Berikut tabel 4.11. dapat dilihat Pertumbuhan Pendapatan/Kapita dan Jumlah Penduduk di Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu 1987-2008.

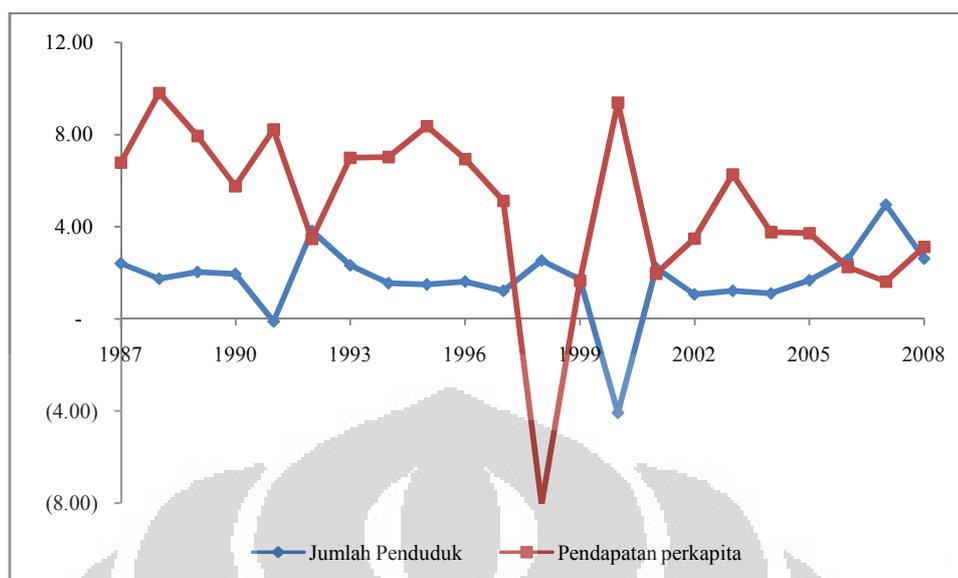
Tabel 4.11. Pertumbuhan Pendapatan/Kapita ADHK Tahun 2000 dan Jumlah Penduduk di Provinsi Sumatera Utara (1987-2008)

Tahun	PDRB		%	Pendapatan	
	Non Minyak Bumi	Jumlah Penduduk		perkapita	%
1987	28,476,096.68	9,627,815	-	3,011,223.43	-
1988	31,822,438.14	9,795,384	1.74	3,306,683.86	9.81
1989	35,051,834.94	9,995,019	2.04	3,568,980.67	7.93
1990	37,823,734.25	10,189,755	1.95	3,774,532.78	5.76
1991	40,924,068.88	10,178,034	- 0.12	4,084,366.71	8.21
1992	43,970,430.40	10,567,450	3.83	4,226,271.33	3.47
1993	48,120,038.13	10,813,400	2.33	4,521,967.47	7.00
1994	52,343,894.93	10,981,100	1.55	4,839,174.87	7.01
1995	57,575,176.65	11,145,300	1.50	5,244,320.81	8.37
1996	62,582,443.18	11,325,900	1.62	5,608,214.05	6.94
1997	66,719,725.30	11,463,400	1.21	5,895,800.60	5.13
1998	62,860,209.31	11,754,100	2.54	5,420,894.51	- 8.05
1999	65,024,588.74	11,955,400	1.71	5,510,675.41	1.66
2000	68,247,296.12	11,468,104	- 4.08	6,028,407.53	9.40
2001	71,382,460.07	11,722,395	2.22	6,147,138.65	1.97
2002	74,711,935.46	11,847,076	1.06	6,361,525.55	3.49
2003	80,459,824.51	11,990,399	1.21	6,760,644.32	6.27
2004	84,599,062.23	12,123,360	1.11	7,014,803.97	3.76
2005	88,540,007.80	12,326,678	1.68	7,275,901.31	3.72
2006	93,698,970.68	12,643,494	2.57	7,440,375.68	2.26
2007	99,937,188.36	13,269,631	4.95	7,560,800.06	1.62
2008	105,812,896.93	13,616,230	2.61	7,797,373.38	3.13
			1.68		4.71

Sumber : BPS, data diolah

Berdasarkan tabel 4.11., dapat dilihat pada tahun 1987, pendapatan perkapita sebesar 3,011,223.43 dengan jumlah penduduk sebanyak 9,627,815, sementara pada tahun 1988 diperoleh hasil laju pertumbuhan pendapatan perkapita sebesar 9.81% lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1.74%, ini menunjukkan bahwa pendapatan perkapita di Provinsi Sumatera Utara cukup tinggi. Dan selama 22 tahun dapat dikatakan pertumbuhan pendapatan perkapita lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk.

Pendapatan perkapita mengalami penurunan laju pertumbuhan cukup tajam pada tahun 1998 yang dikarenakan adanya krisis moneter dengan dengan angka sebesar 8.05%, hal ini disebabkan karena sektor industri dan jasa aktivitas ekonominya berkurang total, akibatnya tidak ada NTB yang diberikan terhadap perekonomian daerah.



Gambar 4.11. Tren Pertumbuhan Pendapatan/Kapita ADHK Tahun 2000 dan Jumlah Penduduk di Provinsi Sumatera Utara (1987-2008)

Dari gambar 4.11., dapat dilihat dalam kurun waktu 22 tahun, pertumbuhan perkapita lebih cepat setiap tahunnya dibanding dengan laju pertumbuhan penduduk dimana kurva pertumbuhan perkapita selalu diatas pertumbuhan penduduk, kecuali pada tahun 1998 saat krisis ekonomi dan pada tahun 2008 besaran persentase pertumbuhan keduanya cenderung kecil.

4.10. Distribusi Jumlah Penduduk Menurut Wilayah di Provinsi Sumatera Utara (1987-2008)

Persoalan migrasi penduduk adalah merupakan masalah yang kompleks dan masih belum bisa diatasi. Kepadatan penduduk yang tinggi pada wilayah tertentu mengakibatkan makin mengecilnya luas pemilikan tanah pertanian bagi para petani. Sementara itu masih banyaknya tanah kosong pada wilayah tertentu di Kabupaten/Kota yang belum dimanfaatkan secara optimal biasanya dikarenakan kekurangan tenaga kerja.

Berdasarkan tabel 4.12., dapat dilihat pada tahun 1987, dapat dilihat distribusi penduduk menurut wilayah di Provinsi Sumatera Utara sudah terjadi ketimpangan yang cukup besar dengan persentase wilayah Agromarinepolitan Pantai Timur cenderung mendominasi sebesar 59.43% dari penduduk total Provinsi Sumatera Utara. Kemudian wilayah Agropolitan sebesar 22.76% dan

wilayah Agromarinepolitan Pantai Barat sebesar 17.81%. Sementara pada tahun 2008, wilayah Agropiltan cenderung menurun setiap tahunnya menjadi 19.11%, sedangkan wilayah Agromarinepolitan Pantai Timur semakin mendominasi sebesar 62.64 %, sedangkan wilayah Agromarinepolitan Pantai Barat cenderung mendekati persentase wilayah Agropolitan sebesar 18.25 %.

Tabel 4.12. Distribusi Jumlah Penduduk Menurut Wilayah di Provinsi Sumatera Utara (1987-2008)

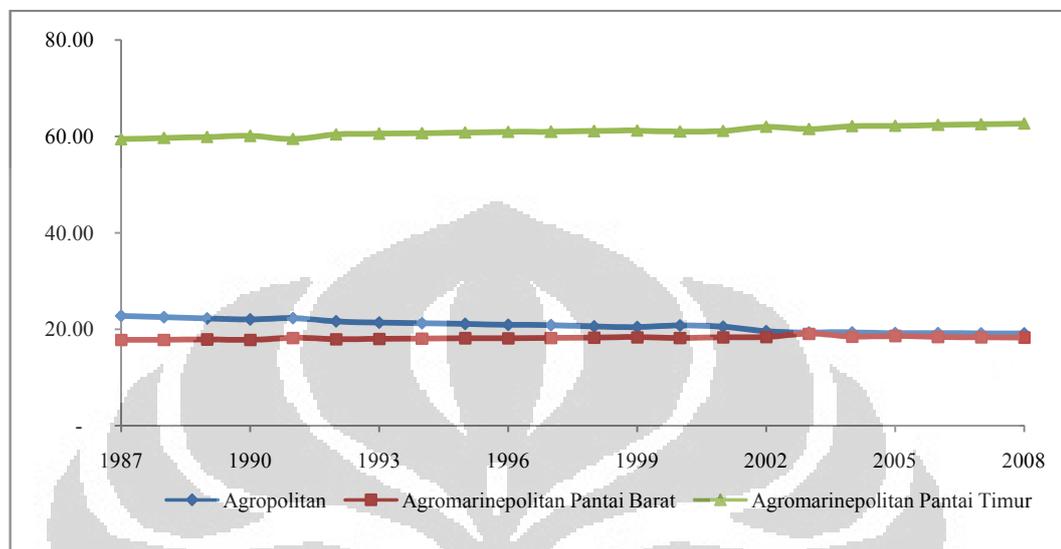
Tahun	Kawasan / Wilayah					
	Agropolitan	%	Agromarinepolitan			
			Pantai Barat	%	Pantai Timur	%
1987	2,190,836	22.76	1,715,168	17.81	5,721,811	59.43
1988	2,202,406	22.48	1,747,210	17.84	5,845,768	59.68
1989	2,225,144	22.26	1,785,892	17.87	5,983,983	59.87
1990	2,249,012	22.07	1,818,094	17.84	6,122,649	60.09
1991	2,269,500	22.30	1,856,584	18.24	6,051,950	59.46
1992	2,287,850	21.65	1,895,800	17.94	6,383,800	60.41
1993	2,316,000	21.42	1,948,300	18.02	6,549,100	60.56
1994	2,334,100	21.26	1,985,000	18.08	6,662,000	60.67
1995	2,352,100	21.10	2,020,300	18.13	6,772,900	60.77
1996	2,370,200	20.93	2,055,300	18.15	6,900,400	60.93
1997	2,387,800	20.83	2,089,100	18.22	6,986,500	60.95
1998	2,422,500	20.61	2,151,700	18.31	7,179,900	61.08
1999	2,444,000	20.44	2,195,200	18.36	7,316,200	61.20
2000	2,384,828	20.80	2,088,240	18.21	6,995,036	61.00
2001	2,406,159	20.53	2,150,253	18.34	7,165,983	61.13
2002	2,320,005	19.58	2,183,889	18.43	7,343,182	61.98
2003	2,321,900	19.36	2,289,845	19.10	7,378,654	61.54
2004	2,347,623	19.36	2,243,183	18.50	7,532,554	62.13
2005	2,367,572	19.21	2,292,143	18.59	7,666,963	62.20
2006	2,430,555	19.22	2,327,656	18.41	7,885,283	62.37
2007	2,459,901	19.17	2,353,655	18.34	8,020,815	62.49
2008	2,492,077	19.11	2,380,096	18.25	8,170,144	62.64

Sumber ; BPS, data diolah

Hal ini disebabkan adanya Kota Medan yang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara dan sebagai kutub pertumbuhan dan Deli Serdang sebagai penyangganya. Wilayah yang berpenduduk padat biasanya merupakan wilayah yang sudah lama terbentuk dan berkembang.

Wilayah yang padat penduduknya biasanya terkonsentrasi pada daerah-daerah yang mempunyai aktivitas perekonomian yang tinggi, wilayah kota yang

memiliki sarana dan prasarana yang lengkap, tempat dimana barang dan jasa banyak ditemukan dan juga memberikan banyak lapangan pekerjaan dengan tingkat upah yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang aktivitas ekonominya belum berkembang.



Gambar 4.12. Distribusi Jumlah Penduduk Menurut Wilayah di Provinsi Sumatera Utara (1987-2008)

Dari gambar 4.12., dapat dilihat persentase jumlah penduduk di wilayah Agromarinepolitian Pantai Timur jauh berada diatas melebihi wilayah Agropolitan dan wilayah Agromarinepolitian Pantai Barat, sedangkan pada tahun 2002-2008, wilayah Agropolitan dan wilayah Agromarinepolitian Pantai Barat cenderung berhimpitan.

Tinggi rendahnya jumlah penduduk dan pertumbuhan PDRB dalam suatu wilayah akan sangat mempengaruhi besar kecilnya pendapatan perkapita wilayah tersebut. Untuk mencapai pendapatan perkapita yang tinggi, pada umumnya daerah selalu mengusahakan agar pertumbuhan ekonomi daerah lebih tinggi dengan menekan laju pertumbuhan jumlah penduduk daerah tersebut. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, masih menghasilkan pendapatan perkapita yang cukup tinggi, yang perlu mendapat perhatian adalah apabila laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi daripada laju pertumbuhan ekonomi, inilah yang kemudian akan menyebabkan rendahnya pendapatan perkapita daerah.

4.11. Distribusi Pendapatan Perkapita Menurut Wilayah

Pada tabel 4.13. pada tahun 1987 dapat dilihat bahwa wilayah Agromarinepolitan Pantai Timur mempunyai pendapatan perkapita tertinggi sebesar 3,753,044.95, diikuti wilayah Agropolitan sebesar 1,796,773.74 dan wilayah Agromarinepolitan Pantai Barat sebesar 1,685,622.58

Tabel 4.13. Distribusi Pendapatan Perkapita Menurut Wilayah (1987-2008)

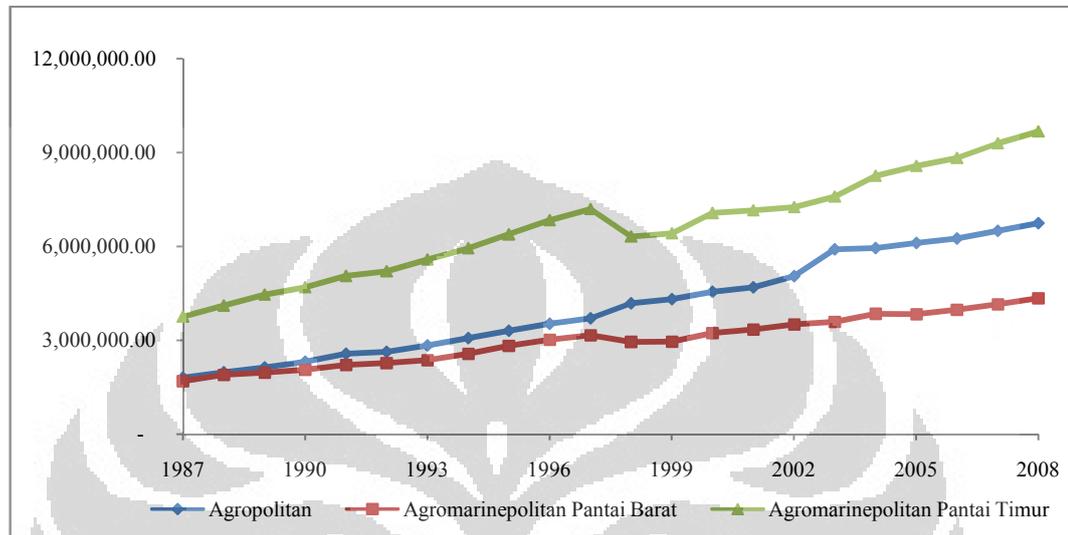
Tahun	Kawasan / Wilayah		
	Agropolitan	Agromarinepolitan	
		Pantai Barat	Pantai Timur
1987	1,796,773.74	1,685,622.58	3,753,044.95
1988	1,979,355.48	1,895,416.65	4,103,861.90
1989	2,123,860.90	1,966,726.09	4,456,555.14
1990	2,316,967.53	2,055,347.16	4,689,208.68
1991	2,563,619.81	2,214,434.28	5,053,653.81
1992	2,631,196.38	2,271,134.04	5,200,093.94
1993	2,830,602.66	2,361,623.75	5,580,072.29
1994	3,062,998.25	2,571,781.47	5,937,585.69
1995	3,306,599.82	2,821,495.36	6,381,307.26
1996	3,521,679.73	3,019,311.45	6,835,621.03
1997	3,703,835.69	3,163,549.55	7,188,982.01
1998	4,177,814.95	2,942,781.34	6,314,323.02
1999	4,315,522.85	2,959,604.69	6,416,614.35
2000	4,545,490.02	3,229,460.91	7,066,233.60
2001	4,693,895.96	3,344,962.07	7,149,795.47
2002	5,043,802.41	3,504,553.10	7,252,453.96
2003	5,905,832.27	3,586,285.40	7,591,923.79
2004	5,941,980.03	3,838,347.55	8,255,223.23
2005	6,111,478.82	3,835,245.67	8,569,794.50
2006	6,248,545.06	3,974,048.87	8,828,645.63
2007	6,499,572.09	4,150,928.05	9,295,412.26
2008	6,745,596.58	4,346,406.88	9,674,525.25

; BPS, data diolah

Sementara pada tahun 2008, wilayah Agromarinepolitan Pantai Timur masih tetap mempunyai pendapatan perkapita tertinggi sebesar 9,674,525.25, diikuti wilayah Agropolitan sebesar 6,745,596.58 dan wilayah Agromarinepolitan Pantai Barat sebesar 4,346,406.88.

PDRB perkapita dapat digunakan sebagai indikator kemakmuran, walaupun ukuran ini belum dapat digunakan secara langsung sebagai ukuran tingkat pemerataan pendapatan. PDRB perkapita menggambarkan dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah atau daerah. Adanya peningkatan perekonomian dengan melambatnya pertumbuhan penduduk akan mengakibatkan terjadinya peningkatan PDRB

perkapita. Untuk melihat perubahan pendapatan perkapita pada masing-masing wilayah selama kurun waktu tersebut atau wilayah yang sudah maju akan terus maju sementara wilayah yang masih dalam proses berkembang akan terus berada di belakang.



Gambar 4.13. Tren Distribusi Pendapatan Perkapita Menurut Wilayah (1987-2008)

Pada Gambar 4.13. Distribusi pendapatan perkapita menurut wilayah dapat menggambarkan pertumbuhan selama kurun waktu 22 tahun pada masing-masing wilayah. Pada tahun 1987, PDRB perkapita masing-masing wilayah bergerak ke atas mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2008. Pada tahun 1998, saat krisis ekonomi terjadi, hanya wilayah Agropolitan yang tidak merasakan imbasnya, sedangkan kedua wilayah lainnya mengalami penurunan.

BAB 5

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Disparitas Regional

Konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah yang cukup tinggi akan cenderung mendorong meningkatnya ketimpangan pembangunan antar wilayah karena proses pembangunan daerah akan lebih cepat pada daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang lebih tinggi.

Menurut Hipotesa Neo Klasik pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun.

Berdasarkan hipotesa ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada negara-negara sedang berkembang umumnya ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung lebih tinggi, sedangkan negara-negara maju ketimpangan tersebut akan menjadi lebih rendah. Dengan kata lain, kurva ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah berbentuk huruf U terbalik (Reverse U-shape Curve) (Sjafrizal, 2008)

Indonesia termasuk dalam kategori negara sedang berkembang dan dapat dikatakan bahwa ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung lebih tinggi. Provinsi Sumatera Utara merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari beberapa Kabupaten/Kota. Pada tahun 1987 terdiri dari 17 Kabupaten/Kota, namun setelah otonomi daerah sampai dengan tahun 2008 mengalami pemekaran dan menjadi 28 Kabupaten/Kota.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan otonomi daerah pada tahun 2001-2008, dengan berbagai kebijakan pemerintah yang telah digulirkan dan dilaksanakan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah. Penelitian disparitas antar wilayah ini dilakukan dengan menggunakan Indeks Williamson di Provinsi Sumatera Utara dalam kurun 22 tahun (1987-2008) dan juga melakukan analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas pendapatan regional di Provinsi Sumatera Utara.

Ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah biasanya diukur dengan menggunakan Indeks Williamson (CVw). Dalam perkembangannya indeks ini selalu diharapkan agar nilainya kecil yang mencerminkan bahwa disparitas distribusi pendapatan wilayah cenderung merata. Jika CVw semakin mendekati nilai 0 dapat dikatakan pembangunan antar wilayah semakin merata, namun sebaliknya jika mendekati atau melebihi nilai 1 ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah cenderung tinggi.

5.1.1. Provinsi Sumatera Utara

Dari hasil pengolahan data diperoleh hasil Indeks Williamson (CVw) dan persentase Pertumbuhan Ekonomi dan dapat juga dilihat disparitas pendapatan di Provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu 22 tahun (1987-2008).

Tabel 5.1. Indeks Williamson (CVw) pada Pra dan Pasca Pemekaran

Tahun	Indeks Williamson (CVw)	
	Pra	Pasca
1987	0.561	
1988	0.567	
1989	0.589	
1990	0.591	
1991	0.563	
1992	0.597	
1993	0.564	
1994	0.543	
1995	0.517	
1996	0.521	
1997	0.529	
1998	0.426	0.457
1999	0.439	0.457
2000	0.459	0.493
2001	0.463	0.496
2002	0.451	0.483
2003	0.432	0.502
2004	0.416	0.480
2005	0.436	0.502
2006	0.477	0.546
2007	0.495	0.572
2008	0.485	0.583

Sumber : BPS, data diolah

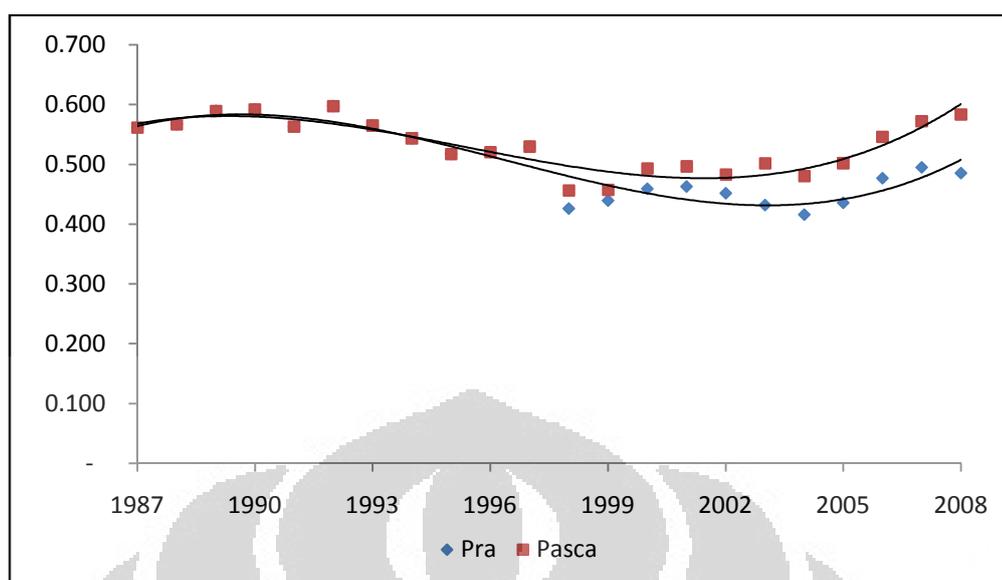
Dari Tabel 5.1. dapat dilihat bahwa nilai CVw pada tahun 1987 sebesar 0.561 dan sampai pada tahun cenderung bernilai 0,5 dan termasuk kategori disparitas tinggi namun mengalami penurunan pada tahun 1998 dengan nilai 0.426 dan sampai dengan tahun 2008 dengan nilai 0.485 termasuk dalam kategori sedang disparitas pendapatan di Provinsi Sumatera Utara.

Fenomena yang terjadi pada tahun 1998 ditandai dengan adanya krisis ekonomi dan adanya pemekaran terhadap daerah. Namun jika kita lihat setelah krisis dan pemekaran pada tahun 1999-2004, nilai CVw masih termasuk kategori disparitas yang sedang dengan nilai 0.416 dan nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 4.91 %, sedangkan setelah pada tahun 2005 ada kenaikan bahan bakar minyak menyebabkan CVw masih meningkat dengan nilai 0.436 namun termasuk dalam kategori disparitas sedang sampai dengan tahun 2008 dengan nilai CVw sebesar 0.585 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5.82 %.

Pada tabel 5.1., dapat dilihat pengaruh pemekaran wilayah pada tahun 2003 ternyata membuat nilai CVw meningkat, pada tahun 1998 nilai CVw sebesar 0.426 namun setelah pemekaran CVw menjadi 0.457. Sebelum pemekaran kategori disparitas pendapatan masih dalam kategori sedang karena masih besarnya masih dibawah 0.5. Sementara pada tahun 2003 terjadi pemekaran daerah kembali dan membuat nilai CVw sebesar 0.502 dalam kategori tinggi sampai dengan tahun 2008. Peningkatan disparitas ini diduga disebabkan karena penambahan wilayah baru yang mempengaruhi rata-rata pendapatan/perkapita seluruh Kabupaten/Kota dan juga adanya wewenang pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam mengelola keuangan daerah secara parsial, sesuai dengan keinginan pemerintah daerah dan masyarakatnya.

Penjelasan tersebut diatas mendukung pernyataan Simon Kuznets, bahwa pada tahap-tahap pertumbuhan awal, distribusi pendapatan atau kesejahteraan cenderung memburuk, namun pada tahap-tahap berikutnya hal itu akan membaik. Dengan demikian kurva yang berbentuk U-terbalik, trade-off antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan berlaku di Provinsi Sumatera Utara.

Pembangunan dalam lingkup propinsi secara spasial tidak selalu merata dan menyebabkan adanya trade-off antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Kesenjangan antar daerah Kabupaten/Kota akan menjadi masalah serius bagi pemerintah jika tidak ditangani secara berkesinambungan. Beberapa daerah mencapai pertumbuhan cepat, sementara beberapa daerah yang lain mengalami pertumbuhan yang lambat. Daerah yang tidak mengalami kemajuan yang sama disebabkan kurangnya sumber daya yang dimiliki, adanya kecenderungan peranan investor memilih daerah perkotaan atau daerah yang telah memiliki fasilitas sarana dan prasarana seperti prasarana perhubungan, dan lain-lain. (Kuncoro, 2004)



Gambar 5.1. Tren Perkembangan Disparitas Regional (CVw) di Provinsi Sumatera Utara

Pada gambar 5.1., dapat dilihat bahwa tren perkembangan nilai CVw (1987-2008) telah membentuk kurva U-terbalik pada tahun 1998-1999, namun pada tahun 2000 sampai dengan 2008 tren nilai CVw kembali meningkat, hal ini kemungkinan terjadi disebabkan adanya pemekaran Kabupaten/Kota sampai dengan tahun 2008. Adanya perbedaan pendapatan/kapita akibat pemekaran daerah mengakibatkan ada beberapa penduduk yang pendapatannya lebih tinggi masuk ke dalam suatu daerah sementara daerah lainnya mempunyai pendapatan/kapitanya lebih kecil sehingga meningkatkan disparitas.

Disamping itu kondisi demografis daerah dan perbedaan sumber daya alam yang berbeda akibat pemekaran daerah membutuhkan produktivitas tenaga kerja dan investasi yang tinggi bagi daerah yang baru terbentuk. Disamping itu wewenang pengelolaan keuangan dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam belum mencukupi untuk menjalankan kegiatan pembangunan bagi daerah baru. (Sjafrizal, 2008)

5.1.2. Wilayah Pembangunan

Dari hasil pengolahan data diperoleh hasil pendapatan/kapita dengan disparitas distribusi pendapatan (CVw) menurut region di Provinsi Sumatera Utara tahun 1987-2008.

Tabel 5.2. Disparitas Distribusi Pendapatan (CVw) Menurut Wilayah

Tahun	Wilayah / Region		
	CVw Agropolitan	CVw Agromarinepolitan	
		Pantai Barat	Pantai Timur
1987	0.411	0.140	0.386
1988	0.402	0.106	0.397
1989	0.412	0.102	0.414
1990	0.410	0.095	0.426
1991	0.405	0.095	0.402
1992	0.413	0.116	0.445
1993	0.415	0.132	0.394
1994	0.423	0.140	0.373
1995	0.429	0.161	0.344
1996	0.429	0.190	0.353
1997	0.432	0.191	0.364
1998	0.309	0.180	0.293
1999	0.314	0.189	0.297
2000	0.330	0.179	0.331
2001	0.328	0.166	0.347
2002	0.303	0.166	0.352
2003	0.184	0.170	0.361
2004	0.156	0.159	0.325
2005	0.154	0.170	0.340
2006	0.135	0.230	0.368
2007	0.129	0.230	0.387
2008	0.126	0.161	0.401

Sumber : BPS, data diolah

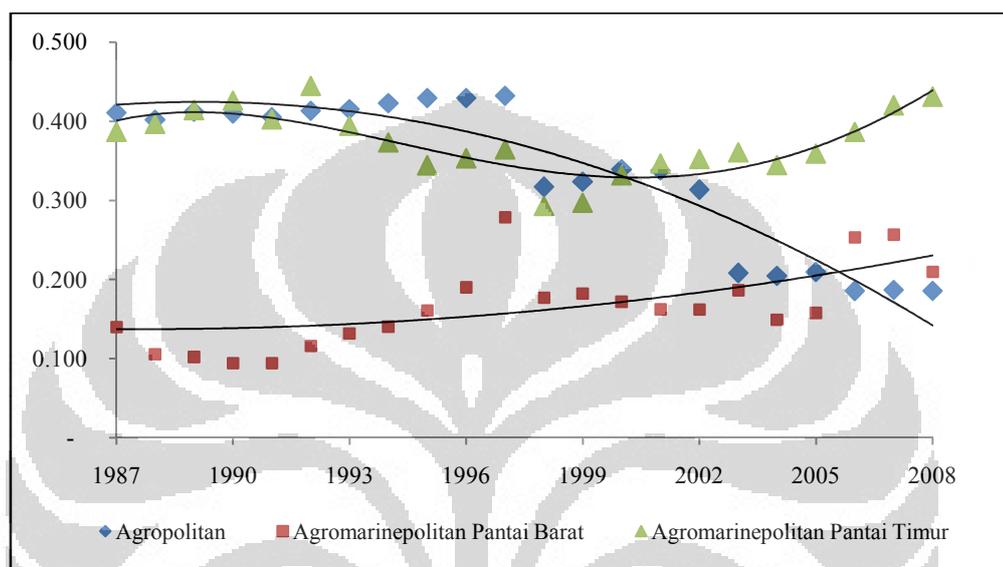
Dari Tabel 5.2., dapat dilihat bahwa perkembangan disparitas nilai CVw pada tahun 1987 sebesar 0.411 termasuk dalam kategori sedang, mengalami penurunan sejalan dengan adanya krisis ekonomi pada tahun 1998 dengan nilai CVw sebesar 0.309 (sedang). Sementara setelah tahun 2000 ke atas mengalami penurunan sampai pada tahun 2008 sebesar 0.126 (rendah). Hal ini dapat dikatakan mulai tersebarnya distribusi pendapatan antar Kabupaten/Kota di wilayah pembangunan Agropolitan yang menuju pemerataan. Karakteristik geografis dan sumber daya alam di wilayah tersebut hampir sama dikarenakan berada di daerah pegunungan bukit barisan dengan kondisi iklim yang memungkinkan untuk pertanian. Ini merupakan salah satu faktor penyebab meratanya pendapatan penduduk di wilayah tersebut dikarenakan pada umumnya masyarakat yang bekerja di wilayah ini di bidang pertanian berbasis tanaman pangan dan hortikultura seperti jagung, kentang, cabai, kacang-kacangan, sedangkan perkebunannya didominasi oleh tanaman kopi.

Sementara perkembangan disparitas nilai CVw pada tahun 1987 sebesar 0.140 termasuk dalam kategori rendah dan cenderung sudah mendekati 0 pada tahun 1990 dengan nilai CVw sebesar 0.095, namun kembali meningkat walaupun kategori CVw dikatakan rendah. Sementara pada tahun 2008 nilai CVw sebesar 0,161 kategori rendah. Hal ini dapat dikatakan distribusi pendapatan antar Kabupaten/Kota di wilayah pembangunan Agromarinepolitan Pantai Barat sudah menuju pemerataan. Karakteristik geografis dan sumber daya alam di wilayah ini hampir sama di tiap Kabupaten/Kota di wilayah ini dikarenakan berada di daerah pesisir Pantai Barat Sumatera Utara dan sejak dahulu dahulu sampai sekarang umumnya masyarakatnya bekerja sebagai nelayan. Namun sekarang sudah mulai ada pergeseran menuju ke subsektor perkebunan seperti karet, kakao dan kelapa sawit. Hal ini dikarenakan nilai jual produksi tanaman perkebunan mulai menjanjikan bagi peningkatan dengan dukungan kondisi geografis dan iklim serta kondisi tanahnya yang masih luas mendukung untuk kegiatan tersebut.

Sedangkan perkembangan disparitas nilai CVw pada tahun 1987 sebesar 0.386 termasuk dalam kategori sedang mengalami penurunan sejalan dengan adanya pemekaran wilayah pada tahun 1998 dengan nilai CVw sebesar 0.293 (rendah). Dan terus meningkat sampai pada tahun 2008 dengan nilai CVw sebesar 0,401 yang termasuk dalam kategori disparitas pendapatan sedang. Hal ini dapat menunjukkan distribusi pendapatan antar Kabupaten/ Kota di wilayah pembangunan Agromarinepolitan Pantai Timur lebih tinggi disparitas pendapatannya dibandingkan wilayah Agropolitan dan Agromarinepolitan Pantai Barat.

Letak geografis di wilayah ini berada di daerah pesisir Pantai Timur Sumatera Utara. Namun dikarenakan adanya Kota Medan sebagai pusat ibukota Provinsi Sumatera Utara dan adanya daerah sebagai penghasil sumber daya alam minyak dan panas bumi serta sektor perkebunan yang didominasi dari PT. Perkebunan Nusantara menjadi wilayah ini cenderung membuat disparitas yang cukup signifikan. Kota Medan sangat dominan di sektor perdagangan dan perhotelan serta jasa pemerintahan umum dan swasta, Kabupaten Langkat dan Binjai penghasil minyak bumi dan panas bumi, sedangkan Kota Tanjung Balai dan Batubara didominasi perikanan dan perkebunan, sementara Kabupaten

Labuhan Batu dan Asahan didominasi perkebunan kelapa sawit dan karet dengan dengan perusahaan penanaman modal asing dan PT. Perkebunan Nusantara I-IV, dan Kabupaten Deli Serdang mendominasi daerah industri yang mendukung pusat pertumbuhan kota Medan. Dikarenakan berbedanya sektor pembentuk PDRB masing-masing Kabupaten/Kota yang berbeda dapat menyebabkan terjadinya disparitas pendapatan di wilayah tersebut.



Gambar 5.2. Tren Perkembangan Disparitas Wilayah Pembangunan

Dari Gambar 5.2. dapat dilihat bahwa tren perkembangan Disparitas wilayah pembangunan yang terjadi dari tahun 1987-1998, dimana pada tahun 1998, CVw mengalami penurunan untuk semua wilayah pembangunan tetapi hal ini cenderung terjadi karena terjadi krisis ekonomi secara nasional, namun wilayah pembangunan Agropolitan terlihat membentuk kurva U-terbalik Kuznets, sementara wilayah pembangunan Agromarinepolitan Pantai Timur telah membentuk kurva U-terbalik pada tahun 1987-1998 walaupun setelah itu meningkat kembali. Sedangkan wilayah pembangunan Agromarinepolitan Pantai Barat belum mencapai titik puncak untuk membentuk kurva U-terbalik. Setelah tahun 2001 nilai CVw wilayah pembangunan Agromarinepolitan cenderung meningkat sedangkan pada wilayah pembangunan Agropolitan cenderung menurun.

Pembangunan yang dilakukan di wilayah agropolitan dan agromarinepolitan sedang dirintis oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara

melalui instansi terkait diharapkan dapat memperkenalkan daerah-daerah tertentu yang kemudian akan menjadi daerah yang mempunyai komoditas unggulan yang dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan. Multiplier effect dari salah satu komoditas unggulan yang diproduksi oleh daerah tersebut dapat dipromosikan oleh industri yang menghasilkan nilai tambah kepada kawasan, sehingga daerah tersebut dapat meningkatkan perekonomian disekitarnya.

Pada wilayah pembangunan agropolitan dilakukan pengelolaan agrikultura dan industri yang berkesinambungan akan menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat petani. Agrikultura dan industri yang saling berkesinambungan, adalah di mana ada industri yang dibangun pada daerah-daerah sentra produksi suatu komoditi dalam kawasan tersebut. Pemerintah merencanakan pembangunan wilayah agropolitan sebagai industri yang menggunakan bahan baku dari produk pertanian yang ada di daerah tersebut. Begitu juga dengan wilayah pembangunan agromerinepolitan dilakukan pengelolaan agrikultural dan industri yang berkesinambungan akan menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat nelayan. Perikanan dan industri yang saling berkesinambungan, adalah di mana ada industri yang dibangun pada daerah-daerah sentra produksi suatu komoditi dalam kawasan tersebut. Pemerintah merencanakan pembangunan wilayah agromarinepolitan sebagai industri yang menggunakan bahan baku dari produk perikanan yang ada di daerah tersebut.

Sehingga akan menciptakan satu daerah yang penghasilannya berkesinambungan dengan produk itu sendiri dan masyarakat petani akan menikmati kesejahteraan sebagai dampak pembangunan. Kesejahteraan yang diangkat dari hasil produksi pertanian mereka yang diserap oleh industri tersebut. Hal ini hanya bisa terjadi apabila kesinambungan antara hasil pertanian yang diolah oleh industri dan kemudian pemasaran produk jadi (siap pakai) dapat masuk ke pasaran nasional maupun internasional. Pada akhirnya akan terciptanya suatu kesinambungan atau sinergi yang baik antara penawaran dan permintaan. Dengan demikian masyarakat petani dan nelayan akan mengembangkan pola pertanian dan perikanan yang berbasis kepada industri di setiap daerah, setiap kabupaten, setiap provinsi, sampai ke setiap kota kecamatan mempunyai industri komoditi unggulan dari daerah-daerah yang berbasis kepada komoditas unggulan.

Namun pembangunan di wilayah ini belum sepenuhnya dapat dilakukan dikarenakan masih banyaknya kendala dalam proses pembangunan tersebut, salah satunya diduga masih belum sinerginya kerjasama antara wilayah pembangunan agropolitan disebabkan masing-masing daerah masih mempunyai program dan kegiatan prioritas yang perlu didorong untuk menumbuhkan perekonomiannya masing-masing dan membutuhkan anggaran dana belanja daerah yang cukup besar. Kemungkinan masih banyak hal-hal lainnya yang dapat mengakibatkan program dan pembangunan ini berjalan sangat lambat dan pembangunan yang dilakukan terkesan hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

Sementara itu pihak Provinsi Sumatera Utara masih tetap berusaha untuk mewujudkan pembangunan wilayah tersebut dengan mengagendakan program dan kegiatan pembangunan di wilayah agropolitan dan agromarinepolitan dengan melakukan kegiatan yang mendorong agar apa yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama pembangunan tersebut. Hal ini dapat dilihat pada rencana pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara tahun 2009-2013.

5.1.3. Sektoral

Penjumlahan nilai tambah bruto dari 9 (sembilan) sektor lapangan usaha melalui pendekatan produksi akan menghasilkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Masing-masing sektor akan memberikan kontribusi yang berbeda satu dengan yang lain dan erat kaitannya dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah. Daerah yang kaya akan sektor pertanian, nilai tambah bruto pertaniannya akan lebih besar dari sektor lain. Demikian juga daerah yang kaya akan barang tambang akan mempunyai nilai tambah yang besar pula.

Sektor pertanian sangat berperan dalam memberikan kontribusi yang besar terhadap nilai tambah bruto dibandingkan dengan sektor lain disebabkan Provinsi Sumatera Utara termasuk daerah agraris.

Indeks Williamson (CVw) juga dapat menghitung seberapa besar disparitas sektoral yang terjadi diantara sektor-sektor pembentuk PDRB. Dengan mengetahui nilai CVw sektoral dapat dilihat sejauh mana tingkat disparitas antara satu sektor dengan sektor lainnya.

Pada tabel 5.3. dapat dilihat bahwa perkembangan disparitas (CVw) dari sektor pertanian pada tahun 1987 mempunyai nilai CVw sebesar 0.629 dan pada

tahun 2008 sebesar 0.572 Data menunjukkan bahwa nilai CVw dengan menyertakan sektor pertanian mempunyai tren yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan nilai CVw sektor lainnya cenderung lebih tinggi selain sektor jasa-jasa. Ini berarti sektor pertanian merupakan sektor yang dapat berperan dalam menurunkan disparitas distribusi pendapatan regional. Sementara itu, sektor jasa-jasa, pada tahun 1987 CVw sebesar 0.714 dan pada tahun 2008 nilai CVw sebesar 0.470, hal ini menunjukkan sektor jasa-jasa melalui jasa pemerintah umum dan jasa swasta telah melakukan kegiatan pembangunan dalam menurunkan tingkat disparitas pendapatan di Provinsi Sumatera Utara.

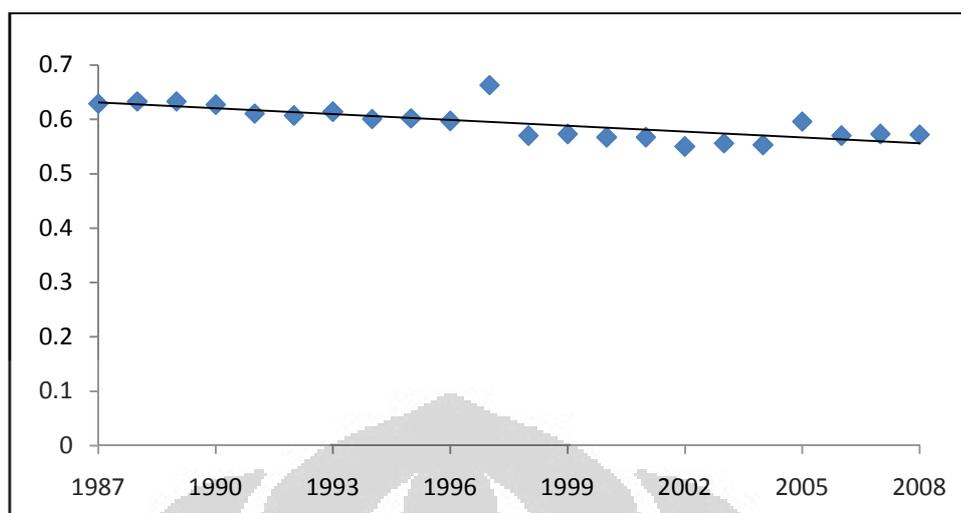
Tabel 5.3. Disparitas Distribusi Pendapatan (CVw) Menurut Sektoral

Tahun	Indeks Williamson sektoral (CVw sektoral)								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1987	0.629	3.595	0.902	1.795	1.333	0.917	1.473	1.784	0.714
1988	0.633	3.630	0.941	1.820	1.358	0.935	1.502	1.808	0.716
1989	0.633	3.631	0.935	1.854	1.393	0.962	1.537	1.840	0.737
1990	0.627	3.615	0.960	1.871	1.417	0.980	1.559	1.860	0.741
1991	0.611	3.566	0.988	1.855	1.393	0.962	1.532	1.851	0.726
1992	0.607	3.550	0.952	1.905	1.444	1.000	1.574	1.896	0.759
1993	0.614	3.554	0.957	1.830	1.382	0.945	1.512	1.837	0.720
1994	0.601	3.489	0.966	1.798	1.349	0.921	1.474	1.797	0.707
1995	0.602	3.477	0.978	1.743	1.302	0.884	1.423	1.742	0.680
1996	0.597	3.457	0.970	1.740	1.302	0.882	1.422	1.741	0.680
1997	0.663	3.118	1.049	1.828	1.392	0.976	1.560	1.824	0.761
1998	0.570	3.311	1.000	1.527	1.122	0.753	1.267	1.589	0.521
1999	0.573	3.278	1.005	1.517	1.117	0.751	1.259	1.580	0.519
2000	0.567	3.296	1.027	1.572	1.168	0.793	1.311	1.625	0.547
2001	0.567	2.956	1.026	1.571	1.135	0.768	1.352	1.672	0.524
2002	0.550	2.834	1.024	1.561	1.113	0.754	1.435	1.616	0.511
2003	0.556	2.258	0.957	1.615	1.081	0.729	1.456	1.655	0.473
2004	0.553	1.665	0.999	1.492	1.136	0.733	1.539	1.600	0.453
2005	0.596	1.592	1.021	1.507	1.161	0.776	1.557	1.593	0.463
2006	0.570	1.424	1.034	1.506	1.205	0.790	1.645	1.577	0.473
2007	0.573	1.648	1.070	1.434	1.203	0.792	1.709	1.634	0.461
2008	0.572	1.641	1.087	1.434	1.222	0.789	1.735	1.680	0.470

Sumber : BPS, data diolah

Keterangan :

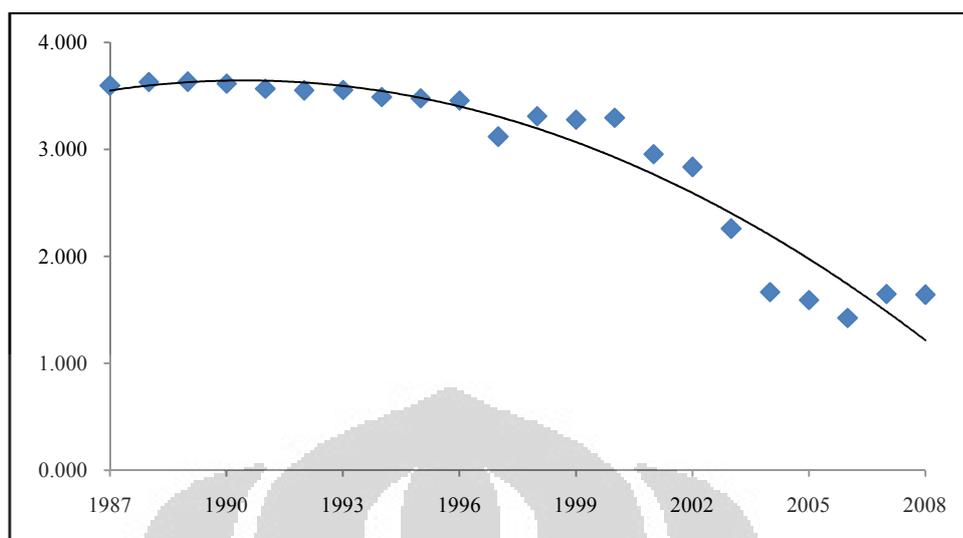
- 1 : Sektor Pertanian
- 2 : Sektor Penggalian
- 3 : Sektor Industri dan Pengolahan
- 4 : Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih
- 5 : Sektor Bangunan
- 6 : Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran
- 7 : Sektor Pengangkutan dan Komunikasi
- 8 : Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
- 9 : Sektor Jasa-Jasa



Gambar 5.3. Tren Disparitas (CVw) Sektor Pertanian

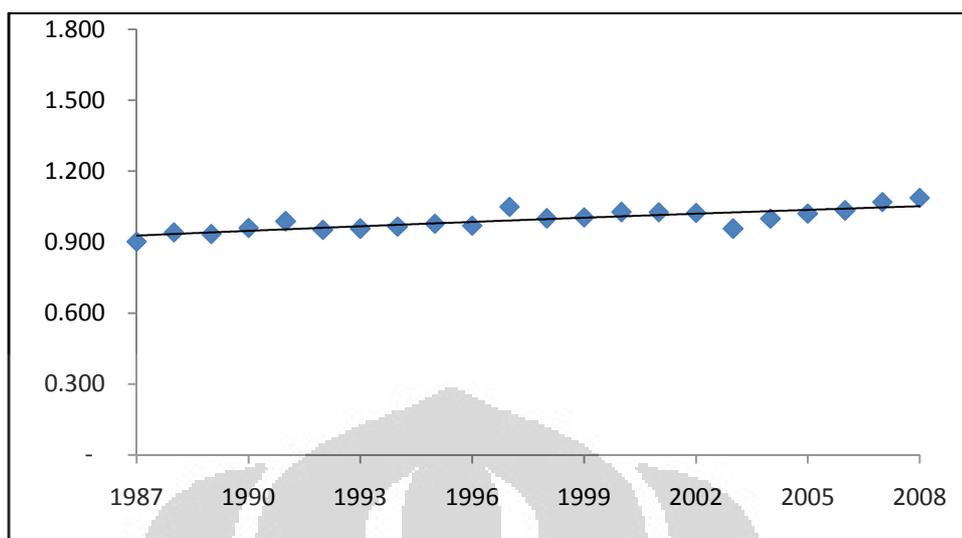
Berdasarkan gambar 5.3., dapat dilihat bahwa tren disparitas (CVw) pendapatan pada sektor pertanian cenderung konstan dalam jangka waktu 22 tahun, ini menunjukkan perkembangan sektor tersebut hampir merata di semua wilayah. Namun dari nilai CVw rata-rata sebesar 0,594 termasuk kategori ketimpangan yang tinggi, namun demikian jika dilihat dari tren yang semakin menurun setiap tahunnya menunjukkan pendapatan yang diterima oleh petani mulai membaik dan merata di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Sementara itu pada tahun 1998 terjadi krisis ekonomi global terjadi penurunan disparitas dikarenakan daerah yang mempunyai unggulan di sektor pertanian lebih tahan terhadap kelesuan perekonomian nasional akibat krisis ekonomi global dimana daerah yang disektor industri mengalami penurunan pendapatan dikarenakan banyak perusahaan yang memberhentikan tenaga kerja karena terjadinya kenaikan harga-harga secara umum sehingga banyak perusahaan yang tutup. Sedangkan tahun 2005 juga terjadi peningkatan disparitas dikarenakan naiknya harga bahan bakar minyak nasional menyebabkan meningkatnya harga-harga sementara di daerah yang kurang maju dengan unggulan sektor pertanian diantaranya Kabupaten Dairi, Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Langkat cenderung mengalami penurunan pendapatan dibanding daerah unggulan sektor industri seperti Kota Medan, Deli Serdang dan Kabupaten Asahan, namun pada tahun berikutnya perekonomian menjadi normal sementara disparitas pendapatan di sektor pertanian cenderung mengalami penurunan sampai dengan tahun 2008.



Gambar 5.4. Tren Disparitas (CVw) Sektor Penggalian dan Pertambangan

Dari gambar 5.4. menunjukkan tren disparitas (CVw) pendapatan pada sektor penggalian dan pertambangan cenderung menurun dalam jangka waktu 22 tahun, ini menunjukkan perkembangan sektor penggalian dan pertambangan sebagai sumber daya terkonsentrasi di daerah tertentu saja. Dilihat dari nilai CVw rata-rata sebesar 2,936 termasuk kategori ketimpangan yang tinggi, ini menunjukkan perkembangan penggalian dan pertambangan yang ada selama ini tidak menyebar merata ke seluruh daerah. Hal ini dapat diartikan adanya perbedaan sumber daya alam dan sumber daya manusia dari daerah penghasil sumber daya yang kaya dari sektor sehingga adanya perbedaan pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Namun jika dilihat pada tahun 2001-2008 terlihat disparitas di sektor penggalian mengalami penurunan diduga adanya kebijakan dari masing-masing pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam dengan menciptakan lapangan kerja baru menyebabkan adanya penambahan pendapatan di masyarakat. Hal ini diduga karena adanya otonomi daerah dimana pemerintah daerah berusaha mendapatkan output dari sektor ini sebagai penyumbang pendapatan asli daerah, dan ini lebih banyak terjadi di daerah yang belum makmur seperti Kota Binjai, Kabupaten Nias, Kabupaten Langkat, Kabupaten Tapanuli Selatan dibandingkan sehingga daerah yang maju seperti Kota Medan.

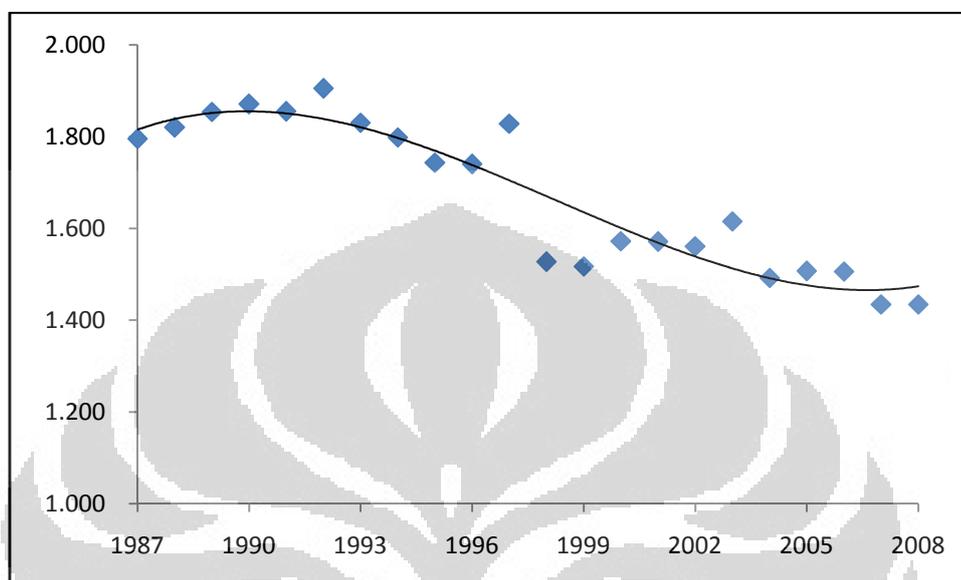


Gambar 5.5. Tren Disparitas (CVw) Sektor Industri dan Pengolahan

Pada gambar 5.5., tren disparitas (CVw) pendapatan pada sektor industri dan pengolahan cenderung meningkat dalam kurun waktu 22 tahun, ini menunjukkan perkembangan sektor industri dan pengolahan yang ada selama ini belum menyebar merata ke seluruh daerah. Jika dilihat dari nilai CVw rata-rata sebesar 0,993 termasuk kategori ketimpangan yang sangat tinggi. Tren perkembangan disparitas sektor industri semakin tinggi kemungkinan belum meratanya perkembangan sektor industri di Kabupaten/Kota menyebabkan tingkat pendapatan masyarakat di daerah yang sudah berkembang sektor industrinya lebih tinggi tingkat pendapatannya dibandingkan daerah yang masih didominasi sektor pertanian.

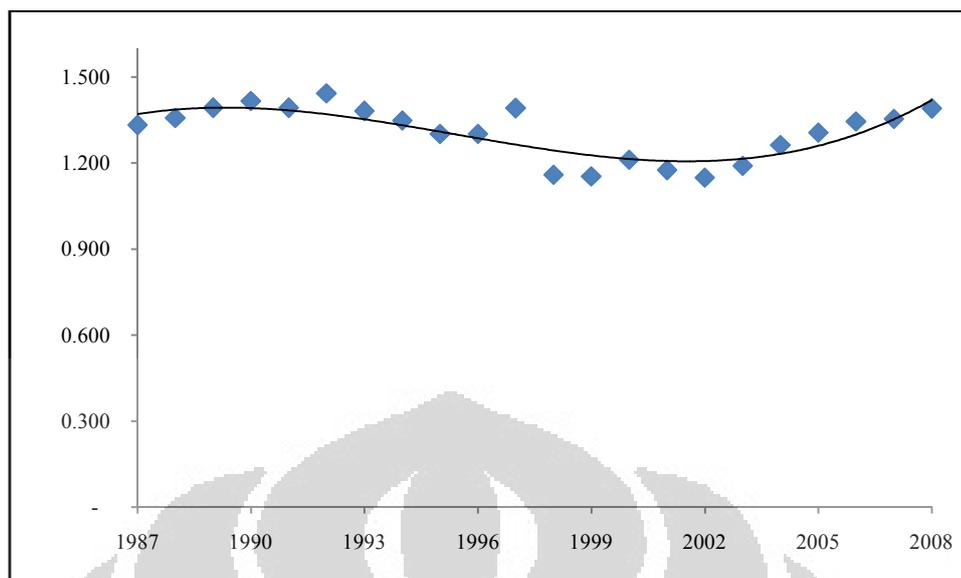
Konsentrasi industri terutama berada di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Asahan yaitu kabupaten/kota dengan jumlah industri berada di atas 500 unit industri. Jika dilihat dari penyebaran industri tersebut sangat timpang dan hal tersebut akan berdampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Dari nilai tambah yang dihasilkan sudah tentu industri menyumbangkan lebih besar. Begitu pula dalam hal penyerapan tenaga kerja yang cukup besar sedangkan di daerah yang sedikit industrinya akan menyerap tenaga kerja lebih kecil. Pada tahun 1998 adanya penurunan kontribusi dari sektor industri terhadap PDRB disebabkan kelesuan ekonomi dunia dan krisis keuangan khususnya di Amerika Serikat dan begitu juga pada tahun 2005

terjadinya kenaikan BBM meningkatkan biaya produksi dan mengakibatkan pengurangan tenaga kerja. Karena hal tersebut mempengaruhi produksi sektor industri, dengan demikian nilai tambah yang dihasilkan pun akan menurun dan pada akhirnya berdampak menurunnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB



Gambar 5.6. Tren Disparitas (CVw) Sektor Listrik, Air dan Gas

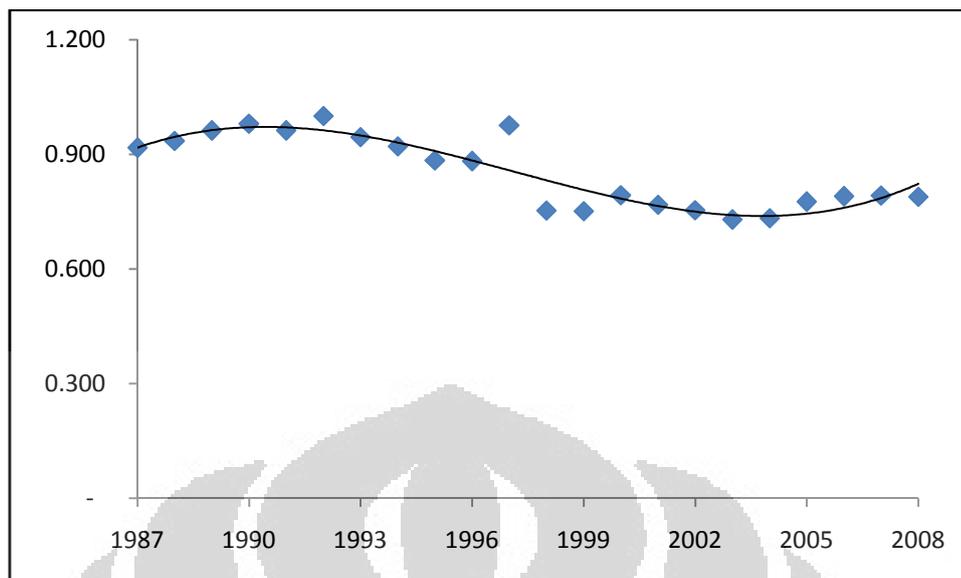
Berdasarkan gambar 5.6., dapat dilihat bahwa tren disparitas (CVw) pendapatan pada sektor listrik, air dan gas, sebelum tahun 2000 telah mengikuti tren kurva U-terbalik Kuznets, penyebaran listrik ke desa-desa mulai dilakukan, namun pada tahun berikutnya mengalami peningkatan kembali, dapat dikatakan perkembangan sektor listrik disebabkan sektor tersebut lebih banyak terkonsentrasi di daerah perkotaan, atau wilayah yang sudah maju dan berkembang, sementara wilayah yang belum berkembang belum dapat menikmati meratanya sektor ini. Jika dilihat dari nilai CVw rata-rata sebesar 1,672 termasuk kategori ketimpangan yang sangat tinggi, hal ini dapat disebabkan daerah dengan industri seperti Kabupaten Deli Serdang dan Medan lebih cenderung banyak menggunakan listrik disebabkan banyak industri, penerangan jalan dan perkantoran dalam kegiatan sehari-hari. Demikian juga dengan penggunaan gas dan air bersih didominasi Kota Medan, sedangkan Kabupaten Kota yang belum makmur lebih sedikit dan cenderung disparitas pendapatan di sektor ini lebih tinggi.



Gambar 5.7. Tren Disparitas (CVw) Sektor Bangunan

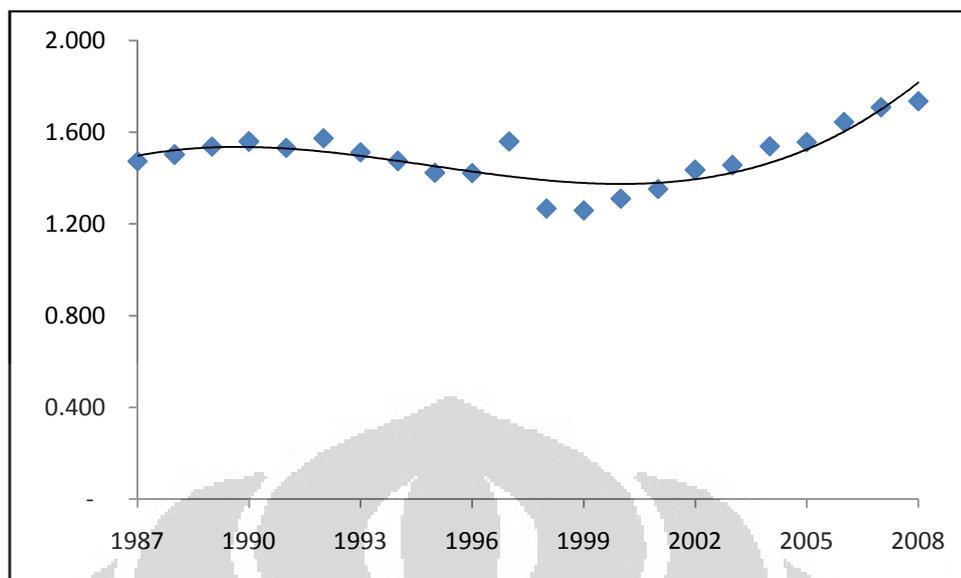
Tren disparitas (CVw) pendapatan pada sektor Bangunan pada gambar 5.7., sebelum tahun 2000 juga telah mengikuti tren kurva U-terbalik Kuznets, sudah mulai meratanya pendapatan di Kabupaten/Kota sehingga masyarakat mampu melakukan pembangunan, namun pada tahun 1998-1999 mulai terjadi krisis dan daya beli masyarakat sangat rendah dikarenakan pendapatan mulai menurun di dan disparitasnya terus meningkat dengan perlahan sampai dengan tahun 2008. Jika dilihat dari nilai CVw rata-rata sebesar 1,260 termasuk kategori ketimpangan yang sangat tinggi, hal ini dapat disebabkan daerah Kota Medan sebagai pusat perkonomian dan pemerintahan, memiliki keunggulan dalam sektor konstruksi dan bangunan berkembang dengan pesat seiring dengan permintaan yang terus meningkat. Disamping itu perkembangan pembangunan bangunan pertokoan, perumahan dan hotel dan lainnya lebih banyak dilakukan di Kota Medan dan Kota Pematang Siantar. Sementara untuk daerah yang belum makmur diwakili oleh Kabupaten Nias, Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kota Binjai.

Pada krisis ekonomi pada tahun 1998, disparitas pendapatan pada sektor ini mengalami penurunan dikarenakan banyak perusahaan yang hancur dan tutup sementara pada tahun 2005 saat terjadi kenaikan BBM, disparitas pendapatan masih tinggi, sementara itu Kabupaten Nias mengalami kejadian gempa dan tsunami dan banyak melakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan yang cukup besar.



Gambar 5.8. Tren Disparitas (CVw) Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Pada gambar 5.8., tren disparitas (CVw) pendapatan pada sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran pada sebelum tahun 2000 juga telah mengikuti tren kurva U-terbalik Kuznets. Jika dilihat dari nilai CVw rata-rata sebesar 0,854 termasuk kategori ketimpangan yang tinggi, hal ini dimungkinkan karena sektor ini masih didominasi Kota Medan yang berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Sebagai ibukota Provinsi dimana adanya bandar udara dan pelabuhan laut dalam memobilisasi barang dan jasa dan juga cepatnya perkembangan perhotelan dan pariwisata di Provinsi Sumatera Utara. Dapat dikatakan bahwa sektor ini dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan yang lebih besar di Kota Medan daripada daerah lainnya sehingga masih terjadinya disparitas pendapatan regional di Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan daerah makmur lainnya diwakili oleh Kota Tanjung Balai dengan adanya pelabuhan laut yang dapat melayani perdagangan ke Malaysia dan Singapura dan Pulau Batam. Begitu juga dengan Kabupaten Asahan yang berada di wilayah pantai timur berbatsan dengan selat Malaka. Sedangkan untuk daerah belum makmur diwakili Kota Sibolga yang mempunyai pelabuhan laut dalam menjalankan distribusi perdagangan dan perhotelan dikarenakan untuk mencapai pulau Nias melalui daerah ini dan pada umumnya melalui angkutan sungai danau dan pulau (ASDP) seperti feri dan kapal laut cepat dan biasanya sebelum menyeberang akan menginap di kota tersebut.

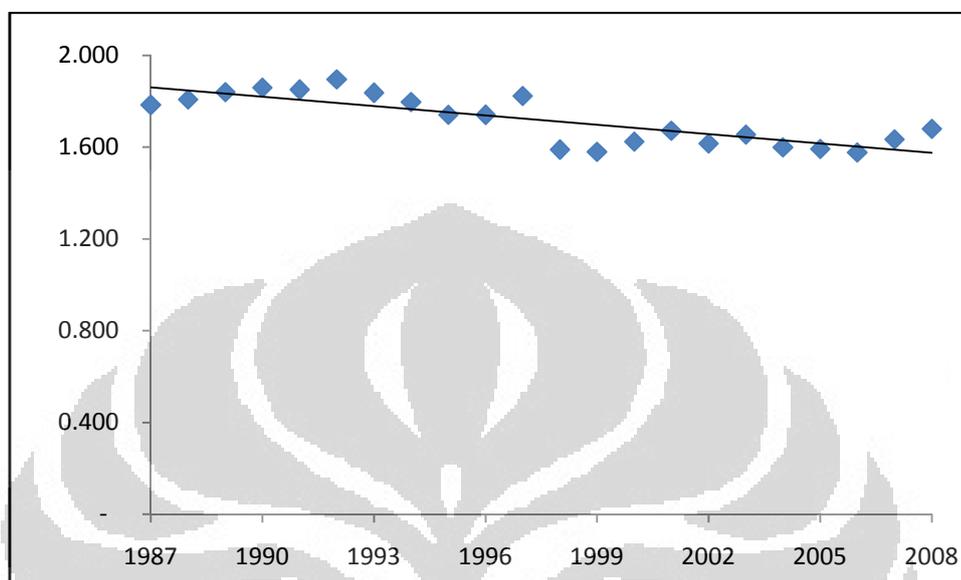


Gambar 5.9. Tren Disparitas (CVw) Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Pada gambar 5.9., tren disparitas (CVw) pendapatan pada sektor pengangkutan dan komunikasi cenderung meningkat dalam kurun waktu 22 tahun, ini menunjukkan perkembangan sektor pengangkutan dan komunikasi yang ada selama ini belum menyebar merata ke seluruh daerah. Pengangkutan barang masih tertuju pada daerah tertentu dan lebih maju, setelah itu mobilisasi barang ke daerah-daerah berkembang dengan infrastruktur jalan yang kurang baik mengakibatkan bertambahnya biaya produksi yang harus dibayar oleh daerah berkembang. Jika dilihat dari nilai CVw rata-rata sebesar 1,492 termasuk kategori ketimpangan yang sangat tinggi, hal ini dapat dikatakan bahwa kemampuan dana untuk membangun infrastruktur jalan yang membutuhkan dana yang tinggi belum mampu dilakukan oleh pemerintah daerah dan pada umumnya masih mengharapkan dana dari pusat dan provinsi. Jasa transportasi dan komunikasi di Kota Medan menjadi bagian penting dan kontribusinya terus meningkat. Sebagai pusat perekonomian, di kota ini terdapat pelabuhan laut dan udara yang mampu melayani arus kapal internasional.

Sedangkan untuk daerah belum makmur diwakili Kota Sibolga yang mempunyai pelabuhan laut yang berfungsi sebagai transportasi menuju pulau Nias untuk mengangkut mobil, truk, sepeda motor dan lainnya. Pada umumnya melalui angkutan sungai danau dan pulau (ASDP) seperti feri dan kapal laut cepat dan biasanya sebelum menyeberang akan menginap di kota tersebut. Sementra itu

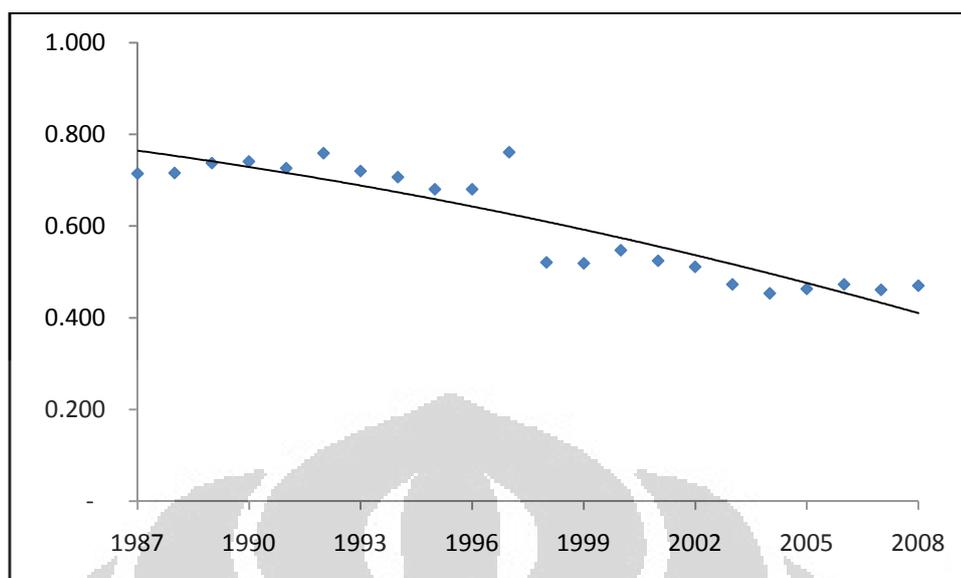
Kota Tebing Tinggi merupakan arus lalu lintas darat yang padat sebagai pertemuan arus lalu lintas antara pantai Timur dan pantai Barat di Provinsi Sumatera Utara dan pada saat ini mewajibkan setiap angkutan darat dengan berpenumpang wajib membayar retribusi daerah di terminal Kota Tebing Tinggi.



Gambar 5.10. Tren Disparitas (CVw) Sektor Keuangan dan Persewaan

Berdasarkan gambar 5.10., tren disparitas (CVw) pendapatan pada sektor keuangan dan persewaan cenderung meningkat dalam kurun waktu 22 tahun, ini menunjukkan perkembangan keuangan dan persewaan yang ada selama ini belum menyebar merata ke seluruh daerah. Jika dilihat dari nilai CVw rata-rata sebesar 1,718 termasuk kategori ketimpangan yang sangat tinggi, hal ini mungkin disebabkan belum meratanya penyebaran bank-bank swasta di daerah dan masih didominasi bank negara dan bank pembangunan daerah. Disamping itu sektor ini masih didominasi dari nilai sewa bangunan yang didominasi oleh Kota Medan dan dapat dikatakan bahwa Kota Medan sebagai pusatnya transaksi keuangan di Provinsi Sumatera Utara. Terdapat pula berbagai perguruan tinggi, rumah sakit dan jasa profesional lainnya, serta lembaga keuangan sebagai basis perekonomian.

Sedangkan untuk daerah yang belum makmur diwakili oleh Kota Binjai dan Tebing Tinggi yang lokasinya berdekatan dengan kota Medan, cenderung mempunyai nilai sewa bangunan yang lebih tinggi dikarenakan lokasinya sudah dekat dengan Kota Medan sebagai pusat pertumbuhan. Dan sudah banyak terdapat bank pemerintah maupun bank swasta yang bergerak di jasa keuangan.



Gambar 5.11. Tren Disparitas (CVw) Sektor Jasa-Jasa

Pada gambar 5.11. tren disparitas (CVw) pendapatan pada sektor Jasa cenderung menurun dalam kurun waktu 22 tahun, ini menunjukkan perkembangan sektor jasa yang ada selama ini mulai menyebar merata ke seluruh daerah. Hal ini bisa ditunjukkan dengan pelayanan prima dengan mewujudkan good governance dari pemerintah dan swasta dalam melayani masyarakat. Jika melihat nilai CVw rata-rata sektor jasa sebesar 0,607 masih termasuk kategori ketimpangan yang tinggi, namun dengan tren yang ada pada tahun berikutnya akan didapatkan penurunan disparitas dikarenakan sektor jasa akan menjadi prioritas dalam sistem perdagangan dan perekonomian. Daya saing dari pemerintah yang paling murah dan mudah dijual tanpa mengeluarkan biaya adalah sektor jasa, ini memungkinkan untuk menurunkan tingkat disparitas pendapatan dikarenakan setiap daerah akan mempunyai cara tersendiri untuk menarik investor untuk berinvestasi sehingga akan menjalankan dan meningkatkan perekonomian didaerahnya.

Pada masa krisis ekonomi tahun 1997 sampai tahun 1999, Indeks Williamson cenderung mengalami penurunan. Penurunan ketimpangan tersebut dan semakin meratanya distribusi pendapatan bukan semata-mata disebabkan karena meningkatnya pendapatan masyarakat golongan menengah ke bawah, tetapi lebih disebabkan berkurangnya pendapatan masyarakat golongan menengah ke atas. Hal ini bisa dilihat dari penurunan PDRB Kabupaten/Kota pada saat krisis ekonomi terjadi.

5.2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Disparitas di Provinsi Sumatera Utara

Pada penelitian ini digunakan CVw dari pra pemekaran dikarenakan untuk menjaga konsistensi data dari tahun 1987-2008 dengan jumlah 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu jika dibandingkan antara CVw pra pemekaran dan pasca pemekaran diperoleh hasil yang berbeda setelah diregresi terhadap variabel yang mempengaruhi disparitas di Provinsi Sumatera Utara. Hasil regresi pasca pemekaran diperoleh hasil variabel peranan perdagangan yang diukur dari rasio net ekspor terhadap PDRB mempunyai hubungan negatif, sedangkan kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap PDRB mempunyai hubungan positif dan keduanya berpengaruh signifikan terhadap disparitas. Sedangkan variabel inflasi dan tingkat pertumbuhan tenaga kerja non pertanian tidak berpengaruh terhadap disparitas di Provinsi Sumatera Utara.

Berikut hasil penelitian dengan menggunakan data indeks Williamson (CVw) pra pemekaran dengan melakukan regresi linier berganda. Untuk memastikan model regresi yang dibangun merupakan estimator yang telah bersifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator), maka perlu dilakukan uji asumsi klasik.

5.2.1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan sebagai syarat agar estimator parameter populasi yang dihasilkan bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Beberapa uji asumsi klasik yang harus dipenuhi antara lain:

5.2.1.1. Uji Normalitas

Uji asumsi klasik pertama yang harus dilakukan adalah uji normalitas. Berikut ini prosedur pengujian normalitas data dengan menggunakan statistik Jarque-Bera:

1. Desain Hipotesis:

H_0 : Residual terdistribusi secara normal

H_1 : Residual tidak terdistribusi secara normal

2. Kriteria Penolakan:

Tolak H_0 jika Prob. JB-stat $< \alpha$

di mana $(1-\alpha)$ adalah tingkat kepercayaan (*confidence level*)

Hasil perhitungan Probabilitas Jarque-Bera statistik dengan menggunakan EViews 4.0 memberikan nilai 0,55663 (lihat Lampiran 3). Dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 5\%$) maka kita tidak dapat menolak H_0 , artinya residual terdistribusi secara normal dan asumsi normalitas telah terpenuhi.

5.2.1.2. Uji Multikolienaritas

Multikolienaritas adalah adanya hubungan antara variabel independen dalam satu regresi. Apabila terdapat masalah tersebut maka akan melanggar salah satu asumsi dalam metode OLS yaitu tidak ada hubungan linier antara variabel independen. Salah satu *rule of thumb* tentang gejala multikolienaritas adalah model mempunyai koefisien determinasi yang tinggi (R^2) katakanlah diatas 0,8 tetapi hanya sedikit variabel independen yang signifikan mempengaruhi variabel dependen melalui uji t. Namun berdasarkan uji F secara statistik signifikan yang berarti semua variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Dalam hal ini terjadi suatu kontradiktif dimana berdasarkan uji t secara individual variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, namun secara bersama-sama variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

Untuk membuktikan secara statistik maka digunakan matriks korelasi antar variabel independen untuk melihat apakah ada hubungan linier antara variabel independen atau gejala multikolienaritas. Dari hasil matriks korelasi antar variabel dalam lampiran 4, tidak terdapat nilai korelasi yang lebih dari 0,8 maka model tersebut dapat dikatakan tidak ada hubungan linier antara variabel independen.

5.2.1.3. Uji Autokorelasi

Secara harfiah, autokorelasi adalah adanya korelasi antara anggota observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. Dalam kaitannya dengan asumsi metode OLS, autokorelasi merupakan korelasi antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan yang lain. Sedangkan salah satu asumsi penting metode OLS berkaitan dengan variabel gangguan adalah tidak adanya hubungan antara variabel gangguan yang satu dengan variabel gangguan yang lain.

Autokorelasi pada umumnya terjadi pada data runtut waktu (*time series*) sedangkan data *cross section* diduga jarang ditemui adanya unsur autokorelasi. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dapat diuji dengan *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test* pada Eviews 4.0 dan didapatkan output seperti pada lampiran 5. Berikut ini prosedur pengujian yang dilakukan:

1. Desain Hipotesis:

H_0 : Tidak ada autokorelasi antar residual pengamatan dari setiap variabel bebas

H_1 : Ada autokorelasi antar residual pengamatan dari setiap variabel bebas

2. Kriteria Penolakan:

Tolak H_0 jika $\text{Prob. } \chi^2 < \alpha$

di mana $(1-\alpha)$ adalah tingkat kepercayaan (*confidence level*)

Hasil perhitungan $\text{Prob. } \chi^2$ dengan menggunakan EViews 4.0 memberikan nilai 0,05375 (lihat Lampiran 5). Dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 5\%$) maka kita tidak dapat menolak H_0 , artinya tidak ada autokorelasi antar residual pengamatan dari setiap variabel bebas.

5.2.1.4. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas muncul jika variabel gangguan mempunyai varian yang tidak konstan. Heteroskedastisitas akan sering ditemui dalam data *cross section*, sementara data *time series* jarang mengandung unsur heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas ini masih menghasilkan estimator yang linier dan tidak bias namun tidak lagi efisien karena tidak mempunyai varian yang minimum.

Dalam penelitian ini model linier berganda digunakan untuk mengestimasi parameter regresi. Dari model linier berganda awal kemudian diuji dengan *White Heteroscedasticity Consistence Variance* pada Eviews 4.0 dan didapatkan output seperti pada lampiran 6. Berikut ini prosedur pengujian yang dilakukan:

1. Desain Hipotesis:

H_0 : Tidak ada heteroskedastisitas

H_1 : Ada heteroskedastisitas

2. Kriteria Penolakan:

Tolak H_0 jika $\text{Prob. } \chi^2 < \alpha$

di mana $(1-\alpha)$ adalah tingkat kepercayaan (*confidence level*)

Hasil perhitungan Prob. χ^2 dengan menggunakan EViews 4.0 memberikan nilai 0,313883 (lihat Lampiran 6). Dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 5\%$) maka H_0 ditolak dan konsistensi *varian error* menunjukkan bahwa pada model tidak terdapat heteroskedastisitas.

Setelah melakukan uji asumsi diatas, maka diperoleh model sebagai berikut :

$$IW = 0,7292 + 0.000039 INF - 1.2316 TRA - 0.7611 EXP - 0.00057 URB$$

Dari hasil estimasi model linier berganda diperoleh nilai R^2 sebesar 0,85298 Hal ini menunjukkan bahwa variasi variabel-variabel bebas tingkat inflasi (variabel INF), peranan perdagangan dari net ekspor terhadap PDRB (variabel TRA), kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap PDRB (variabel EXP), dan tingkat pertumbuhan tenaga kerja non pertanian (variabel URB) yang ada dalam model tersebut dapat menjelaskan sebanyak 85,30 persen terhadap variasi variabel Indeks Williamson. Sebanyak 14,70 persen variasi dalam variabel dependent dijelaskan oleh variasi variabel lainnya yang tidak dijelaskan di dalam model.

Dari model diatas dapat diinterpretasikan variabel-variabel independen sebagai berikut:

a. Tingkat inflasi

Dari model diperoleh koefisien tingkat inflasi sebesar 0.000039 dengan probabilitas 0.9234 berarti $\alpha > 5\%$ menunjukkan bahwa uji t dengan tingkat kepercayaan 5% diperoleh hasilnya tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap indeks Williamson.

b. Perdagangan diukur dari rasio net ekspor terhadap PDRB

Dari model diperoleh koefisien rasio dari nilai net ekspor terhadap PDRB sebesar 1.23162 dengan probabilitas 0.0000 yang dibawah $\alpha = 5\%$ menunjukkan bahwa setiap kenaikan share pengeluaran pemerintah sebesar 0.1 unit maka akan menurunkan indeks Williamson sebesar 0,12316.

c. Share Pengeluaran Pemerintah

Dari model diperoleh koefisien kontribusi pengeluaran pemerintah sebesar 0.761065 dengan probabilitas 0.2226 berarti $\alpha > 5\%$ menunjukkan bahwa uji t dengan tingkat kepercayaan 5% diperoleh hasilnya tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap indeks Williamson.

d. Tingkat pertumbuhan tenaga kerja non pertanian

Dari model diperoleh tingkat pertumbuhan tenaga kerja non pertanian sebesar 0.000573 dengan probabilitas 0.4574 berarti $\alpha > 5\%$ menunjukkan bahwa uji t dengan tingkat kepercayaan 5% diperoleh hasilnya tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap indeks Williamson.

Dengan melihat besaran koefisien regresi hasil estimasi tersebut dapat digunakan oleh pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menentukan prioritas kebijakan dalam mengurangi tingkat disparitas pendapatan antar kabupaten/kota di Sumatera Utara. Prioritas kebijakan tersebut adalah meningkatkan komoditi ekspor dengan melakukan efisiensi sumber daya alam dan menciptakan lapangan kerja baru untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

5.2.2. Hubungan Inflasi terhadap Disparitas Pendapatan di Provinsi Sumatera Utara

Hasil regresi menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang positif antara variabel inflasi dengan variabel Indeks Williamson, artinya variabel inflasi tidak mempengaruhi Indeks Williamson di Provinsi Sumatera Utara.

Laju inflasi menunjukkan stabilitas harga yang merupakan ukuran keberhasilan ekonomi makro suatu negara. Inflasi yang tinggi biasanya ditengarai memiliki efek negatif bagi perekonomian sebab inflasi yang tinggi akan mengganggu mobilisasi dana domestik dan tingkat investasi. Prospek pembangunan ekonomi jangka panjang akan memburuk jika terjadi inflasi yang tinggi yang tidak dikendalikan, sebab akan mengurangi investasi produktif, mengurangi ekspor dan menaikkan impor barang sehingga akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Secara umum rumah tangga dan perusahaan akan memiliki kinerja yang buruk ketika terjadi inflasi tinggi (hiperinflasi) dan tidak dapat diprediksikan.

Pada tahun 1998 tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Utara mencapai 83,56 persen termasuk dalam kategori inflasi yang sangat tinggi. Keadaan ini menunjukkan perekonomian yang sangat parah, dimana harga-harga mengalami kenaikan yang sangat drastis. Banyak perusahaan/industri-industri yang terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja dikarenakan biaya operasional yang sangat

tinggi yang harus mereka tanggung, baik biaya modal kerja yang dikarenakan tingginya bunga kredit, dan biaya yang lain yang diperlukan untuk melakukan produksi atau menjalankan usahanya. Dampak dari kejadian ini mengakibatkan bertambahnya pengangguran dan menurunnya pendapatan riil masyarakat dan masyarakat miskin bahkan sulit untuk bersekolah. Para pemilik perusahaan juga menjadi kesulitan atau enggan untuk membuka lapangan usaha baru dikarenakan biaya yang dibutuhkan sangat besar. Bagi mereka yang memiliki dana, cenderung menyimpan dananya di bank daripada membuka usaha, karena dengan demikian mereka tidak mengambil resiko kerugian.

Sedangkan pada tahun 2005, terjadinya inflasi yang tinggi disebabkan oleh kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak). Dikarenakan naiknya harga BBM yang naik cukup tinggi, menyebabkan harga-harga juga naik cukup tinggi, yang menyebabkan inflasi mencapai 22,41 %. Hal ini juga membuat ekonomi masyarakat makin terpuruk di Sumatera Utara.

Badan Pusat Statistik (2005) menyatakan bahwa tingkat inflasi yang berfluktuasi tinggi menggambarkan besarnya ketidakpastian nilai uang, tingkat produksi, distribusi dan arah perkembangan ekonomi sehingga dapat menimbulkan ekspektasi keliru yang dapat membahayakan perekonomian secara keseluruhan. Sebaliknya inflasi yang rendah juga tidak menguntungkan perekonomian karena menggambarkan rendahnya daya beli dan permintaan masyarakat akan barang dan jasa yang pada gilirannya memperlambat pertumbuhan ekonomi. Sesuai dengan Sukirno (2006) bahwa inflasi yang sangat lambat berlakunya dipandang sebagai stimulator dan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu kenaikan harga-harga yang tidak segera diikuti oleh kenaikan upah pekerja sehingga keuntungan akan bertambah. Pertambahan keuntungan akan menggalakkan investasi di masa mendatang dan ini akan mewujudkan percepatan dalam pertumbuhan ekonomi.

Badan Pusat Statistik Sumatera Utara telah mengidentifikasi laju inflasi pada empat lokasi kota terpilih sebagai gambaran umum laju inflasi yang terjadi setiap saat. Dari keempat kota tersebut dapat digeneralisasikan laju inflasi yang terjadi di sebuah kabupaten/kota yang berdekatan regionnya. Keempat kota tersebut adalah Kota Padang Sidempuan, Kota Sibolga, Kota Pematang Siantar

dan Kota Medan. Berikut gambaran tren inflasi dari empat kota pada kurun waktu tahun 1998 sampai tahun 2008 yang hasilnya disajikan dalam Tabel 5.4 di bawah.

Tabel 5.4. Laju Inflasi di empat Kota di Provinsi Sumatera Tahun 1998-2008

Tahun	Padang	Sidempuan	Sibolga	P. Siantar	Medan	Sumatera Utara
1998		85.72	85.01	80.23	83.81	83.56
1999		-0.14	1.65	-0.54	1.68	1.37
2000		3.95	6.96	4.67	5.9	5.73
2001		9.84	8.66	13.55	15.5	14.79
2002		10.18	11.58	9.41	9.49	9.59
2003		4.07	3.94	2.51	4.46	4.23
2004		8.99	6.64	7.31	6.64	6.80
2005		18.47	22.39	19.67	22.91	22.41
2006		10.02	5.03	6.06	5.79	6.11
2007		5.87	7.13	8.37	6.42	6.60
2008		1.87	1.59	2.72	2.69	10.72
Rata-rata		14.44	14.60	14.00	15.03	15.63

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel 5.4. dapat dilihat pada tahun 1998 dari tingkat inflasi di empat Kota dan Provinsi Sumatera Utara mencapai titik tertinggi lebih besar dari 80 %. Sedangkan pada tahun 1999, keadaan perekonomian yang membaik dan juga menyebabkan tingkat inflasi menurun dan ada Kota yang mencapai tingkat inflasi dengan minus. Pada tahun 2000 dan tahun 2003-2004 serta 2006-2008. Tingkat inflasi di ke empat Kota dan Provinsi Sumatera Utara dapat dikategorikan dengan tingkat inflasi yang rendah. Sementara tingkat inflasi dalam kategori sedang pada tahun 2001 dan 2005.

Dalam sebelas tahun terakhir dapat kita lihat laju tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi yang memberikan efek terhadap daya beli masyarakat terhadap produksi barang/jasa yang diproduksi. Jika dilihat secara keseluruhan menunjukkan inflasi yang terjadi di empat Kota cenderung sama dan dalam kategori yang dapat dikendalikan kecuali pada tahun 1998 saat terjadinya krisis ekonomi global, sedangkan untuk rata-rata inflasi di tingkat Provinsi masih dalam kategori sedang dikarenakan masih berkisar antara 10%-30% setahun.

Hal ini dapat dikatakan bahwa inflasi di Provinsi Sumatera Utara tidak berpengaruh terhadap penurunan disparitas pendapatan pada periode tahun 1987-2008. Ini dimungkinkan karena adanya intervensi atau campur tangan pemerintah pusat dan daerah dalam mengendalikan inflasi seperti melakukan operasi pasar jika harga barang-barang kebutuhan pokok naik dengan tajam. Sementara itu pada

tahun 1998 dilakukan dengan kegiatan berupa jaring pengaman sosial dan berlanjut terus sampai dengan sekarang seperti adanya bantuan langsung tunai pada tahun 2008.

5.2.3. Hubungan Perdagangan terhadap Disparitas Pendapatan dan Perkembangannya di Provinsi Sumatera Utara

Hasil regresi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara variabel perdagangan dengan variabel Indeks Williamson. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut didalam teori basis ekonomi, biasa disebut analisis basis digunakan untuk mengidentifikasi pendapatan yang berasal dari sektor basis pendapatan regional akan langsung meningkat bila sektor basis mengalami perluasan, sedangkan kesempatan kerja baru terasa dalam jangka panjang.

Teori ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Petumbuhan industri-industri yang menggunakan sumber daya lokal termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk di ekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja yang nantinya akan mengurangi disparitas pendapatan.

Peningkatan perdagangan yang diukur dari net ekspor terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Utara mempunyai nilai yang positif dimana nilai ekspor lebih besar dari nilai impor dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Sementara dari hasil regresi rasio perdagangan terhadap PDRB sudah dapat mengurangi ketimpangan pada saat ini.

Dalam rangka melihat komponen pembentuk ekspor provinsi Sumatera Utara dikarenakan data ekspor Kabupaten/Kota tidak tersedia digunakan pendekatan Location Quotient (LQ). Bila daerah yang belum berkembang dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang mempunyai keuntungan kompetitif sebagai basis ekspor, maka pertumbuhan daerah bersangkutan akan dapat ditingkatkan. Hal ini terjadi karena peningkatan ekspor tersebut akan memberikan efek berganda (multiplier effect) kepada perekonomian daerah. Dimana jika nilai dari $LQ > 1$ berarti sektor tersebut adalah sektor basis menunjukkan daerah tersebut memiliki potensi ekspor dibanding daerah lainnya.

Pengelompokan sektor-sektor berdasarkan LQ ini pada dasarnya masih juga bersifat kasar karena hanya didasarkan pada informasi sekunder, yaitu nilai tambah produksi sebagaimana diperoleh dari angka PDRB. Pengelompokan melalui LQ bersifat dinamis tergantung pada perkembangan kegiatan produksi (dihitung dari nilai tambah) dari sektor-sektor yang bersangkutan.

Jika dilihat dari sektor pertanian, daerah yang memiliki potensi ekspor lebih banyak berada dalam sebaran Kabupaten/Kota yang memiliki PDRB dibawah rata-rata PDRB Provinsi Sumatera Utara. Dalam penentuan tingkat kemakmuran Kabupaten/Kota, didasari atas PDRB per kapita, dimana Kabupaten/Kota yang memiliki PDRB per kapita diatas rata-rata PDRB Provinsi Sumatera Utara dikategorikan sebagai Kabupaten/Kota yang lebih makmur. Pada tabel 5.5., Kabupaten/Kota yang berkategori makmur ditunjukkan dengan tanda berbeda.

Tabel 5.5. Location Quotient Sektor Pertanian dan Penggalian/Pertambangan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara (2004-2008)

Kab/Kota	Sektor Pertanian	Kab/Kota	Sektor Penggalian	Kab/Kota	Sektor Industri
Dairi	2.72	Binjai	10.47	Labuhan Batu*	2.01
Karo*	2.33	Nias	3.28	Asahan*	1.86
Simalungun	2.27	Tanjung Balai*	3.13	Deli Serdang*	1.58
Langkat	2.26	Deli Serdang*	1.89	Binjai	1.01
Taput	2.03	Labuhan Batu*	1.88		
Tapteng	1.92	Tapsel	1.46		
Nias	1.63	Langkat	1.22		
Tapsel	1.55	Tapteng	1.12		
Asahan*	1.00				

Data diolah

*) Kabupaten/Kota kategori makmur

Jika dilihat dari sektor pertanian, daerah yang memiliki potensi ekspor lebih banyak berada dalam sebaran Kabupaten/Kota yang memiliki PDRB dibawah rata-rata PDRB Provinsi Sumatera Utara. Dalam penentuan tingkat kemakmuran Kabupaten/Kota, didasari atas PDRB per kapita, dimana Kabupaten/Kota yang memiliki PDRB per kapita diatas rata-rata PDRB Provinsi Sumatera Utara dikategorikan sebagai Kabupaten/Kota yang lebih makmur. Pada tabel 5.5., Kabupaten/Kota yang berkategori makmur ditunjukkan dengan tanda berbeda.

Berdasarkan data pada tabel 5.5., dapat diindikasikan bahwa pada sektor pertanian daerah yang berpotensi ekspor didominasi oleh daerah yang tidak

termasuk kategori daerah makmur sedangkan hanya terdapat dua kabupaten/kota saja yang merupakan daerah makmur yang berpotensi ekspor di sektor pertanian yaitu Kabupaten Karo dan Kabupaten Asahan dari sejumlah sembilan Kabupaten/Kota yang memiliki potensi ekspor. Sementara jika dilihat dari sektor Penggalian dan pertambangan juga menunjukkan tiga daerah dari kategori makmur yaitu Kota Tanjung Balai, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Labuan Batu yang memiliki kecenderungan ekspor dari sejumlah delapan Kabupaten/Kota sektor tersebut. Di sektor industri, terlihat sebaran dengan daerah yang berkategori makmur sebanyak tiga daerah yaitu Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Asahan dan Kabupaten Deli Serdang sedangkan terdapat satu daerah berkategori belum makmur yaitu Kota Binjai yang kesemuanya cenderung memiliki kemampuan ekspor. Sehingga dengan peningkatan ekspor yang memiliki share lebih besar dari sektor pertanian dan pertambangan dengan sebaran di Kabupaten/Kota yang PDRB nya berada dibawah rata-rata maka peningkatan ekspor tersebut diindikasikan dari perekonomian pada daerah-daerah yang kurang berkembang. Peningkatan pada daerah yang kurang berkembang tersebut akan mengejar ketertinggalan dengan daerah maju sehingga dapat menurunkan disparitas.

Peranan pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya sangat diperlukan untuk meningkatkan perdagangan di tiap daerah. Bagi pemerintah perdagangan dilakukan dengan harapan devisa tersebut dapat memberikan efek multiplier bagi pertumbuhan ekonomi wilayah. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah harus memilih sektor-sektor yang apabila berkembang mampu mendorong kemajuan sektor-sektor lain sehingga pada akhirnya mendorong kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan yang didasarkan kepada karakteristik daerah itu sendiri. Di Provinsi Sumatera Utara tujuan perdagangan bermacam-macam tergantung dari karakteristik daerah, untuk perdagangan di sektor pertanian seperti Kabupaten Dairi, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Langkat, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Nias adalah daerah yang cocok untuk perdagangan tersebut, untuk sektor penggalian dan pertambangan Kabupaten Binjai dan Kabupaten Nias, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Langkat dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Sedangkan untuk

sektor industri oleh Kabupaten Kota Binjai dan Kabupaten/Kota yang kategori tingkat kemakmurannya rendah.

5.2.4. Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Disparitas di Provinsi Sumatera Utara

Pengeluaran pemerintah diukur dari total belanja rutin dan belanja pembangunan dari pemerintah daerah. Variabel ini digunakan untuk mengukur pengeluaran pemerintah yang tidak memperbaiki produktivitas perekonomian.

Hasil regresi menunjukkan variabel kontribusi pengeluaran pemerintah dengan probabilitas 0.2226 dengan $\alpha > 5\%$ menunjukkan bahwa uji t dengan tingkat kepercayaan 5% diperoleh hasilnya tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap indeks Williamson di Provinsi Sumatera Utara.

Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut disparitas pendapatan di Provinsi Sumatera Utara diduga disebabkan oleh belum sesuainya proporsi anggaran yang diarahkan pada sektor produktif. Semakin besar pengeluaran pemerintah daerah yang tidak produktif, semakin kecil tingkat pertumbuhan perekonomian daerah. Jika belanja pemerintah diarahkan pada sektor produktif seperti pembangunan infrastruktur jalan, infrastruktur pertanian, bantuan modal untuk usaha kecil, dan usaha-usaha lain yang mendukung perekonomian maka pertumbuhan ekonomi akan lebih merata dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih maju, dimana pertumbuhan ekonomi dengan memunculkan tumbuhnya usaha baru akan diikuti dengan tumbuhnya usaha lain melalui dampak *multiplier* yang terjadi. Pembangunan infrastruktur jalan akan meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam aktifitas ekonomi. Pembangunan infrastruktur pertanian meningkatkan produktifitas pertanian dan menjamin ketersediaan dan efisiensi faktor produksi di sektor pertanian, sedangkan bantuan modal bertujuan memperluas usaha mikro sehingga dapat meningkatkan produktifitas.

Tabel 5.6. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Menurut Jenis Pengeluaran tahun 2007-2009 (dalam juta rupiah)

No	Jenis Pengeluaran	Realisasi		
		2007	2008	2009
I	Belanja Tidak Langsung	14,077.247	10,573.256	12,494.146
1	Belanja Pegawai	6.025.053	8.355.173	10.086.861
2	Belanja Bunga	530.338	13.516	11.056
3	Belanja Subsidi	1.947.843	21.453	13.090
4	Belanja Hibah	2.980.176	630.722	377.353
5	Belanja Bantuan Sosial	114.762	350.901	386.526
6	Belanja Bagi Hasil Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	187.253	764.252	842.411
7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	940.155	373.790	644.297
8	Belanja Tidak Terduga	1.351.667	63.451	132.552
II	Belanja Langsung	6,399.673	8,051.772	8,007.128
1	Belanja Barang dan Jasa	2.399.798	3.268.370	3.453.134
2	Belanja Modal	3.999.875	4.783.402	4.553.994
III	Total Belanja	20.476.920	18,625.028	20.501.274

Sumber : BPS Sumatera Utara dan DJPK (Kemenkeu RI)

Dari tabel 5.6. dapat dilihat realisasi pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dibagi menjadi 2 bagian yaitu belanja tidak langsung dimana bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program. Sedangkan belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program masyarakat.

Berdasarkan tabel 5.6., dapat dilihat realisasi belanja tidak langsung mengalami penurunan pada tahun 2008 namun pada tahun 2009 mengalami peningkatan kembali sebesar Rp. 12.494.146.000.000. Sementara itu belanja langsung sempat mengalami penurunan pada tahun 2009 dengan nilai sebesar Rp. 8.007.128.000.000.

Jika dilihat secara keseluruhan dari total belanja Provinsi Sumatera Utara selama 2007-2009, pengeluaran pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi, namun tahunnya 2009 mengalami peningkatan dengan nilainya sebesar Rp.20.501.274.000.000. Namun peningkatan tersebut tidak mempengaruhi penurunan disparitas pendapatan di Provinsi Sumatera Utara. Jika dilihat dari proporsi belanja di atas, dapat dikatakan bahwa belanja pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum sepenuhnya menyentuh sasaran untuk menurunkan disparitas pendapatan dan perlu adanya perbaikan dalam pengeluaran belanja

pemerintah agar pembangunan yang dilaksanakan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Belanja langsung mempunyai dampak terhadap pendapatan pegawai negeri. Pendapatan PNS yang merupakan bagian dari masyarakat meningkat akibat peningkatan belanja langsung akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat akan meningkatkan konsumsi rumah tangga sehingga diharapkan dapat meningkatkan produksi yang dapat meningkatkan perekonomian. Namun pada penelitian ini, belanja pemerintah Provinsi Sumatera Utara periode tahun 1987-2008 tidak mempengaruhi penurunan disparitas di Provinsi Sumatera Utara.

5.2.5. Hubungan Tingkat Pertumbuhan Tenaga Kerja non Pertanian dengan Disparitas di Provinsi Sumatera Utara

Hasil regresi menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan tenaga kerja non pertanian dengan probabilitas 0.6769 dengan $\alpha > 5\%$ menunjukkan bahwa uji t dengan tingkat kepercayaan 5% diperoleh hasilnya tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap indeks Williamson di Provinsi Sumatera Utara.

Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut ketersediaan tenaga kerja memiliki arti penting dalam proses produksi. Tetapi tidak kalah pentingnya adalah bahwa daya tarik dan tenaga kerja adalah upah. Apabila upah yang diterima besar maka kecenderungan untuk meningkatkan produktifitas juga besar. Dengan meningkatnya produktifitas akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, yang akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga dapat menurunkan tingkat kesenjangan.

Pada tabel 5.8., dapat dilihat pada periode tahun 1987-2008, persentase tenaga kerja pertanian pada tahun 1987 dengan nilai 60.10% dan mengalami kenaikan sampai dengan tahun 1991 (63.53%) dan pada tahun berikutnya mengalami penurunan sampai dengan tahun 2008 dengan nilai 47.12%. Sementara itu persentase tenaga kerja non pertanian pada tahun 1987 dengan nilai 39.90% dan mengalami kenaikan sampai dengan tahun 1991 (36.47%) dan pada tahun berikutnya mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2008 dengan nilai 52.88%. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran jumlah tenaga kerja pertanian menuju tenaga kerja non pertanian, jika kita melihat dari persentase jumlah tenaga kerja non pertanian.

Tabel 5.7. Persentase Tenaga Kerja dan Tingkat Pertumbuhan Tenaga Kerja Pertanian dan non Pertanian tahun 1987-2008 (dalam persen)

Tahun	Persentase		Tingkat Pertumbuhan	
	Pertanian	Non Pertanian	Pertanian	Non Pertanian
1987	60.10	39.90	-	-
1988	59.54	40.46	7.30	9.83
1989	58.81	41.19	2.13	5.27
1990	60.46	39.54	-5.12	-11.41
1991	63.53	36.47	21.25	6.43
1992	60.22	39.78	-19.18	-7.00
1993	58.84	41.16	9.02	15.44
1994	58.10	41.90	1.70	4.84
1995	55.52	44.48	0.23	11.35
1996	56.61	43.39	3.00	-1.46
1997	52.24	47.76	-6.39	11.66
1998	53.73	46.27	2.42	-3.53
1999	53.18	46.82	7.84	10.25
2000	53.57	46.43	2.81	1.22
2001	55.20	44.80	-0.32	-6.66
2002	55.56	44.44	-0.26	-1.70
2003	56.03	43.97	-1.05	-2.92
2004	51.06	48.94	-6.03	14.77
2005	52.68	47.32	0.002	-6.28
2006	49.64	50.36	-5.25	7.01
2007	47.60	52.40	0.29	8.83
2008	47.12	52.88	7.90	10.00
Rata-rata			1.06	3.62

Sumber : BPS Sumatera Utara

Berdasarkan tabel 5.7., dapat juga dilihat bahwa pertumbuhan tenaga kerja pertanian mengalami fluktuasi persentase pertumbuhan, pada tahun 1988 dengan nilai 7.30% mengalami penurunan sampai pada tahun 1990 dengan nilai -5.12 dan pada tahun 1991 meningkat tajam mencapai 21.25 dan menurun tajam pada tahun 1992 sebesar 19.18%, dan pada tahun 2008 mencapai tingkat pertumbuhan tenaga kerja pertanian sebesar 7.90%. Sementara pertumbuhan tenaga kerja non pertanian mengalami fluktuasi persentase pertumbuhan, pada tahun 1988 dengan nilai 9.83% mengalami penurunan yang tajam pada tahun 1990 dengan nilai -11.41 dan pada tahun 1993 meningkat tajam mencapai 15.44 dan mengalami fluktuasi sampai dengan pada tahun 2008 mencapai tingkat pertumbuhan tenaga kerja non pertanian sebesar 10.00%.

Jika kita lihat periode tahun 1988-2008 dari rata-rata tingkat pertumbuhan tenaga kerja non pertanian (3,62%) diatas tenaga kerja pertanian (1.06%) per tahunnya, dapat diduga pertumbuhan tenaga kerja non pertanian dapat menurunkan tingkat disparitas dengan anggapan bahwa tingkat upah yang

diterima besar maka kecenderungan untuk meningkatkan produktifitas juga besar sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Namun pada kenyataannya tenaga kerja non pertanian tersebut masih belum mampu untuk menurunkan tingkat disparitas di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini kemungkinan disebabkan masih belum meratanya penyebaran tenaga kerja non pertanian Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 5.8. Persentase Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Utara Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2004-2008 (dalam persen)

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Tahun				
		2004	2005	2006	2007	2008
1	Petanian	51.06	52.68	49.64	47.60	47.12
2	Penggalian / Pertambangan	0.62	0.21	0.24	0.40	0.29
3	Industri Pengolahan	8.07	6.01	7.08	7.60	8.08
4	Listik, Gas dan Air	0.25	0.25	0.33	0.20	0.17
5	Bangunan	4.11	4.05	3.75	4.80	4.93
6	Perdagangan dan Perhotelan	17.18	17.67	19.21	18.80	20.20
7	Pengangkutan	6.28	6.35	6.60	6.40	6.12
8	Lembaga keuangan	1.00	2.23	1.35	1.30	1.05
9	Jasa Kemasyarakatan	10.78	10.55	11.81	12.90	12.04

Sumber : BPS Sumatera Utara

Pada tabel 5.8., dapat dilihat bahwa pada periode tahun 2004-2008 mempunyai proporsi tenaga kerja non pertanian yang tertinggi pada sektor Perdagangan dan perhotelan dengan persentase tahun 2004 sebesar 17.18% dan terus meningkat sampai dengan tahun 2008 sebesar 20.20% dan diikuti sektor jasa kemasyarakatan dengan persentase tahun 2004 sebesar 10.78% dan terus meningkat sampai dengan tahun 2008 sebesar 12.04%. Kedua sektor ini cenderung berkembang di Kota Medan dan sekitarnya, dimana kota Medan merupakan ibukota Provinsi dan juga berperan sebagai pusat pertumbuhan perdagangan dan perhotelan serta jasa.

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Hasil penghitungan Indeks Williamson (CVw) di Provinsi Sumatera Utara selama periode tahun 1987 sampai dengan tahun 2008 menunjukkan penurunan disparitas pendapatan di Provinsi Sumatera Utara dengan rincian sebagai berikut :
 - tahun 1988, nilai CVw sebesar 0,567.
 - saat krisis ekonomi global tahun 1998, nilai CVw turun menjadi 0,426.
 - tahun 2005 akibat adanya shock dari luar yaitu kebijakan pemerintah pusat untuk menaikkan harga BBM, nilai CVw sebesar 0,436.
 - sedangkan pada tahun 2008 nilai CVw sebesar 0,485 termasuk kategori disparitas sedang.
 - Pendapatan perkapita yang paling rendah di Provinsi Sumatera Utara terdapat pada Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Nias, sedangkan pendapatan perkapita paling tinggi terdapat pada di Kota Medan.
2. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, diperoleh hasil sebagai berikut :
 - peranan perdagangan yang diukur melalui net ekspor terhadap PDRB mempunyai hubungan negatif berarti peranan perdagangan dapat menurunkan disparitas pendapatan di Provinsi Sumatera Utara.
 - sedangkan tingkat inflasi, kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap PDRB dan tingkat pertumbuhan tenaga kerja non pertanian tidak mempengaruhi tingkat disparitas pendapatan di Provinsi Sumatera Utara.
3. Disparitas antar wilayah
 - wilayah Agropolitan, sampai pada tahun 2008 nilai CVw sebesar 0.126 termasuk dalam kategori disparitas rendah, dikarenakan karakteristik geografis dan sumber daya alam di wilayah tersebut hampir sama dan pada umumnya pendapatan masyarakatnya dari pertanian.

- wilayah Agromarinepolitan Pantai Barat, sampai pada tahun 2008 nilai CVw sebesar 0,161 termasuk dalam kategori disparitas rendah, dikarenakan karakteristik geografis dan sumber daya alam di wilayah ini hampir sama di tiap Kabupaten/Kota dan berada di pesisir Pantai Barat Sumatera Utara dan sejak dahulu dahulu sampai sekarang umumnya masyarakatnya bekerja sebagai nelayan, namun sudah mulai bergeser menuju ke subsektor perkebunan seperti karet, kakao dan kelapa sawit.
 - wilayah Agromarinepolitan Pantai Timur, sampai pada tahun 2008 nilai CVw sebesar 0,401 termasuk dalam kategori disparitas pendapatan sedang, menunjukkan distribusi pendapatan antar Kabupaten/Kota di wilayah pembangunan Agromarinepolitan Pantai Timur lebih tinggi disparitas pendapatannya dibandingkan wilayah Agropolitan dan Agromarinepolitan Pantai Barat. Dikarenakan adanya Kota Medan sebagai pusat ibukota Provinsi Sumatera Utara dan adanya Kabupaten/Kota yang memiliki perbedaan potensi unggulan masing-masing di subsektor perkebunan, perikanan, tanaman pangan, sektor penggalian dan pertambangan dan sektor perdagangan, sehingga dapat meningkatkan disparitas pendapatan.
4. Koefisien variabel peranan perdagangan diukur dari nilai net ekspor terhadap PDRB sebesar 1.23162 dengan probabilitas 0.0000 yang dibawah $\alpha = 5\%$ menunjukkan bahwa setiap kenaikan share net ekspor terhadap PDRB sebesar 0.1 unit maka akan menurunkan indeks Williamson sebesar 0,12316. Artinya bahwa peningkatan share dari net ekspor terhadap PDRB sebesar 0.1 unit akan menurunkan perbedaan pendapatan per kapita antar kabupaten/kota di prov Sumatera Utara sebesar 0,12316.

6.2. Saran dan Rekomendasi

6.2.1. Implikasi Kebijakan

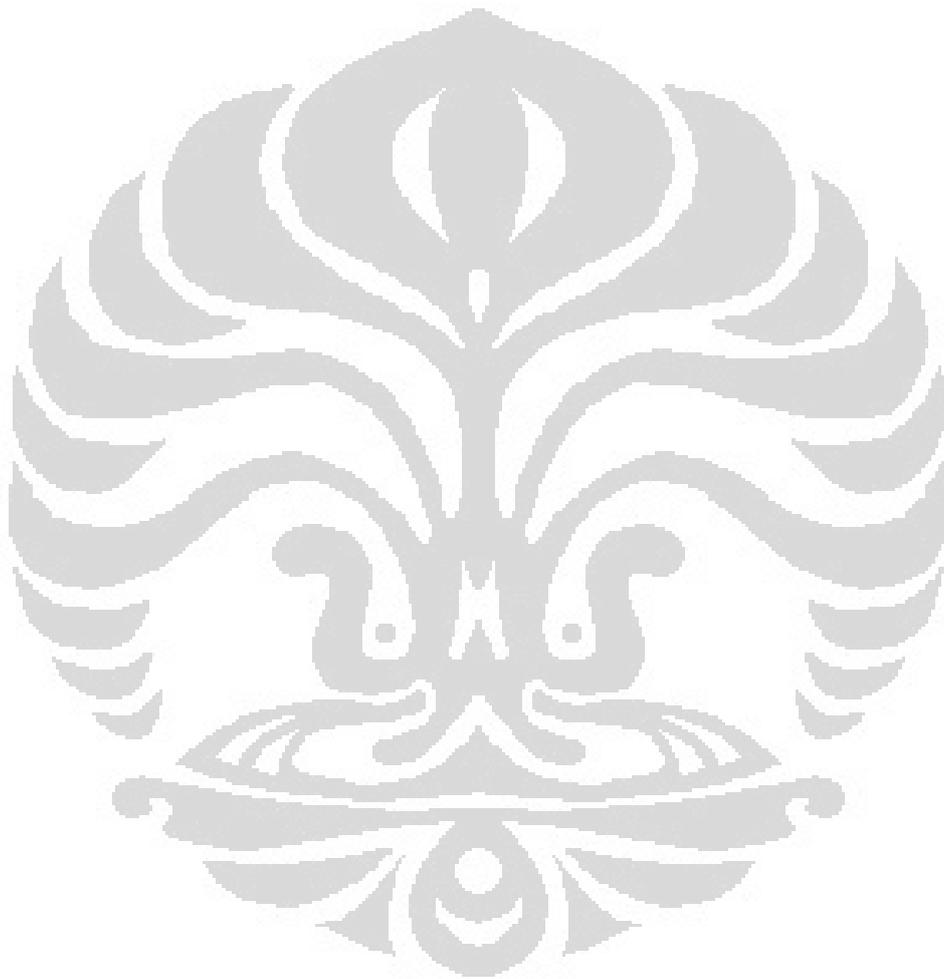
1. Berdasarkan kesimpulan bahwa peranan net ekspor terhadap PDRB menurunkan disparitas pendapatan di Provinsi Sumatera Utara. Pemerintah Provinsi Sumatera perlu melakukan kebijakan-kebijakan bagi Kabupaten/Kota yang memiliki potensi ekspor di sektor pertanian dan industri, melalui beberapa kebijakan antara lain :

- Sektor pertanian dengan meningkatkan ketersediaan modal, teknologi, bibit benih, pasar bagi kebutuhan petani dan mempermudah akses pasar bagi produksi pertanian dan informasi terhadap petani.
 - Sektor industri dengan memberikan kemudahan sekaligus memfasilitasi akses bagi daerah penghasil ekspor untuk mendapatkan ketersediaan sumberdaya lokal, memudahkan dalam proses perizinan industri, memperlancar arus distribusi industri hulu ke hilir dan mempromosikan sumberdaya lokal dan hasil produksi industri untuk pemasaran ke luar daerah dan menciptakan kerjasama dengan daerah lainnya.
2. Disamping itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus lebih aktif mendorong percepatan kerjasama sektor perdagangan hasil produksi daerah, antar Kabupaten/Kota maupun ke luar provinsi sejalan dengan program dan kegiatan Agropolitan dan Agromarinopolitan yang telah direncanakan dan dilakukan selama ini. Meskipun Pembangunan di wilayah Agropolitan dan Agromarinopolitan yang selama ini belum semuanya berjalan sesuai program, maka perlu mendapat perhatian dan ditangani dengan baik oleh para stakeholder terkait. Jika kegiatan ini berjalan baik dan sesuai dengan yang direncanakan maka akan dapat mendorong pembangunan wilayah sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat sesuai dengan potensi unggulan masing-masing daerah yang akhirnya dapat menurunkan disparitas pendapatan di Provinsi Sumatera Utara.
3. Pemerintah Sumatera Utara perlu melakukan kebijakan untuk mendorong perdagangan hasil produksi dari wilayah Agropolitan dan Agromarinopolitan. Adapun kebijakan yang perlu dilakukan sebagai berikut :
- melakukan standarisasi untuk menjaga kualitas produk yang telah menjadi komoditi ekspor, seperti jeruk Medan, durian Medan, ikan teri Tanjung Balai.
 - menjaga stabilitas harga dari produk yang dihasilkan petani sehingga pada musim panen harga tidak jatuh dan membuat petani mengalami kerugian.
 - meningkatkan nilai tambah hasil-hasil produksi pertanian dan kelautan dengan cara mendorong tumbuhnya industri pengolahan sehingga selain

menumbuhkan sumber-sumber pendapatan baru, juga dapat menjamin terserapnya hasil produksi di wilayah pembangunan tersebut.

6.2.2. Saran

Penelitian ini menyarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut dengan mengembangkan variabel bebas lainnya yang mempengaruhi disparitas pendapatan di Provinsi Sumatera Utara.



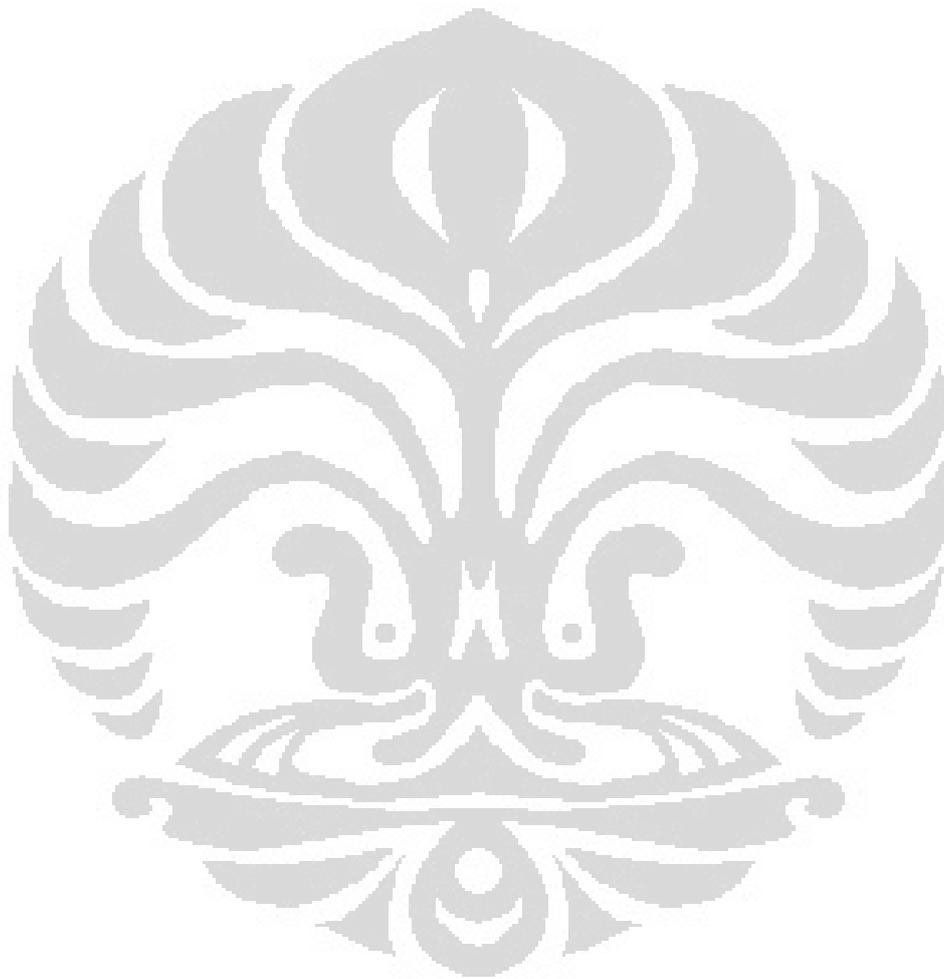
DAFTAR PUSTAKA

- Akita, Takahiro dan Lukman, R.A. 1995. Irregional Inequalities In Indonesia : A Sectoral Decomposition Analysis for 1975-1992. Buletin of Indonesia Economic Studies Vol. 31 No. 2 Agustus 1995.
- Arief Daryanto dan Yundy, Hafizrianda. 2010. Model-Model Kuantitatif untuk Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah : Konsep dan Aplikasi. PT. IPB Press. Bogor.
- Arsyad, Lincoln. 2002. Ekonomi Pembangunan. Edisi Kedua. BPFE. Yogyakarta.
- Arsyad, Lincoln. 2010. Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah. Edisi Kelima. BPFE. Yogyakarta.
- Bappeda Provinsi Sumatera Utara. 2007. Masterplan Agromarinepolitan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pulau Terluar Sumatera Utara.
- Bappenas. 2010. Panduan Revitalisasi Pengembangan Ekonomi Lokal. Direktorat Perkotaan dan Perdesaan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
- Boediono, 1982. Ekonomi Makro. BPFE-UGM, Yogyakarta.
- BPS Provinsi Sumatera Utara. 1983-2010. Provinsi Sumatera Dalam Angka. PD Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara.
- BPS Provinsi Sumatera Utara. 1993. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. 1983-1992.
- BPS Provinsi Sumatera Utara. 1999 Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kotamadya 1993-1998.
- BPS Provinsi Sumatera Utara. 2005. Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kotamadya 2000-2004.
- BPS Provinsi Sumatera Utara. 2010. Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kotamadya 2005-2009.
- BPS Pusat. 1994. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kotamadya di Indonesia 1983-1993.
- Etharina. 2004. Ketimpangan Antar Daerah di Indonesia : Analisis Dekomposisi Sektoral 1983-2004. Unpublished Tesis S2 MPKP Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Furong, Jin. 2007. Within-Urban Inequality and The Urban-Rural Gap in China

- Keegan, Warren. 1996. *Manajemen Pemasaran Global*. Edisi Bahasa Indonesia. Jilid 2 alih bahasa Alesander Sindoro. Prehalindo. Jakarta.
- Kotler, Philip and Armstrong, Gary. 1996. *Principles of Marketing*. 7th Edition. Prentice Hall, Inc.
- Kuncoro. Mundrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah. Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Majidi. N. 1997. *Anggaran Pembangunan dan Ketimpangan Ekonomi Antar Daerah*. Prisma. LP3S.
- Mankiw, G. 2007. *Makroekonomi*. Edisi Keenam. Erlangga. Jakarta.
- McCann, Philip. 2001. *Urban and Regional Economics*. Oxford University Press. New York.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. 2009. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara (2009-2013)*
- Setiono, Dedi, N.S. 2009. *Ekonomi Pengembangan Wilayah*. Penerbit UI Press. Jakarta.
- Sjahrijal. 2008. *Ekonomi Regional : Teori dan Aplikasi*. Praninta Offset. Padang.
- Sukirno, Sukirno. 2002. *Pengantar Teori Mikroekonomi*, Edisi ketiga. PT. Rajawali Grasindo Persada. Jakarta.
- Sukirno, Sukirno. 2004. *Pengantar Teori Makroekonomi*, Edisi ketiga. PT. Rajawali Grasindo Persada. Jakarta.
- Susanti, Hera., Moh. Ikhsan., dan Widyanti, 1995. *Indikator-Indikator Makro Ekonomi*, LPEM-UI.
- Tambunan. Tulus. 2001. *Perekonomian Indonesia : Teori dan Temuan Empiris*. PT. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Tarigan, R. 2005. *Ekonomi Regional. Teori dan Aplikasi*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Thee Kian Wie. 1981. *Perekonomian di Negara Berkembang*. Pustaka Jaya. Jakarta.
- Todaro, M. P dan S. C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Kesembilan. Jilid 1. Erlangga : Jakarta.
- Waluyo. Joko. 2004. *Hubungan Antara Tingkat Kesenjangan Pendapatan dengan Pertumbuhan Ekonomi : Studi Kasus Lintas Negara*, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Volume 9 No. 1. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Wibisono, Yusuf. 2003. Konvergensi di Indonesia: Beberapa Temuan Awal dan Implikasinya. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*. Vol.51.

Xu L.C. and H-F. Zou 2000. Explaining the Changes of Income Distribution in China. *China Economic Review* 11, 149-170.



Lampiran 1

Data Variabel Penelitian

TAHUN	IW	INFLASI	TRA	EXP	URB
1988	0.567	11.24	0.061	0.09	9.83
1989	0.589	6.64	0.094	0.08	5.27
1990	0.591	7.56	0.096	0.08	-11.41
1991	0.563	8.99	0.076	0.09	6.43
1992	0.597	4.56	0.051	0.09	-7.00
1993	0.564	9.75	0.080	0.09	15.44
1994	0.543	8.28	0.099	0.09	4.84
1995	0.517	7.24	0.094	0.08	11.35
1996	0.521	8.7	0.092	0.08	-1.46
1997	0.529	13.1	0.153	0.06	11.66
1998	0.426	83.56	0.222	0.05	-3.53
1999	0.439	1.37	0.184	0.05	10.25
2000	0.459	5.73	0.165	0.07	1.22
2001	0.463	14.79	0.162	0.07	-6.66
2002	0.451	9.59	0.180	0.08	-1.70
2003	0.432	4.23	0.197	0.08	-2.92
2004	0.416	6.8	0.175	0.08	14.77
2005	0.436	22.41	0.174	0.08	-6.28
2006	0.477	6.11	0.185	0.08	7.01
2007	0.495	6.6	0.136	0.09	8.83
2008	0.485	10.72	0.130	0.10	10.00

Lampiran 2

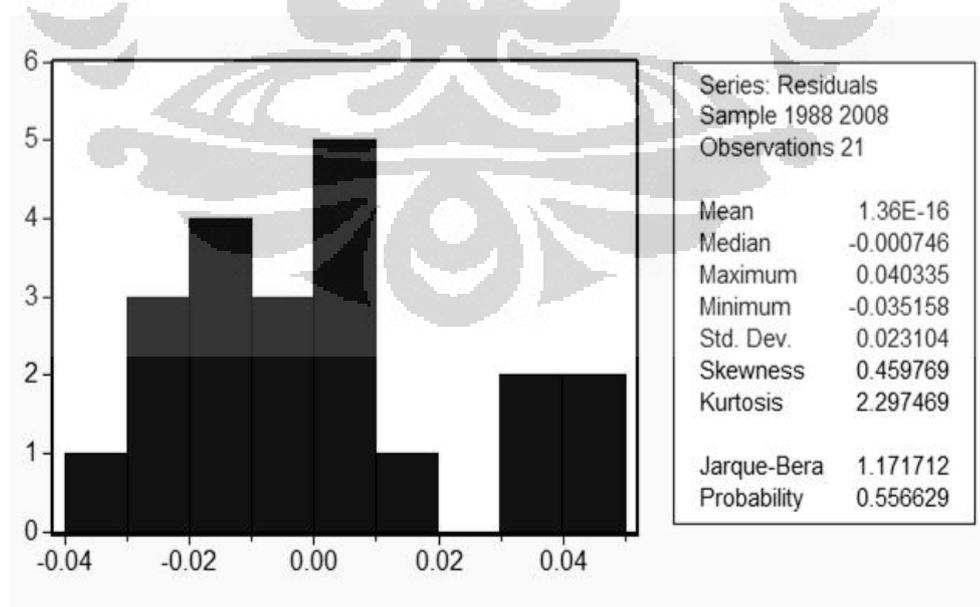
Hasil Analisis Regresi Awal

Dependent Variable: SER01
 Method: Least Squares
 Date: 01/17/12 Time: 12:08
 Sample: 1988 2008
 Included observations: 21

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
INF	3.91E-05	0.000400	0.097641	0.9234
TRA	-1.231621	0.149574	-8.234193	0.0000
EXP	-0.761065	0.599785	-1.268897	0.2226
URB	-0.000573	0.000752	-0.761561	0.4574
C	0.729177	0.062106	11.74079	0.0000
R-squared	0.852980	Mean dependent var		0.502857
Adjusted R-squared	0.816225	S.D. dependent var		0.060256
S.E. of regression	0.025831	Akaike info criterion		-4.270203
Sum squared resid	0.010676	Schwarz criterion		-4.021507
Log likelihood	49.83713	F-statistic		23.20717
Durbin-Watson stat	1.869062	Prob(F-statistic)		0.000002

Lampiran 3

Uji Normalitas (Jarque-Bera) Model Regresi



Lampiran 4

Uji Multikolinieritas

	IW	INF	TRA	EXP	URB
IW	1.000000	-0.303265	-0.910157	0.465710	0.022516
INF	-0.303265	1.000000	0.399340	-0.468891	-0.249116
TRA	-0.910157	0.399340	1.000000	-0.628352	-0.119399
EXP	0.465710	-0.468891	-0.628352	1.000000	0.133618
URB	0.022516	-0.249116	-0.119399	0.133618	1.000000

Lampiran 5

Uji Autokorelasi Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	2.700774	Probability	0.101869
Obs*R-squared	5.846570	Probability	0.053757

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 01/17/12 Time: 12:18

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
SER02	-0.000285	0.000412	-0.692421	0.5000
SER03	-0.092773	0.143387	-0.647013	0.5281
SER04	-0.101615	0.555421	-0.182952	0.8575
SER05	0.000145	0.000686	0.211054	0.8359
C	0.023276	0.057680	0.403538	0.6926
RESID(-1)	0.140095	0.253280	0.553121	0.5889
RESID(-2)	-0.612684	0.265512	-2.307560	0.0368
R-squared	0.278408	Mean dependent var	1.36E-16	
Adjusted R-squared	-0.030846	S.D. dependent var	0.023104	
S.E. of regression	0.023458	Akaike info criterion	-4.406022	
Sum squared resid	0.007704	Schwarz criterion	-4.057848	
Log likelihood	53.26324	F-statistic	0.900258	
Durbin-Watson stat	1.885359	Prob(F-statistic)	0.521484	

Lampiran 6

Uji Heteroskedastisitas White

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	1.203141	Probability	0.372800
Obs*R-squared	9.346891	Probability	0.313883

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 01/17/12 Time: 12:16

Sample: 1988 2008

Included observations: 21

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.006683	0.004642	-1.439659	0.1755
SER02	-8.25E-06	4.58E-05	-0.180171	0.8600
SER02^2	1.56E-07	5.75E-07	0.271581	0.7906
SER03	0.021119	0.023342	0.904743	0.3834
SER03^2	-0.094433	0.090822	-1.039758	0.3189
SER04	0.201660	0.118734	1.698420	0.1152
SER04^2	-1.516739	0.787721	-1.925476	0.0782
SER05	1.21E-05	2.28E-05	0.530855	0.6052
SER05^2	7.54E-07	2.44E-06	0.308710	0.7628
R-squared	0.445090	Mean dependent var	0.000508	
Adjusted R-squared	0.075150	S.D. dependent var	0.000593	
S.E. of regression	0.000571	Akaike info criterion	-11.80205	
Sum squared resid	3.91E-06	Schwarz criterion	-11.35440	
Log likelihood	132.9216	F-statistic	1.203141	
Durbin-Watson stat	1.680848	Prob(F-statistic)	0.372800	